



**BUPATI KUBU RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**TAHUN 2014-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUBU RAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah;
  - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dan RPJMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6  
r  
f  
f

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

6  
2  
R  
F

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);*
19. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);*
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi daerah.
13. Strategi adalah langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
15. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dalam suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan.
18. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN Tahun 2010-2014 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden yang penyusunannya berbedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) RPJMD ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi:
  - a. SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD dalam setiap tahunnya; dan
  - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD dalam setiap tahunnya.

## BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) RPJMD ini disusun berdasarkan asas:
  - a. demokrasi;
  - b. berkeadilan;
  - c. berkelanjutan;
  - d. berwawasan lingkungan; dan
  - e. kemandirian.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program SKPD, Lintas SKPD dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

## BAB IV SISTEMATIKA RPJMD

### Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

- c. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN;
  - d. BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS;
  - e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
  - f. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - g. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
  - h. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN;
  - i. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR DAN KINERJA DAERAH;
  - j. BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN; DAN
  - k. BAB XI PENUTUP.
- (2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

### Pasal 5

- (1) RPJMD ini dilengkapi dengan KLHS.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD ini.
- (3) Dokumen KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ini.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati bersama DPRD dapat melakukan penyempurnaan terhadap RPJMD ini.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 7

- (1) Evaluasi RPJMD oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen RPJMD, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

- b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian RPJMD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RPJMD periode berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati.

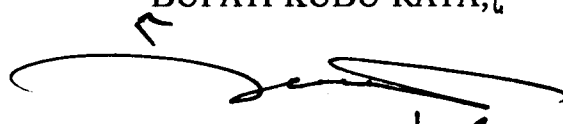
**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

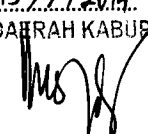
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 14 Juli 2014  
BUPATI KUBU RAYA,

  
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 15 Juli 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN SYAUNIK  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2014 NOMOR 1

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2014-2019

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 19 ayat (3) tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008*, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran Visi, Misi dan program-program prioritas Bupati yang dalam penyusunannya didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 ini memuat gambaran umum, kondisi daerah, analisa isu-isu strategis, Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, Strategis arah kebijakan Pembangunan Daerah, kebijakan Keuangan Daerah dan Program Prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya setiap tahun anggaran, selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

l  
r  
P  
f



Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

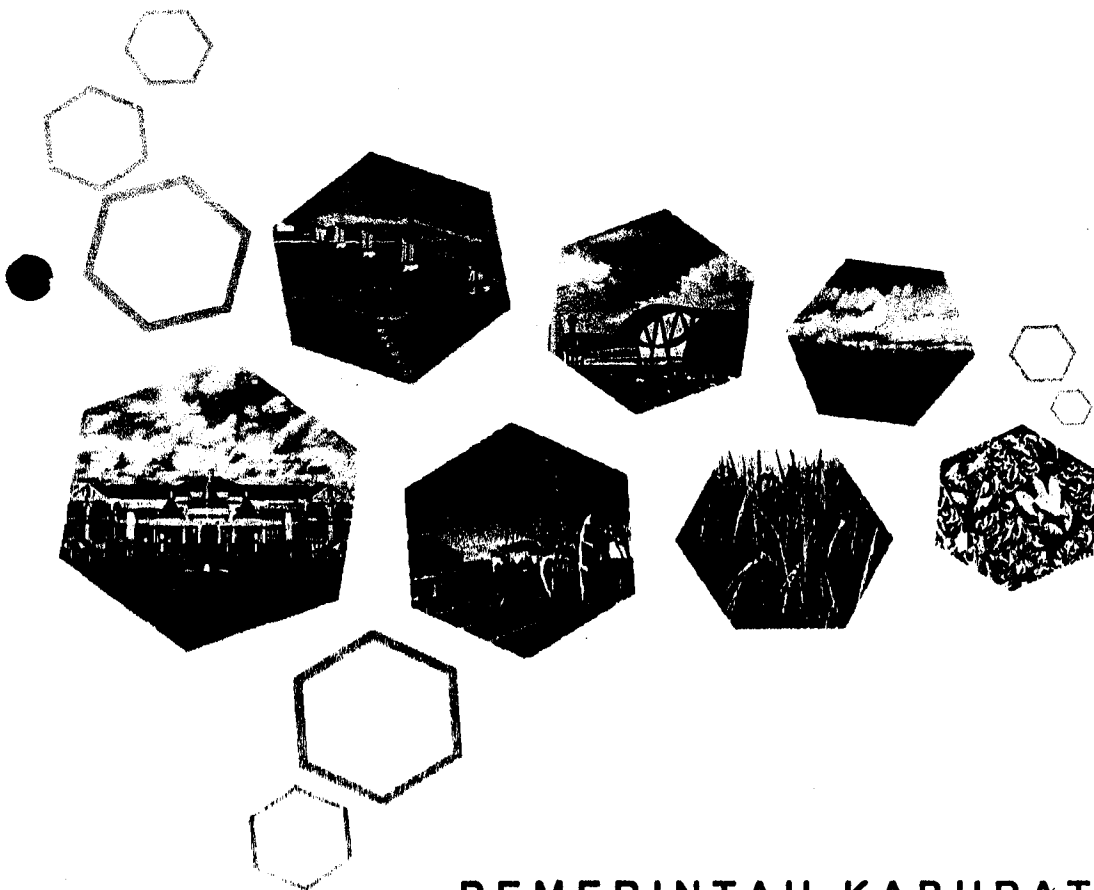
Pasal 8  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 27.

l  
r  
f  
f



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 01 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2014-2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2014**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum .....	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	I-5
1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN .....	I-5
1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD .....	I-6
1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RTRW .....	I-8
1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya dengan RPJMD Propinsi Kalimantan Barat .....	I-9
1.3.5. Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD.....	I-10
1.3.6. Hubungan RPJMD dengan RKPD.....	I-10
1.4. Sistematika Penyusunan.....	I-11
1.5. Maksud dan Tujuan.....	I-12
1.5.1. Maksud.....	I-12
1.5.2. Tujuan.....	I-12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah .....	II-7
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana.....	II-8
2.1.4. Demografi .....	II-8
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-10
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-10
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-16
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	II-18
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-20
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib .....	II-20
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-57



2.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	II-65
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-66
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II-67
2.4.3. Fokus Iklim Investasi .....	II-68
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia .....	II-69
<b>BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (2009-2014) .....	III-2
3.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah .....	III-9
<b>BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Permasalahan Pembangunan .....	IV-1
4.1.1. Identifikasi Lingkungan Internal .....	IV-1
4.1.2. Identifikasi Lingkungan Eksternal.....	IV-3
4.2. Isu-Isu Strategis.....	IV-4
4.2.1. Isu Strategis Bidang Ekonomi.....	IV-4
4.2.2. Isu Strategis Bidang Sosial Budaya.....	IV-5
4.2.3. Isu Strategis Bidang Infrastruktur .....	IV-6
4.2.4. Isu Strategis Kewilayahan .....	IV-6
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN .....</b>	<b>V-1</b>
5.1. Visi.....	V-2
5.2. Misi .....	V-2
5.3. Tujuan dan Sasaran Misi-Misi .....	V-4
<b>BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1. Strategi .....	VI-1
6.2. Arah Kebijakan .....	VI-3
6.3. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	VI-10
<b>BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>VII-1</b>
7.1. Kebijakan Umum Pembangunan .....	VII-1
7.2. Prioritas Pembangunan .....	VII-2
7.3. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 .....	VII-5



**BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN**

**PENDANAAN.....VIII-1**

A. Program Pada Setiap SKPD ..... VIII-1

B. Urusan Wajib ..... VIII-1

C. Urusan Pilihan ..... VIII-11

D. Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... VIII-56

**BAB IX PENETAPAN INDIKATOR DAN KINERJA DAERAH.....IX-1**

**BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN .....X-1**

10.1. Pedoman Transisi..... X-1

10.2. Kaidah Pelaksanaan..... X-1



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.....	II-2
Tabel 2.2	Penggunaan Lahan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 .....	II-6
Tabel 2.3	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2012 .....	II-9
Tabel 2.4	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2013 (jutaan) .....	II-10
Tabel 2.5	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2013 .....	II-11
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2013 (jutaan) .....	II-12
Tabel 2.7	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2013 .....	II-13
Tabel 2.8	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2012 .....	II-14
Tabel 2.9	Inflasi Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007-2012 .....	II-15
Tabel 2.10	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2012 .....	II-16
Tabel 2.11	Persentase Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2012 .....	II-18
Tabel 2.12	Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010-2014 .....	II-19
Tabel 2.13	Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 .....	II-20
Tabel 2.14	Kondisi APK dan APM Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2011 .....	II-20
Tabel 2.15	Banyaknya Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 .....	II-21
Tabel 2.16	Banyaknya Sekolah Dasar (SD), Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 .....	II-22



Tabel 2.17	Banyaknya Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 .....	II-22
Tabel 2.18	Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP), Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 .....	II-23
Tabel 2.19	Banyaknya Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 .....	II-23
Tabel 2.20	Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA), Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 .....	II-24
Tabel 2.21	Banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 .....	II-24
Tabel 2.22	Banyaknya Sekolah Madrasah Aliyah, Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 .....	II-24
Tabel 2.23	Kondisi dan Status Kesehatan Penduduk Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 .....	II-25
Tabel 2.24	Kondisi Prasarana Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 .....	II-26
Tabel 2.25	Sarana dan Prasarana SDA di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 .....	II-28
Tabel 2.26	Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Kubu Raya Menurut Sumber Utama Air Minum .....	II-29
Tabel 2.27	Distribusi Air Bersih PDAM Menurut Jenis Pelanggan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 .....	II-30
Tabel 2.28	Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 .....	II-31
Tabel 2.29	Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2009-2012 Kabupaten Kubu Raya .....	II-32
Tabel 2.30	Penanganan Rumah Layak Huni Tahun 2009-2013.....	II-33
Tabel 2.31	Jumlah Proyek, Realisasi Investasi PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kubu Raya (Juta Rupiah) Tahun 2009 - 2013 .....	II-37
Tabel 2.32	Jumlah Proyek, Realisasi Investasi PMA dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kubu Raya (Juta Rupiah) Tahun 2009 - 2013 .....	II-37
Tabel 2.33	Perbandingan Investasi/PMTB di Kabupaten Kubu Raya (Juta Rupiah).....	II-38
Tabel 2.34	Nilai Investasi dan ICOR Kabupaten Kubu Raya dan Kalimantan Barat .....	II-39
Tabel 2.35	Gambaran Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2012 .....	II-42



Tabel 2.36	Angkatan Kerja yang Bekerja dan Menganggur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2012 .....	II-42
Tabel 2.37	Kawasan Khusus Pendukung Ketahanan Pangan dan Agribisnis Terpadu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012.....	II-44
Tabel 2.38	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Perempuan terhadap Anak Laki-laki Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 .....	II-45
Tabel 2.39	Realisasi Peserta KB Baru Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 .....	II-46
Tabel 2.40	Jumlah Terminal di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 .....	II-47
Tabel 2.41	Banyaknya Alat Angkutan Pedalaman/Transportasi Air Dirinci Menurut Jenisnya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2013 .....	II-48
Tabel 2.42	Lokasi, Jenis Dermaga beserta Fasilitas yang Dimiliki Dermaga Kapal Penyebrangan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 .....	II-49
Tabel 2.43	Jumlah Dermaga/Steigher Angkutan Sungai Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 - 2013 .....	II-50
Tabel 2.44	Jenis Pelayanan Dasar, Jumlah Indikator dan Jumlah Indikator Yang Sudah Mencapai Target (100%) Tahun 2013 .....	II-55
Tabel 2.45	Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 .....	II-57
Tabel 2.46	Jumlah Perusahaan Pertambangan dan Penggalan serta Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 .....	II-60
Tabel 2.47	Pemasangan Energi Tenaga Surya Energi di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 .....	II-61
Tabel 2.48	Jumlah Industri di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2012 .....	II-63
Tabel 2.49	Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 - 2013 (Juta Rupiah).....	II-67
Tabel 2.50	Jumlah Lulusan Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2/S3) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 - 2012 .....	II-70
Tabel 2.51	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 - 2012 .....	II-71
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2013 .....	III-3
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2013 .....	III-4
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2013 .....	III-5





Tabel 3.4	Proyeksi Pendapatan Daerah Bukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2014 - 2019 .....	III-6
Tabel 3.5	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 .....	III-8
Tabel 3.6	Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009 - 2013 .....	III-9
Tabel 3.7	Proyeksi Belanja Daerah Menurut Kewenangan dan Urusan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 - 2019 .....	III-10
Tabel 4.1	Analisis SWOT Kabupaten Kubu Raya .....	IV-8
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kubu Raya.....	V-8
Tabel 6.1	Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Tahun 2014 - 2019 .....	VI-9
Tabel 6.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.....	VI-11
Tabel 7.1	Keterkaitan Prioritas Pembangunan.....	VII-5
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kubu Raya.....	VIII-15
Tabel 8.2	Kajian Pengaruh Program RPJMD.....	VIII-57
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.....	IX-2



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	I-11
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya .....	II-1
Gambar 2.2	Peta Struktur Ruang Kabupaten Kubu Raya .....	II-8



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 .....	II-14
Grafik 2.2	Tingkat Inflasi Menurut Kelompok Barang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 .....	II-16
Grafik 2.3	Perkembangan Koperasi Primer di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010-2012 .....	II-40
Grafik 2.4	Sebaran Mangrove di Kabupaten Kubu Raya .....	II-59
Grafik 2.5	Perkembangan Perusahaan Perdagangan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 - 2012 .....	II-65



**B A B I**

**P E N D A H U L U A N**

---

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019**



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 01 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2014-2019

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2014 - 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih yang memuat target-target pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mengembangkan potensi serta menangani permasalahan yang ada. RPJMD ini merupakan fase kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, yaitu "Kabupaten Kubu Raya Mandiri dan Sejahtera" dan merupakan pedoman bagi Penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 akan dilakukan 5 (lima) pendekatan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*)



## 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya 2014-2019, dilandasi dasar hukum antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);





25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya**

#### **1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RPJMN Tahun 2010-2014**

Sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional.

RPJMN 2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2010-2014 menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan. Adapun Visi RPJMN 2010-2014 adalah Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi, yaitu:

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera,
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi;
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menyusun/ menyesuaikan rencana pembangunan daerah yang terdapat



dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang adalah Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang akan menjadi sasaran duapuluh tahun sampai dengan tahun 2025. Didalam RPJPN ini dibagi empat pentahapan dan skala prioritas yang dibagi dalam empat tahapan RPJMN. RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 mengacu pada tahap kedua RPJMN 2010-2014 dan juga memperhatikan RPJMN ketiga tahun 2015-2019 yang akan ditetapkan pada tahun penyusunan. Prioritas utama RPJMN kedua 2010-2014 adalah Memantapkan Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Membangun Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Memperkuat Daya Saing Perekonomian. Sedangkan Prioritas utama RPJMN ketiga tahun 2015-2019 adalah Memantapkan Pembangunan secara Menyeluruh dengan Menekankan Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Alam yang Tersedia, Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Keterkaitan Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 dengan RPJMN tahun 2010-2014 akan dijabarkan dalam BAB VII tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.

### **1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029**

RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih periode 2014-2019, harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Visi RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 "**Kabupaten Kubu Raya yang Mandiri dan Sejahtera**", merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.



Dalam RPJPD Kabupaten Kubu Raya 2009-2029, terdapat 4 (empat) tahapan RPJMD dengan prioritas RPJMD Tahap kedua tahun 2014-2019, sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar untuk menunjang aksesibilitas dan investasi daerah;
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam rangka pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan daerah dan pengembangan daya saing/keunggulan daerah dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip *Good Governance dan Clean Government*.

Pentahapan dan penentuan prioritas pembangunan RPJMD tahap kedua 2014-2019 dalam RPJPD Kabupaten Kubu Raya 2009-2029 akan memberikan arahan dalam menentukan prioritas pembangunan dalam RPJMD kedua untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah yang telah ditentukan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang, antara lain meliputi:

1. Meningkatkan masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia, religius, bertoleransi, berbudaya yang tinggi, mengembangkan modal sosial dan nilai kearifan lokal, serta meningkatkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, mengembangkan penelitian, mendorong inovasi, kreativitas dan kemandirian daerah di berbagai bidang, serta meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas kinerja aparatur pemerintahan, mengefektifkan reformasi birokrasi, menerapkan *Good Governance dan Clean Government*;



4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, agroindustri, teknologi, jasa, kemitraan, dan meningkatkan sarana, prasarana, infrastruktur wilayah yang merata dan berkualitas, serta memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.

### **1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 dengan RTRW Kabupaten Kubu Raya**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 memperhatikan dan mempertimbangkan rencana struktur dan rencana pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya sebagai dasar dalam menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kubu Raya.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi:

1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya;
3. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW Kabupaten Kubu Raya juga perlu memperhatikan RTRW Provinsi maupun daerah lain. Hal ini perlu dilakukan untuk sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Meskipun pada saat ini RTRW Kabupaten Kubu Raya masih dalam tahap pembahasan untuk proses penetapan dengan Peraturan Daerah,



namun rencana struktur dan pola ruang yang telah direncanakan dalam rancangan RTRW Kabupaten Kubu Raya akan menjadi acuan penyusunan program-program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019.

Program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur dan prasarana wilayah akan mengacu pada rencana struktur ruang yang meliputi:

1. Rencana Pusat-Pusat Kegiatan
2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama
3. Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan akan memperhatikan rencana pola ruang yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

#### **1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 dengan RPJMD Propinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018**

RPJMD Propinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018 telah ditetapkan dengan visi "Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera" dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Kecerdasan Sumberdaya Manusia
3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
4. Meningkatnya Sumberdaya Aparatur dan Pelayanan Publik
5. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar
6. Meningkatnya Kemampuan Pembiayaan Pembangunan
7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya

Penentuan prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Kubu Raya harus menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Propinsi Kalimantan Barat dengan pertimbangan adanya persamaan kepentingan



atau tujuan strategis yang harus disinergiskan, adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama, dan adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama serta adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 dengan RPJMD Propinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018 akan dijabarkan dalam BAB VII tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.

#### **1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 dengan Renstra SKPD**

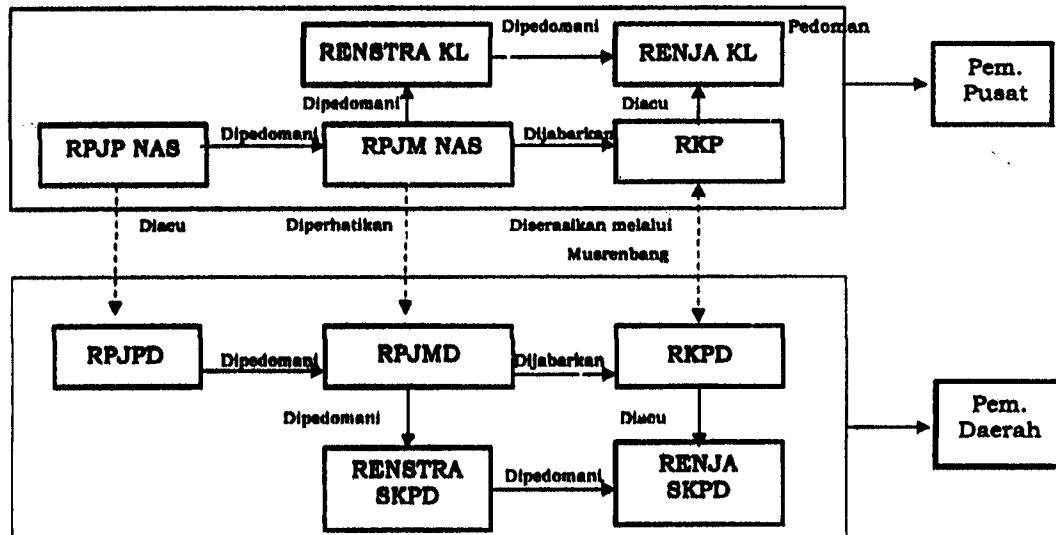
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala SKPD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik.

#### **1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 dengan RKPD**

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2019 setiap tahun akan dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD. Untuk memberikan arahan dalam pentahapan pencapaian visi jangka menengah daerah akan ditentukan arah kebijakan tahunan yang akan menjadi tema RKPD selama periode RPJMD kedua berlangsung, penentuan tema RKPD tahunan akan dijabarkan dalam BAB VI tentang Strategi dan Arah Kebijakan.



Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1

### Hubungan Antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

#### 1.4. Sistematika Penyusunan

RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
SERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
DAERAH
- BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG  
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX PENETAPAN INDIKATOR DAERAH
- BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN



## **1.5. Maksud dan Tujuan**

### **1.5.1. Maksud**

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, sebagai berikut:

1. Untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, RPJM Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 serta berbagai aspirasi seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.
2. Sebagai acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kubu Raya secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dapat terjaga, yang pada gilirannya akan mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator - indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### **1.5.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 antara lain meliputi:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati kedalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2014-2019;
2. Sebagai rujukan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kubu Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana





APBD Kabupaten Kubu Raya, APBD Propinsi Kalimantan Barat dan APBN serta sumber dana lainnya;

3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar SKPD, antara Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
4. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
5. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
6. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha);
7. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
8. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
9. Mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

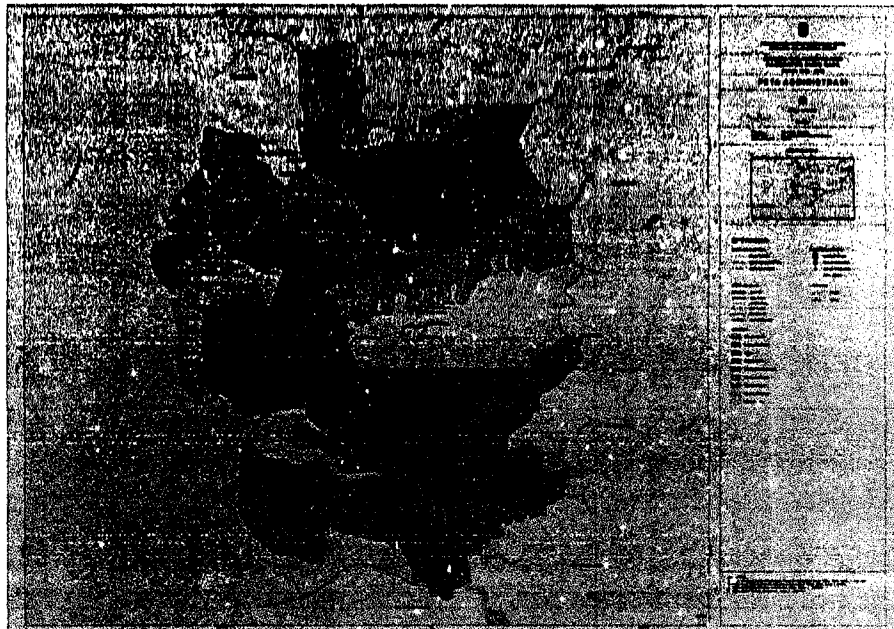
#### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

###### A. Geografi

Secara geografis Kabupaten Kubu Raya terletak disisi Barat Daya Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi  $0^{\circ} 13' 27''$  Lintang Utara sampai dengan  $1^{\circ} 00' 15''$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ} 02' 47''$  sampai dengan  $109^{\circ} 58' 17''$  Bujur Timur, dengan luas wilayah lebih kurang  $6.985,24 \text{ km}^2$  atau  $698.524 \text{ Ha}$  dan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Landak
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Karimata



Gambar 2.1

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN KUBU RAYA

Sedangkan secara geostrategis Kabupaten Kubu Raya memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu sebagai *hinterland* Kota Pontianak serta merupakan bagian dari *Pontianak Metropolitan Area*. Letak yang sangat



strategis tersebut menjadikan Kabupaten Kubu Raya sebagai simpul transportasi utama di Kalimantan Barat, baik transportasi udara, darat maupun transportasi sungai.

Secara administratif Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan dan 117 desa. Untuk lebih rincinya luas wilayah dan jumlah desa menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**LUAS WILAYAH DAN JUMLAH DESA MENURUT KECAMATAN**  
**KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	KECAMATAN	IBUKOTA	JUMLAH DESA	LUAS (KM <sup>2</sup> )	PERSENTASE (%)
1	Batu Ampar	Padang Tikar	15	2.002,70	28,67
2	Terentang	Terentang	9	786,40	11,26
3	Kubu	Kubu	20	1.211,60	17,35
4	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai	14	291,90	4,18
5	Sungai Kakap	Sungai Kakap	13	453,17	6,49
6	Rasau Jaya	Rasau Jaya	6	111,07	1,59
7	Sungai Raya	Arang Limbung	20	929,30	13,30
8	Sungai Ambawang	Ambawang Kuala	15	726,10	10,39
9	Kuala Mandor B	Kuala Mandor	5	473,00	6,77
<b>Kabupaten Kubu Raya</b>			<b>117</b>	<b>6.985,24</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2014 (Data Diolah)

## B. Topografi

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dataran rendah, umumnya datar, sebagian bergelombang dan sebagian kecil berbukit/bergunung dengan kemiringan 0% - >60%. Meskipun hampir seluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya berupa dataran rendah dan rawa-rawa dengan ketinggian <10 m dan kemiringan <2%, namun sesuai dengan kondisi geologis dan geomorfologisnya masih dapat dijumpai daerah-daerah dengan relief >10 m dan dengan kemiringan berkisar antara 2 - >60%, yang umumnya dijumpai pada dataran dan bukit-bukit kecil yang muncul atau menyembul diantara dataran rendah dan rawa-rawa.

## C. Geologi

Secara geologis, Kabupaten Kubu Raya sebagian besar terdiri dari endapan aluvial, pasang surut, danau, rawa dan undak. Berdasarkan



posisinya, terletak pada formasi aluvium dan endapan rawa (Qa) yang merupakan formasi paling muda. Formasi ini terdiri dari kerikil, pasir, lanau, lumpur dan gambut. Endapan ini menutupi dataran aluvial dan pasang surut di bagian barat, lembah sungai kapuas dan lembah-lembah sungai besar lainnya yang mengalir ke terain perbukitan yang terpotong-potong dan kedalam dataran aluvial.

Bagian barat dan selatan terdiri dari endapan-endapan laut dan sungai baru berumur paling muda dan menempati seluruh zona pertanian bagian barat Kabupaten Kubu Raya. Zona pantai terdiri dari cekungan liat yang tertutup oleh rawa-rawa gambut dan dilintasi danau-danau dangkal dan rawa yang terkena banjir secara periodik yang berada diantara teras-teras tertutup gambut.

Jenis tanah yang ditemui di wilayah Kabupaten Kubu Raya yaitu jenis tanah aluvial, gleisol, organosol dan regosol.

1. **Aluvial**, jenis tanah Aluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, berumur masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium. Secara keseluruhan tanah aluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, tekstur beraneka ragam, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur, serta konsistensinya keras waktu kering dan teguh waktu lembab. Sifat kimia dari tanah jenis ini sedang sampai baik, reaksi tanahnya masam sampai netral, kandungan bahan organik rendah, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya, kesuburan tanahnya sedang sampai tinggi. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai (hasil dari lumpur yang mengendap), dataran aluvial pantai, dan daerah cekungan (depresi).
2. **Gleisol**, tanah yang selalu jenuh air sehingga berwarna kelabu atau menunjukkan sifat-sifat hidromorfik lain.
3. **Organosol Gley Humus** atau **Tanah Gambut** atau **Tanah Organik**, jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan rawa atau rerumput rawa, dengan ciri dan sifat: tidak terjadi diferensiasi horizon secara jelas, ketebalan lebih dari 0.5 meter, warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak berstruktur, konsistensi tidak lekat hingga agak lekat, kandungan organik lebih dari 30% untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20% untuk tanah tekstur pasir, umumnya bersifat sangat asam (pH 4.0), kandungan



unsur hara rendah.

4. **Regosol**, tanah bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60%, hanya mempunyai horison penciri ochrik, histik atau sulfurik.

#### D. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Kubu Raya terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional karena melintasi beberapa kabupaten bahkan beberapa provinsi.

Adapun wilayah sungai di Kabupaten Kubu Raya, meliputi:

1. Sungai besar terdapat di Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Punggur Besar, dan Sungai Landak; dan
2. Sungai kecil terdapat di Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Bara Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sopar, Sungai Krawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Masjid, Sungai Sekapau, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayam, Sungai Padu Empat dan Sungai Nibung.

Sedangkan Daerah rawa terdiri dari:

1. Daerah Rawa (DR) Nasional, terdiri atas 27 DR, yaitu; DR. Kapuas Kecil I, DR. Kapuas Kecil II, DR. Kapuas Kecil III, DR. Jawi - Kalimas - Betutu, DR. Punggur- Selat Kering, DR. Rasau Jaya I, II, III ,IV (Bintang Mas), DR. Sungai Bulan, DR. Sungai Asam - Bengkarek, DR. Tebang Kacang, DR. Pinang Komplek, DR. Jangkang I + II, DR. Air Putih, DR. Kubu Komplek (Kelang, Tl.Nangka, Sungai Terus), DR. Sungai Terus, DR. Olak Olak Kubu, DR. Dabung - Dabung SP II, DR. Sungai Selamat - Seruat, DR. Kerawang Komplek, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Mendawak Linda, DR. Sungai Nipah, DR. Teluk Pakedai, DR. Radak I + II, DR. Terentang, DR. Terentang Hulu;
2. Daerah Rawa Provinsi, terdiri atas 3 DR, yaitu: DR Ambangah, DR. Kuala Karang, dan DR Sungai Selamat;
3. Daerah Rawa Kabupaten, terdiri dari 68 DR, yaitu; DR. Sepuk Keladi, DR. Sepuk Perupok, DR. Sepuk Laut, DR. Tanjung Saleh, DR. Pulau



Nyamuk, DR. Tanjung Wangi, DR. Pematang Tujuh, DR. Sangkar Dunia, DR. Teluk Bakung, DR. Kuala Dua, DR. Kapur, DR. Mekar Baru, DR. Dusun Obyek Sungai Durian, DR. Teluk Kapuas, DR. Pulau Limbung, DR. Gunung Tamang, DR. Pelita Jaya, DR. Bemban, DR. Ambawang, DR. Kampung Baru, DR. Mengkalang, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Suka Maju, DR. Padang Tikar I, DR. Padang Tikar II, DR. Padang Tikar, DR. Sungai Jawi, DR. Ambarawa, DR. Tasik Malaya, DR. Tanjung Harapan, DR. Sungai Deras, DR. Arus Deras, DR. Selat Remis, DR. Teluk Gelam, DR. Tanjung Bunga, DR. Sungai Nibung, DR. Karya Jaya, DR. Betuah, DR. Teluk Empening, DR. Teluk Bayur, DR. Permata, DR. Terentang Hilir, DR. Sungai Ambawang Kuala, DR. Durian, DR. Jawa Tengah, DR. Simpang Kanan, DR. Puguk, DR. Pasak Piang, DR. Pasak, DR. Loncek, DR. Tamang, DR. Korek, DR. Lingga, DR. Pancaroba Sungai, DR. Pancaroba, DR. Lais, DR. Tapah, DR. Teluk Lerang, DR. Blong, DR. Lintang Batang, DR. Jalo, DR. Benuah, DR. Kuala Mandor A, DR. Kuala Mandor B, DR. Sungai Enau, DR. Kubu Padi, DR. Retok;

4. Daerah Irigasi Kabupaten, meliputi Daerah Irigasi Baharu Ambawang, Daerah Irigasi Bemban Timur, Daerah Irigasi Bemban Barat, Daerah Irigasi Ence Manan, Daerah Irigasi Nuri, Daerah Irigasi Padu Ampat dan Daerah Irigasi Samak di wilayah Kecamatan Kubu dengan keseluruhan seluas 944 Ha dan setelah perubahan menjadi 3.360 Ha.

#### **E. Klimatologi**

Sebagai daerah tropis yang dilalui garis khatulistiwa, Kabupaten Kubu Raya memiliki suhu dan kelembaban udara yang tinggi, dan sebagaimana kondisi Kalimantan Barat pada umumnya, dikenal sebagai daerah dengan curah hujan yang tinggi.

Pada tahun 2012 rata-rata curah hujan di Kabupaten Kubu Raya adalah 256,8 mm. Curah hujan terendah tercatat pada bulan Agustus yaitu 73 mm dan tertinggi tercatat pada bulan Desember yaitu sebesar 502 mm. Sedangkan rata-rata hari hujan pada tahun 2012 adalah 18 hari. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November yaitu 30 hari, sedangkan terendah terjadi pada bulan Juni yaitu 6 hari.

Temperatur udara rata-rata di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2012, yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Supadio, berkisar antara 22,1°C sampai dengan 32,9°C. Suhu terendah tercatat pada bulan Agustus



yang tercatat sebesar 22,1<sup>o</sup>C sedangkan temperatur udara tertinggi tercatat pada bulan April yaitu sebesar 32,9<sup>o</sup>C.

Pada tahun 2012, rata-rata kelembaban nisbi tercatat sekitar 83 persen. Lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun kelembaban nisbi tertinggi terjadi pada bulan Desember yakni sebesar 87 persen dan kelembaban nisbi terendah tercatat pada bulan Juni, Agustus dan September yaitu sebesar 80 persen.

#### F. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan dapat mengindikasikan adanya potensi sumber daya alam di wilayah tertentu dan sejauh mana potensi yang ada telah dibudidayakan, serta implikasinya terhadap pola perkembangan wilayah baik dari segi fisik maupun nonfisik. Berikut gambaran mengenai penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2010 masih didominasi oleh kawasan hutan (hutan negara dan hutan rakyat), sebesar 59,02% dari luas wilayah Kabupaten Kubu Raya, yang tersebar di semua kecamatan, kemudian diikuti dengan sawah (meliputi sawah irigasi sederhana, sawah tadah hujan, dan sawah pasang surut) sebesar 9,88%, dan perkebunan sebesar 9,68%.

**Tabel 2.2**  
**PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN 2010**

<b>NO</b>	<b>Penggunaan</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Tegalan/ Ladang	31.651,75	4,53
2	Semak	42.308,06	6,06
3	Perkebunan Rakyat	55.278,85	7,91
4	Perkebunan Besar	175.496,83	25,12
5	Kebun Campuran	9.955,67	1,43
6	Hutan Sejenis	53.737,70	7,69
7	Hutan Lebat	150.508,14	21,55
8	Hutan Belukar	173.993,00	24,91
9	Sawah	5.594,00	0,80
<b>Jumlah</b>		<b>698.524,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RUPA BUMI INDONESIA (RBI) TAHUN 2010



### 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

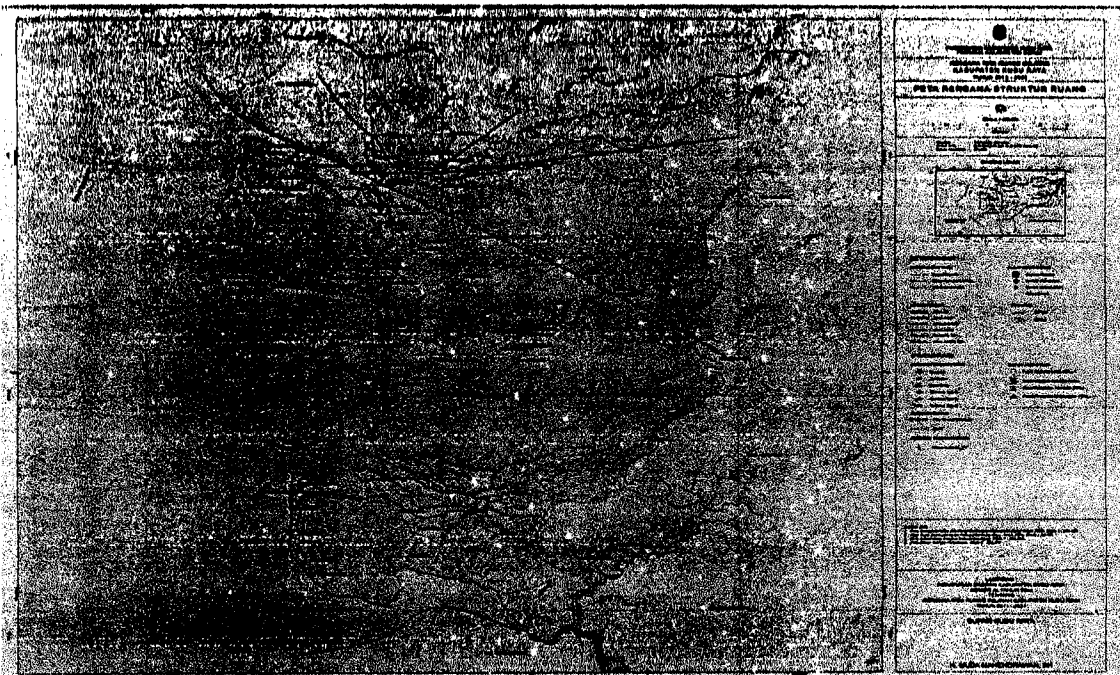
Menurut typelogi Williamson dan hasil analisis Klassen pada tahun 2011 Kabupaten Kubu Raya masuk dalam klasifikasi daerah maju dan cepat tumbuh, dimana angka PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi diatas angka PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat dipahami mengingat Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah baru pemekaran dan secara geografis berada pada daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi. Perkembangan Kabupaten Kubu Raya ini semakin didukung dengan penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang meliputi Kawasan Metropolitan Pontianak dan Kawasan Perkotaan Sungai Raya dan Sungai Ambawang, dimana PKN merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.

Disamping itu, kondisi letak yang strategis tersebut menjadikan Kabupaten Kubu Raya sebagai simpul transportasi utama di Kalimantan Barat, baik transportasi udara, darat maupun transportasi sungai, yang menjadi pembangkit kegiatan ekonomi. Simpul transportasi utama dimaksud ditunjang dengan keberadaan Bandara Supadio di Kecamatan Sungai Raya, dan terminal antar lintas batas negara (ALBN) di Kecamatan Sungai Ambawang.

Di sisi lain, faktor ketersediaan lahan yang masih luas dan merupakan daerah *hinterland* yang berbatasan dengan Kota Pontianak, pembangunan infrastruktur jalan Trans-Kalimantan yang melintasi wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagai penghubung antar kabupaten bahkan antar provinsi, serta masuknya wilayah Kecamatan sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Raya ke dalam pusat kegiatan nasional, menjadi keunggulan Kabupaten Kubu Raya dalam pengembangan dan pertumbuhan kota baru di masa mendatang.

Dalam pengembangan wilayah yang cukup pesat tersebut, Kabupaten Kubu Raya telah menyusun rencana struktur ruang yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang mengatur konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah dan jaringan prasarana lainnya. Berikut rencana pengembangan wilayah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan rencana struktur ruang.





**Gambar 2.2**  
**PETA STRUKTUR RUANG KABUPATEN KUBU RAYA**

### 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Kubu Raya yang telah diidentifikasi diantaranya:

#### A. Kawasan rawan erosi, meliputi:

1. Kawasan rawan erosi pantai di Kabupaten Kubu Raya terdapat di Kecamatan Teluk Pakedai, Kubu, Batu Ampar dan Sungai Kakap; dan
2. Kawasan rawan erosi tebing sungai terdapat di Kecamatan Kubu, Sungai Kakap, Sungai Raya dan Rasau Jaya.

#### B. Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya;

#### C. Kawasan Rawan Banjir terdapat di Kecamatan Kuala Mandor B, Sungai Kakap, Sungai Raya, Terentang, Kubu, Teluk Pakedai, Rasau Jaya dan Sungai Ambawang.

### 2.1.4. Demografi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kubu Raya, Pada Tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya tercatat sebesar 522.174 jiwa, dengan seks rasio atau perbandingan jenis kelamin antara penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 103 yang artinya jika ada 100 penduduk perempuan maka terdapat 103 penduduk laki-laki. Dilihat dari kelompok umur, penduduk Kubu Raya masih masuk dalam kelompok penduduk



muda, dimana jumlah penduduk kelompok umur dibawah 15 tahun mencapai 31,37% dari total penduduk yang ada, sedangkan penduduk yang berusia 75 tahun ke atas hanya 1,02%.

Jika dibagi dengan luas wilayah Kabupaten Kubu Raya, yakni 6.985,24 Km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk tercatat sebesar 75 jiwa per Km<sup>2</sup>. Sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kubu Raya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2009 sebesar 1,64%, tahun 2010 sebesar 2,15%, tahun 2011 sebesar 2,05%, dan tahun 2012 sebesar 2,14%. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2012, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2008 - 2012**

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan (%)			
		2008	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
1	Batu Ampar	32.008	32.533	33.113	33.660	34.252	1,64	1,78	1,65	1,76
2	Terentang	9.832	10.011	10.177	10.375	10.584	1,82	1,66	1,95	2,01
3	Kubu	35.804	36.140	36.469	36.829	37.252	0,94	0,91	0,99	1,15
4	Teluk Pakedai	18.168	18.467	18.767	19.064	19.404	1,65	1,62	1,58	1,78
5	Sungai Kakap	97.026	99.084	101.200	103.966	106.846	2,12	2,14	2,73	2,77
6	Rantau Jaya	22.441	22.960	23.499	24.084	24.691	2,31	2,35	2,49	2,52
7	Sungai Raya	181.507	184.233	188.014	191.929	196.102	1,50	2,05	2,08	2,17
8	Sei Ambawang	62.369	63.404	65.879*)	67.207*)	68.616	1,66	3,90	2,02	2,10
9	Kuala Mandor B	23.332	23.579	23.852	24.121	24.427	1,05	1,17	1,13	1,27
<b>Jumlah</b>		<b>482.487</b>	<b>490.408</b>	<b>500.970</b>	<b>511.235</b>	<b>522.174</b>	<b>1,64</b>	<b>2,15</b>	<b>2,05</b>	<b>2,14</b>

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2013

\*) Belum termasuk warga perum IV yang pengakuannya masuk Kota Pontianak

Dari tabel 2.3 terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2008 sampai dengan 2012 cenderung meningkat dengan angka rata-rata 2% lebih pertahun yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh perkembangan beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Kubu Raya yang terus berkembang sebagai akibat letak geografisnya yang berada di sekitar Ibukota Propinsi Kalimantan Barat yaitu Kota Pontianak. Perkembangan Kota Pontianak sebagai kota metropolitan dengan luas yang terbatas memberikan *multiplier effect* terhadap perkembangan kawasan pemukiman dan perdagangan serta jasa di wilayah Kabupaten Kubu Raya, disamping dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah keadaan ini juga ikut memberikan andil dalam penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Kubu Raya secara signifikan.



## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### A. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2013 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 12,60 triliun atau meningkat 12,52 % jika dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 11,20 triliun. PDRB Tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 berikut:

**Tabel 2.4**  
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU**  
**MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN 2008 - 2013 (JUTAAN)**

No	Sektor / Subsektor	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)
1	Pertanian	1.393.145,16	1.582.139,42	1.661.105,83	1.862.353,78	2.016.346,74	2.159.491,12
2	Pertambangan & Pengecilan	32.709,18	39.285,27	45.528,55	51.888,00	62.806,30	71.247,00
3	Industri Pengolahan	3.239.553,20	3.467.052,55	4.160.676,97	4.548.793,81	4.958.894,72	5.566.211,02
4	ListriK, Gas & Air Bersih	30.286,11	36.750,15	39.400,86	57.228,00	65.639,04	80.394,28
5	Bangunan	64.292,56	77.365,70	137.148,04	284.830,24	359.860,00	456.713,31
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.080.529,47	1.405.902,36	1.539.344,30	1.687.227,52	1.921.944,68	2.105.405,59
7	Pengangkutan & Komunikasi	465.593,46	531.880,35	686.827,69	849.153,36	1.039.745,69	1.272.500,14
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	153.766,52	169.175,82	187.366,35	234.380,12	281.158,28	330.401,55
9	Jasa-jasa	267.137,02	305.021,69	343.132,94	392.746,34	498.466,43	566.463,75
	<b>Jumlah Total</b>	<b>6.727.012,68</b>	<b>7.614.573,31</b>	<b>8.800.531,53</b>	<b>9.968.601,17</b>	<b>11.204.861,88</b>	<b>12.608.827,76</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2014

Selama kurun waktu 2010 - 2013, kinerja perekonomian Kabupaten Kubu Raya yang ditunjukkan dengan nilai PDRB selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sektor industri pengolahan sangat mendominasi perekonomian di Kabupaten Kubu Raya diikuti sektor pertanian dan perdagangan kemudian sektor hotel dan restoran. Dominasi sektor industri pengolahan sangat logis mengingat letak geografis sebagian besar kecamatan di kabupaten Kubu Raya yang berada pada hilir sungai Kapuas sehingga banyak menjadi tujuan pengolahan hasil sumberdaya alam dari daerah hulu dari luar kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat.



**Tabel 2.5**  
**KONTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR**  
**HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2008 - 2013**

No	Sektor / Subsektor	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian	20,70	20,77	18,91	18,68	18,00	17,12
2	Pertambangan dan Penggalian	0,49	0,52	0,52	0,52	0,56	0,56
3	Industri Pengolahan	48,16	45,53	47,36	45,63	44,26	44,14
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,45	0,48	0,45	0,57	0,59	0,63
5	Bangunan	0,95	1,02	1,57	2,86	3,21	3,62
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	16,07	18,46	17,52	16,93	17,15	16,69
7	Pengangkutan & Komunikasi	6,92	6,98	7,82	8,52	9,28	10,09
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,30	2,22	1,92	2,35	2,51	2,62
9	Jasa-jasa	3,98	4,00	3,90	3,94	4,45	4,49
	<b>Jumlah Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2014

Laju pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku selama empat tahun terakhir cenderung berfluktuasi, demikian juga dengan sektor-sektornya. Berdasarkan Tabel 2.5 diatas, pada tahun 2013 sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku, dengan nilai kontribusi sebesar 44,14%, sedangkan PDRB terkecil adalah PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai kontribusi 0,56%. Sektor Pertanian sebagai kontributor utama setelah sektor industri pengolahan terlihat cenderung menurun setiap tahun, hal ini menunjukkan adanya pengurangan produksi yang disebabkan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian akibat beberapa kecamatan yang berkembang sebagai kawasan permukiman dan sebagai implikasi dari perkembangan kawasan metropolitan Pontianak terhadap beberapa kecamatan di Kabupaten Kubu Raya.

Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut :



**Tabel 2.6**  
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN**  
**MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN 2008 - 2013 (JUTAAN)**

No	Sektor / Subsektor	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)
1	Pertanian	841.217,58	922.399,07	977.880,61	1.039.780,45	1.089.036,39	1.150.712,19
2	Pertambangan & Penggalian	17.240,60	18.835,67	20.578,83	22.260,12	24.360,32	25.330,13
3	Industri Pengolahan	2.106.707,69	2.154.578,52	2.265.932,13	2.366.766,11	2.458.679,69	2.570.472,59
4	Listrik, Gas & Air Bersih	24.312,53	24.907,95	25.101,02	28.793,80	32.247,91	35.852,61
5	Bangunan	36.812,79	40.608,81	54.356,77	65.014,39	73.590,64	82.431,88
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	737.687,88	787.238,47	816.002,11	853.946,21	909.492,24	940.108,51
7	Pengangkutan & Komunikasi	336.289,77	382.307,24	438.909,64	514.445,99	620.357,59	745.860,29
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	98.171,69	103.459,97	107.979,89	117.262,52	129.724,63	143.717,94
9	Jasa-jasa	191.196,02	212.982,30	229.911,99	249.759,52	272.301,85	295.130,85
	<b>Jumlah Total</b>	<b>4.389.636,55</b>	<b>4.647.308,00</b>	<b>4.936.652,99</b>	<b>5.258.029,11</b>	<b>5.609.791,26</b>	<b>5.989.616,98</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2014

PDRB Kabupaten Kubu Raya atas dasar harga konstan tahun 2008-2013 mengalami pertumbuhan yaitu dari Rp. 4,38 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 5,98 triliun pada tahun 2013. Selama tahun 2008-2013, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan, diikuti oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan diikuti sektor jasa-jasa. Nilai PDRB juga mengalami kenaikan dari 5.60 triliun rupiah pada tahun 2012 menjadi 5.98 triliun rupiah di tahun 2013. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perekonomian Kabupaten Kubu Raya mengalami pertumbuhan sekitar 6.77 persen. Kenaikkan PDRB atas dasar harga konstan tersebut murni sebagai peningkatan produksi, karena nilai PDRB atas dasar harga konstan telah terbebas dari pengaruh inflasi.



**Tabel 2.7**  
**KONTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR**  
**HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2008 - 2013**

No	Sektor / Subsektor	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian	19,16	19,85	19,81	19,78	19,41	19,21
2	Pertambangan dan Pengalihan	0,39	0,41	0,42	0,42	0,43	0,42
3	Industri Pengolahan	47,99	46,36	45,90	45,01	43,83	42,91
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,55	0,54	0,51	0,55	0,57	0,59
5	Bangunan	0,84	0,87	1,10	1,24	1,31	1,37
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,81	16,94	16,53	16,24	16,21	15,69
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7,66	8,23	8,89	9,78	11,06	12,45
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,24	2,23	2,19	2,23	2,31	2,39
9	Jasa-jasa	4,36	4,58	4,66	4,75	4,85	4,92
	<b>Jumlah Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2014

Dari Tabel 2.7 dapat dilihat bahwa dalam empat tahun telah terjadi peningkatan riil meskipun tidak terlalu besar namun menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh kenaikan harga atau tingkat inflasi.

Ada tiga kelompok sektor dalam PDRB menurut lapangan usaha, yaitu kelompok sektor Primer, kelompok Sektor Sekunder dan kelompok Sektor Tersier. Kelompok Sektor Primer terdiri dari sektor Pertanian dan Pertambangan, Kelompok sektor Sekunder terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor konstruksi dan bangunan, sedangkan kelompok sektor tersier terdiri dari 4 (empat) sektor lainnya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa lainnya.

Kelompok sektor sekunder memegang peranan yang dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Kubu Raya, atau dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Kubu Raya adalah struktur ekonomi modern yang tidak lagi berbasis primer atau sektor tradisional, sedangkan PDRB per



kapita Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2008-2012 cenderung meningkat, seperti yang digambarkan pada Tabel 2.8 berikut:

**Tabel 2.8**  
**PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PERKAPITA**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2008 - 2013**

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	PDRB per kapita ADHb	PDRB per kapita ADHk
2008	482.487	1,71	13.915.200,51	8.061.812,01
2009	490.408	1,64	15.318.175,90	9.232.096,24
2010	500.970	2,15	17.566.983,11	9.854.188,85
2011	511.235	2,05	19.518.618,97	10.284.955,27
2012	522.174	2,14	21.458.099,94	10.743.145,50
2013	529.320	1,37	24.079.668,00	11.317.951,00

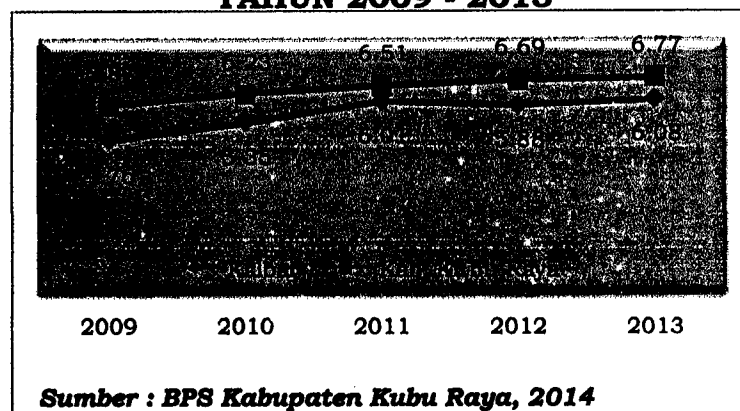
Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2014

### B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 tercatat sebesar 6,77%, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 6,69%. Sektor ekonomi yang memberikan andil terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu mencapai 15,69%, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 12,45%. Sedangkan Sektor Industri pengolahan dan sektor Pertanian sebagai penyumbang dominan dalam pembentukan PDRB pertumbuhannya cenderung menurun dan berada dibawah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

Berikut ditampilkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2013.

**Grafik 2.1**  
**GRAFIK LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN 2009 - 2013**



Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2014



Dari grafik 2.1 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Kubu Raya berada diatas rata-rata Propinsi Kalimantan Barat, sektor Industri pengolahan juga menjadi kontributor utama dalam struktur PDRB propinsi Kalimantan Barat. Hal ini memberikan peluang terhadap Kabupaten Kubu Raya untuk mengambil peran dalam peningkatan perekonomian tingkat regional di Kalimantan Barat dengan mengembangkan kinerja beberapa sektor yang terus mengalami peningkatan yaitu sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta mengoptimalkan kinerja sektor Industri Pengolahan dan Pertanian.

### C. Inflasi

Mengingat wilayah Kabupaten Kubu Raya berbatasan langsung dengan Kota Pontianak, maka pergerakan harga (inflasi) Kota Pontianak juga menjadi barometer tingkat kestabilan perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Pergerakan harga komoditi konsumsi di tingkat lokal relatif tidak mengkhawatirkan. Meski demikian, dalam dua tahun terakhir ini inflasi di Kabupaten Kubu Raya (acuan Kota Pontianak) menampakkan trend peningkatan. Inflasi di Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat sejak Tahun 2008 hingga Tahun 2012 disajikan pada tabel 2.9 berikut.

**Tabel 2.9**  
**Inflasi Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat**  
**Tahun 2007 - 2012**

Tahun	Kabupaten Kubu Raya		Inflasi Provinsi Kalimantan Barat (%)
	Indeks Harga Implisit	Inflasi (%)	
2008	157,02	8,60	11,19
2009	163,85	4,35	4,91
2010	178,27	8,80	5,85
2011	189,78	6,46	5,22
2012	199,74	6,62	6,19

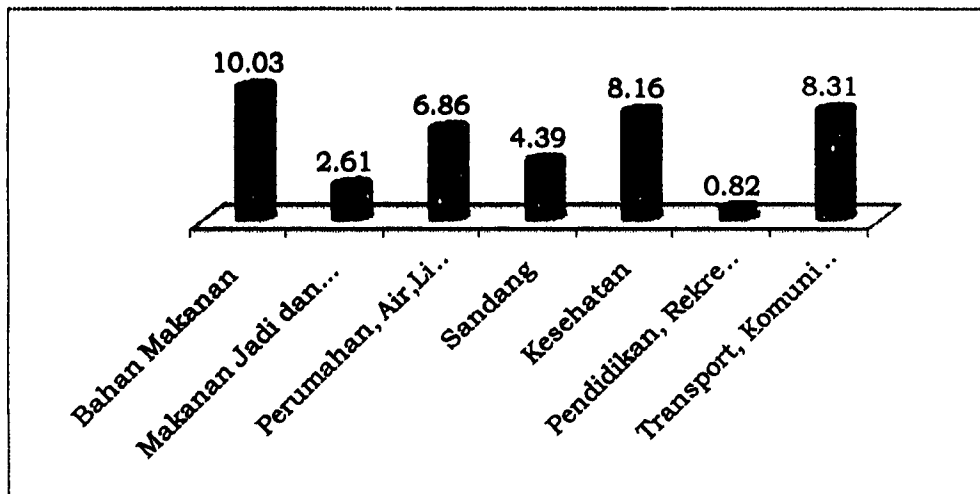
Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

Laju Inflasi Atas Dasar Harga Produsen Tahun 2012 sebesar 6,62% menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2011 yaitu sebesar 6,46%, dan sedikit di atas inflasi Kalbar yang sebesar 6,19%.





**Grafik 2.2**  
**TINGKAT INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012**



Sumber: BPS KKR, Kabupaten Kubu Raya dalam Angka 2013 (diolah)

Dilihat dari kelompok barang, inflasi tertinggi di Kabupaten Kubu Raya berada pada kelompok bahan makanan (10,03%), diikuti kelompok transportasi, komunikasi dan jasa (8,31%), serta kelompok kesehatan (8,16%).

### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap angka Indeks Pembangunan Manusia dan angka kemiskinan.

#### A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia mencakup indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita disesuaikan, dan angka usia harapan hidup. Berikut angka IPM Kabupaten Kubu Raya beserta indikatornya tahun 2009-2012.

**Tabel 2.10**  
**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN 2009 - 2012**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1.	Angka Melek Huruf (%)	86,15	88,25	88,30	89,07
2.	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6,36	6,57	6,68	7,11
3.	Pengeluaran per Kapita disesuaikan (ribu rupiah)	619,72	621,30	626,22	629,72
4.	Angka Harapan Hidup (tahun)	66,24	66,30	66,37	66,43



5.	<b>IPM</b>	<b>66,77</b>	<b>67,56</b>	<b>68,06</b>	<b>68,86</b>
6.	Peringkat IPM di Provinsi Kalimantan Barat	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kubu Raya berada dibawah rata-rata Propinsi Kalimantan Barat dengan menempati peringkat 11 dari 14 kabupaten/kota. Dengan pertumbuhan ekonomi yang diatas rata-rata propinsi, menunjukkan terjadi kesenjangan dalam pemerataan pembangunan khususnya dalam peningkatan sektor ekonomi dengan pembangunan peningkatan sumberdaya manusia. Hal ini bisa dipegaruhi rentang geografis Kabupaten Kubu Raya yang cukup luas dengan masih terdapatnya desa-desa tertinggal yang tersebar di beberapa kecamatan yang masih belum mempunyai infrastruktur wilayah yang memadai sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan dasar masyarakat terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Namun demikian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan setiap tahunnya, Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Kubu Raya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 sebesar 86,15%, tahun 2010 sebesar 88,25%, tahun 2011 sebesar 88,30%, dan pada tahun 2012 sebesar 89,07%, artinya bahwa di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2012 masih ada 10,97% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf.

Dilihat dari rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kubu Raya telah mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2009 masih ditingkat pendidikan dasar yang terlihat dari rata-rata lama sekolah yang hanya mencapai 6,36 tahun, pada tahun 2012 telah meningkat menjadi 7,11 tahun.

Pengeluaran perkapita, PDRB riil perkapita yang telah disesuaikan untuk menggambarkan daya beli masyarakat. Standar UNDP maksimal Rp. 737.720,- yang merupakan proyeksi dari daya beli tertinggi yang dicapai Jakarta pada tahun 2018 dengan asumsi tingkat pertumbuhan daya beli sebesar 6,5% per tahun selama periode 1993-2018. Pengeluaran per Kapita disesuaikan Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2010 menempati urutan 5 dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yaitu sebesar Rp. 621,30 (ribu) dan meningkat menjadi Rp. 629,72 (ribu) serta menempati urutan pertama di Kalimantan Barat.



Angka Harapan Hidup Kabupaten Kubu Raya juga terjadi peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2009 sebesar 66,24 tahun menjadi 66,43 tahun pada tahun 2012.

### **B. Kemiskinan**

Masalah kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan daerah. Dilihat dari perbandingan antara garis kemiskinan dan penduduk miskin Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2012, Kabupaten Kubu Raya menduduki posisi ke 6 (enam) dengan persentase sebesar 6,27% mengalami penurunan di banding Tahun 2011 dengan persentase sebesar 6,67%. Angka kemiskinan Kabupaten Kubu Raya masih berada dibawah rata-rata Propinsi Kalimantan Barat 8,48% dan Nasional 12,49%. Sedangkan angka pengangguran di Kabupaten Kubu Raya masih berada diatas rata-rata propinsi, menurut data BPS tahun 2012 angka pengangguran Kabupaten Kubu Raya menunjukkan angka 6,06% dan propinsi Kalimantan Barat 3,48%. Angka pengangguran ini merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan, kolapsnya industri perkayuan yang merupakan sektor dominan dua dekade terakhir turut mempengaruhi meningkatnya angka pengangguran di Kabupaten Kubu Raya.

Berikut Persentase Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya tahun 2009-2012.

**Tabel 2.11**  
**PERSENTASE KEMISKINAN KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN 2009 - 2012**

No	Indikator	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	490.410	500.970	511.240	522.174
2.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	37.090	35.900	33.730	31.900
3.	Persentase Kemiskinan (%)	7,56	7,14	6,67	6,27

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

### **2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Pembangunan kebudayaan terkait dengan penanaman nilai-nilai budaya, perlindungan dan pemeliharaan cagar budaya, pembinaan kesenian tradisional dan modern, serta menjalin kerjasama dengan berbagai daerah dan luar negeri.



Benda cagar budaya di Kabupaten Kubu Raya terdiri dari benda purbakala bergerak dan tidak bergerak. Jumlah benda cagar budaya lebih kurang sebanyak 17 objek, antara lain Makam Ismail Mundu, Makam Panglima Raja Kubu, Keraton Kubu, Pekong tengah Laut. Sedangkan tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Kubu Raya sekitar 59 objek, yang menyebar di beberapa kecamatan. Selain itu pembinaan dan pelestarian kebudayaan lokal seperti kegiatan robok-robok, dimana kegiatan dimaksud disamping melestarikan kekayaan budaya Kabupaten Kubu Raya, juga menjadi salah satu daya tarik wisata.

Di sektor kepemudaan, pembinaan generasi muda dilaksanakan melalui kegiatan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), penyelenggaraan aubade, penyelenggaraan upacara bendera, penyelenggaraan pemuda produktif, kegiatan pemuda pelopor.

Pembinaan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan Pekan Olahraga SD, penyelenggaraan Pekan Olahraga SMP, penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), kegiatan Porseni/O2SN/FLS2N SD/SMP/SMA/SMK, kegiatan POPDA SD/SMP/SMA / SMK.

Berikut perkembangan seni, budaya, dan olah raga di Kabupaten Kubu Raya tahun 2010 - 2014 dan menurut kecamatan tahun 2014.

**Tabel 2.12**  
**PERKEMBANGAN SENI, BUDAYA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2010 - 2014**

No.	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	1	19	49	40	1
2.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	-	-	-	-	-
3.	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	5	7	10	19	19
4.	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	38	40	45	50	50

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya, 2014



**Tabel 2.13**  
**PERKEMBANGAN SENI, BUDAYA DAN OLAH RAGA MENURUT**  
**KECAMATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014**

No.	Kecamatan	Jumlah grup kesenian	Jumlah gedung kesenian	Jumlah klub olahraga	Jumlah gedung olahraga
1.	Batu Ampar	1	-	-	1
2.	Terentang	-	-	-	1
3.	Kubu	4	-	-	2
4.	Teluk Pakedai	5	-	-	2
5.	Sungai Kakap	32	-	-	4
6.	Rasau Jaya	6	-	-	8
7.	Sungai Raya	43	-	19	30
8.	Sungai Ambawang	13	-	-	2
9.	Kuala Mandor B	6	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>110</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>50</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya, 2014

### 2.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

##### A. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam perumusan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi IPM suatu daerah maka menandakan semakin majunya suatu daerah. Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat antara lain melalui indikator angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM).

**Tabel 2.14**  
**KONDISI APK DAN APM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009 - 2013**

No	Indikator Pendidikan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	APK SD/MI (%)	117,04	115,24	115,22	115,71	112,94
	APM SD/MI (%)	71,78	83,09	94,54	97,12	98,45
2.	APK SMP/MTs (%)	80,86	82,89	85,92	89,04	90,89
	APM SMP/MI (%)	59,21	63,13	69,80	73,07	75,71
3.	APK SMA/MA/SMK (%)	35,25	71,72	73,42	73,99	79,80
	APM SMA/MA/SMK (%)	17,65	28,09	53,52	53,96	65,54

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, 2014



Dari angka APK dan APM di atas terlihat bahwa secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Kubu Raya meningkat dari tahun ke tahun. Namun terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil APK dan APM, yang artinya semakin tinggi jenjang pendidikan semakin banyak pula anak yang tidak meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut antara lain disebabkan karena ketidakmampuan secara ekonomi, terbatasnya akses ke sarana pendidikan di lingkungan terdekat. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya harus mengambil langkah kebijakan untuk menghasilkan program dan kegiatan yang mampu untuk meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

**a. Gambaran Pelayanan Taman Kanak-Kanak**

Pada tahun 2012 terdapat 84 Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah guru 366 Orang dan siswa sebanyak 2.705 orang, dengan Rasio guru terhadap jumlah murid sebesar 1:7, kondisi ini lebih baik dari tahun 2011 dengan angka rasio 1:10.

**Tabel 2.15**  
**BANYAKNYA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK), GURU DAN MURID**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Terhadap Murid
1.	Batu Ampar	1	3	36	12
2.	Terentang	2	6	37	6
3.	Kubu	5	14	174	12
4.	Teluk Pakedai	1	3	30	10
5.	Sungai Kakap	8	31	228	7
6.	Rasau Jaya	6	27	250	9
7.	Sungai Raya	34	218	1.428	7
8.	Sungai Ambawang	23	52	426	8
9.	Kuala Mandor B	4	12	96	8
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>366</b>	<b>2.705</b>	<b>7</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013



### b. Gambaran Pelayanan Pendidikan Dasar

Pada Tahun 2011 terdapat 501 sekolah dasar (SD) dengan jumlah murid 77.951 orang dan jumlah guru 3.367 orang, dengan demikian satu guru membina 23 Siswa. Pada Tahun 2012 terdapat 194 Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah murid 26.545 dan guru 901 orang.

**Tabel 2.16**  
**BANYAKNYA SEKOLAH DASAR (SD), GURU DAN MURID**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Terhadap Murid
1.	Batu Ampar	36	129	5.647	44
2.	Terentang	20	81	2.177	27
3.	Kubu	43	243	5.619	23
4.	Teluk Pakedai	28	121	2.995	25
5.	Sungai Kakap	71	614	13.616	22
6.	Rasau Jaya	22	198	3.589	18
7.	Sungai Raya	130	1.403	27.309	20
8.	Sungai Ambawang	103	378	12.084	14
9.	Kuala Mandor B	53	147	5.172	35
<b>Jumlah</b>		<b>506</b>	<b>3.314</b>	<b>78.207</b>	<b>24</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

**Tabel 2.17**  
**BANYAKNYA SEKOLAH MADRASAH IBTIDAIYAH, GURU DAN MURID**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Terhadap Murid
1.	Batu Ampar	3	22	513	23
2.	Terentang	22	25	84	3
3.	Kubu	3	19	362	19
4.	Teluk Pakedai	4	11	238	22
5.	Sungai Kakap	16	129	2.066	16
6.	Rasau Jaya	2	30	365	12
7.	Sungai Raya	44	358	5.425	15
8.	Sungai Ambawang	58	506	6.475	13
9.	Kuala Mandor B	27	215	2.476	12
<b>Jumlah</b>		<b>179</b>	<b>1.315</b>	<b>18.004</b>	<b>14</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013



**Tabel 2.18**  
**BANYAKNYA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), GURU DAN MURID**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Terhadap Murid
1.	Batu Ampar	13	42	1.173	24
2.	Terentang	6	32	463	13
3.	Kubu	13	55	1.566	42
4.	Teluk Pakedai	9	36	603	17
5.	Sungai Kakap	30	135	5.209	26
6.	Rasau Jaya	10	54	954	18
7.	Sungai Raya	61	375	10.881	40
8.	Sungai Ambawang	37	143	5.067	45
9.	Kuala Mandor B	15	34	829	11
<b>Jumlah</b>		<b>194</b>	<b>901</b>	<b>26.545</b>	<b>29</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

**Tabel 2.19**  
**BANYAKNYA SEKOLAH MADRASAH TSANAWIYAH, GURU DAN MURID**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Terhadap Murid
1.	Batu Ampar	4	52	525	10
2.	Terentang	-	-	-	-
3.	Kubu	3	42	388	9
4.	Teluk Pakedai	2	31	206	7
5.	Sungai Kakap	10	120	651	5
6.	Rasau Jaya	5	70	491	7
7.	Sungai Raya	22	259	2.144	8
8.	Sungai Ambawang	18	246	2.522	10
9.	Kuala Mandor B	12	91	699	8
<b>Jumlah</b>		<b>76</b>	<b>911</b>	<b>7.626</b>	<b>8</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

### c. Gambaran Pelayanan Pendidikan Menengah

Terdapat 3 jenis sekolah yang memberikan pelayanan Pendidikan Menengah di Kabupaten Kubu Raya yaitu Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah. Pada Tahun 2012 terdapat 70 SMU, 22 SMK dan 27 Madrasah Aliyah.





**Tabel 2.20**  
**BANYAKNYA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), GURU DAN MURID**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Terhadap Murid
1.	Batu Ampar	3	32	856	26
2.	Terentang	1	19	178	9
3.	Kubu	4	22	651	30
4.	Teluk Pakedai	3	26	389	15
5.	Sungai Kakap	9	53	1.861	35
6.	Rasau Jaya	4	39	1.314	34
7.	Sungai Raya	20	193	9.727	50
8.	Sungai Ambawang	20	93	3.304	36
9.	Kuala Mandor B	6	32	417	13
<b>Jumlah</b>		<b>70</b>	<b>539</b>	<b>18.697</b>	<b>38</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

**Tabel 2.21**  
**BANYAKNYA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), GURU DAN**  
**MURID KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Terhadap Murid
1.	Batu Ampar	2	23	378	16
2.	Terentang	-	-	-	-
3.	Kubu	1	8	27	3
4.	Teluk Pakedai	-	-	-	-
5.	Sungai Kakap	2	19	548	29
6.	Rasau Jaya	2	21	501	24
7.	Sungai Raya	9	62	1.644	26
8.	Sungai Ambawang	5	46	407	9
9.	Kuala Mandor B	1	9	17	2
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>188</b>	<b>3.522</b>	<b>19</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

**Tabel 2.22**  
**BANYAKNYA SEKOLAH MADRASAH ALIYAH, GURU DAN MURID**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Terhadap Murid
1.	Batu Ampar	1	13	30	2
2.	Terentang				
3.	Kubu	1	15	53	4



No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Terhadap Murid
4.	Teluk Pakedai	1	15	74	5
5.	Sungai Kakap	1	14	56	4
6.	Rasau Jaya	3	48	377	8
7.	Sungai Raya	8	127	704	6
8.	Sungai Ambawang	9	147	1.051	7
9.	Kuala Mandor B	3	35	133	4
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>414</b>	<b>2.478</b>	<b>6</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

## B. Kesehatan

Sasaran utama pembangunan kesehatan adalah untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Berikut ditampilkan kondisi dan status kesehatan penduduk Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 sampai Tahun 2013 dalam tabel 2.23 berikut ini:

**Tabel 2.23**  
**KONDISI DAN STATUS KESEHATAN PENDUDUK**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009 - 2013**

No	Tolak Ukur	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Angka kematian ibu/AKI (kasus)	8	16	11	16	5
2	Angka kematian bayi/AKB (kasus)	56	81	65	55	53
3	Gizi buruk (kasus)	13	21	23	18	18
4	Gizi Kurang (kasus)	1.440	885	835	648	205
5	Persalinan Nakes (%)	74,5	75,19	79,85	79,24	83,12
6	Imunisasi (%)	76,2	78,5	75,45	76,34	37,07
7	Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,24	66,30	66,37	66,43	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2014

Dari tabel 2.23 di atas terlihat terjadinya penurunan kasus Kematian Ibu dan Bayi pada tahun 2013. Perkembangan status gizi balita di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan perbaikan, kedepannya perlu ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat secara luas melalui gerakan sayang



ibu dan bayi serta kegiatan P4K. Persalinan dengan tenaga kesehatan sudah cukup tinggi, namun masih ada sebagian masyarakat mencari pertolongan persalinan pada dukun.

Indikator lain untuk menggambarkan perkembangan pembangunan kesehatan adalah sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan sudah cukup memadai. Berikut ditampilkan kondisi prasarana kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014.

**Tabel 2.24**  
**KONDISI PRASARANA KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN 2013**

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum (TNI)	2
2	Rumah Sakit Bersalin	1
3	Puskesmas Perawatan	10
4	Puskesmas Non-Perawatan	9
5	Puskesmas Keliling (Ambulance dan Pusling Air)	120
6	Puskesmas Pembantu	70
7	Rumah Bersalin	12
8	Klinik/Balai Pengobatan	10
9	Praktek Dokter Bersama	2
10	Praktek Dokter Perseorang	35
11	Pengobatan Tradisional	5
12	Polindes / Poskesdes	111
13	Posyandu	391
14	Apotek	17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2014

### C. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) 2015 sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Terkait dengan polusi Udara, Kabupaten Kubu Raya berpotensi menyumbang polusi udara sebagai akibat kebakaran lahan (*hot spot*). Dalam kaitannya dengan penanganan kebakaran lahan dan hutan dilakukan



sosialisasi kepada masyarakat di kecamatan dan perusahaan untuk mengelola lahan tanpa bakar (*zero burning*). Selain itu dilakukan pembaharuan data sebaran hotspot secara periodik, antisipasi secara dini berdasarkan *hotspot*, peningkatan kesiagaan posko dan patroli kebakaran hutan, dan penguatan kelembagaan pengendali kebakaran hutan.

Hingga saat ini upaya peningkatan dalam kapasitas penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana, pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan, fasilitasi penyusunan rencana kontijensi, serta peningkatan kapasitas dan pelaksanaan tanggap darurat yang efektif dan efisien.

Di sektor pengelolaan sampah dan limbah organik terpadu dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat serta sektor Informal dalam upaya pemisahan sampah dan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Kedepannya akan dibangun fasilitas tempat pengelolaan akhir (TPA) sampah regional di Kecamatan Sungai Ambawang, yang diharapkan dapat melayani kabupaten kota di sekitar Kabupaten Kubu Raya.

Dalam rangka memelihara ekosistem wilayah pesisir dan laut, guna menjaga kelestarian sumber daya ikan dan biota lainnya, pada tahun 2011 dilakukan rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil antara lain melalui pengelolaan kawasan konservasi perairan, pengembangan kerja sama pengelolaan ekosistem pesisir dan laut, dan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan dan peningkatan pengawasan kawasan konservasi perairan yang difasilitasi oleh pemerintah pusat.

#### **D. Pekerjaan Umum**

##### **a. Sumber Daya Air**

Pembangunan sumber daya air ditujukan pada pengendalian dan pengurangan dampak kerusakan akibat banjir, abrasi dan erosi pantai, terutama pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis dan pusat perekonomian. Pengembangan sarana irigasi sebetulnya cukup pesat terutama dalam pengembangan irigasi rawa. Total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya seluas 1.920 Ha, dimana sekitar 576 ha dalam kondisi rusak ringan dan 1.056 ha berada dalam kondisi rusak berat. Sementara Irigasi rawa sendiri seluas 124.400 ha,



dengan kondial rusak ringan seluas 37.320 ha dan rusak berat sekitar 68.420 ha. Permasalahan utama daerah rawa adalah tingginya sedimentasi pada saluran yang sudah dibangun sehingga menyebabkan tidak lancarnya aliran air, baik yang keluar maupun yang masuk ke sawah.

Pengembangan prasarana irigasi diarahkan terutama pada sentra-sentra produksi padi sawah Kabupaten Kubu Raya yang perlu diekstensifikasi. Prasarana irigasi di dataran rendah dan berawa, selain digunakan untuk menjamin kelangsungan kebutuhan air bagi pertanian juga difungsikan untuk mengeringkan kawasan-kawasan tertentu agar tidak terjadi genangan air atau banjir pada waktu musim hujan seperti di Kecamatan Sungai Kakap, Teluk Pakedai, Sungai Raya, Sungai Ambawang, Kuala Mandor B dan kota-kota kecamatan lainnya di wilayah pesisir.

**Tabel 2.25**  
**SARANA DAN PRASARANA SDA DI KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN 2013**

Jenis	Daerah Irigasi	Daerah Rawa (M')	Jumlah (M')	Kondisi Rusak
<b>BANGUNAN</b>				
- Bendungan	8	-	8	5 Unit
- Sadap	28	-	28	18 Unit
- Pintu air	-	186	186	113 Unit
- Pelengkap	20	35	55	31 Unit
- Kantor Pengamat	-	5	5	5 Unit
- Rumah Jaga	1	-	1	1 Unit
<b>SALURAN</b>				
- Primer	26,000	253,076	279,076	166,674 M'
- Sekunder	31,000	370,500	401,500	245,900 M'
- Tersier	71,000	1,072,031	1,143,031	695,819 M'
- Pembuang	31,000	139,520	170,520	106,312 M'
<b>LAIN-LAIN</b>				
- Saluran Pasangan	850	-	850	512 M'
- Tanggul Banjir	2,500	164,593	167,093	100,354 M'
- Jalan Inspeksi	51,500	11,600	63,100	37,747 M'

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya, 2014



Untuk pelayanan air bersih di Kabupaten Kubu Raya, belum sepenuhnya dapat dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sehingga kebutuhan air bersih masyarakat masih dilakukan dengan menampung air hujan, air tanah dan air permukaan lainnya. Berdasarkan data PDAM Tahun 2012, jumlah pelanggan di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 10.108 pelanggan, dengan jumlah air yang dapat didistribusikan sebanyak 97.957 m<sup>3</sup>.

Sebagian besar cakupan pelayanan PDAM terkonsentrasi di Kecamatan Sungai Raya. Kecilnya jangkauan pelayanan air bersih terhadap masyarakat yang di kelola PDAM selain karena faktor teknis dengan sulitnya mendapatkan air baku juga diakibatkan oleh jaringan distribusi air banyak dalam kondisi rusak.

Konsumsi air baku yang bersumber dari air hujan sebanyak 90,68%. Penggunaan air sungai sebagai sumber air utamanya mencapai 1,55%. Permasalahan konsumsi air utama yang bersumber dari sungai, sangat tergantung pada kondisi musim, dimana pada musim kemarau, infiltrasi air laut cukup tinggi, sehingga mempengaruhi kadar garam air baku.

**Tabel 2.26**  
**PERSENTASE RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KUBU RAYA**  
**MENURUT SUMBER UTAMA AIR MINUM**

<b>Sumber Utama Air Minum</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Air kemasan bermerek	1,88	3,49	1,42	1,55
Air isi ulang	1,90	4,75	5,71	6,72
Ledeng meteran	0,16	-	0,64	-
Sumur terlindungi	0,15	-	-	-
Sumur tidak terlindungi	0,47	-	-	-
Air Sungai	4,98	0,33	1,55	0,12
Air Hujan	90,46	91,43	90,68	91,61

Sumber :BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013



Berikut gambaran jumlah pelanggan dan volume air bersih yang disalurkan PDAM tahun 2012.

**Tabel 2.27**  
**DISTRIBUSI AIR BERSIH PDAM MENURUT JENIS PELANGGAN**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012**

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Volume (M <sup>3</sup> )
1	Hidran Umum/Sosial Umum	6	-
2	Rumah Ibadah/Sosial Khusus	34	149
3	WC Umum	1	-
4	Yayasan Sosial	11	644
5	Sekolah Negeri	11	4.434
6	Rumah Sakit	1	-
7	Rumah Permanen	9.152	78.576
8	Ruko Perdagangan	851	11.695
9	Instansi Pemerintah	19	680
10	Industri Besar	6	273
11	Niaga Besar	16	1.506

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

#### **b. Infrastruktur jalan**

Infrastruktur jalan merupakan sarana yang sangat vital bagi perkembangan daerah, selain sebagai sarana mobilitas penduduk juga digunakan untuk mengangkut hasil-hasil ekonomi di Kabupaten Kubu Raya. Status pengawasan jalan terbagi menjadi jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten.

Panjang jalan menurut jenis permukaan dan kondisi jalan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 sekitar 529,357 Km, dengan kondisi jalan sebagai berikut :



**Tabel 2.28**  
**PANJANG JALAN MENURUT JENIS PERMUKAAN DAN KONDISI JALAN**  
**DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009 - 2013**

No.	Keadaan	Panjang Jalan Tahun (Km)				
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>1.</b>	<b>Jenis Permukaan</b>					
	a. Aspal	197,260	224,163	233,263	211,493	189,723
	b. Kerikil	25,550	25,050	25,050	16,225	7,400
	c. Tanah	189,483	161,900	161,900	166,891	171,881
	d. Beton	47,020	88,750	88,750	124,552	160,353
	<b>Jumlah</b>	<b>459,313</b>	<b>499,863</b>	<b>508,963</b>	<b>519,161</b>	<b>529,357</b>
<b>2.</b>	<b>Kondisi Jalan</b>					
	a. Baik	46,400	77,986	99,927	145,938	170,377
	b. Sedang	56,100	83,850	74,670	56,760	64,024
	c. Rusak	110,000	107,184	89,119	55,449	23,892
	d. Rusak Berat	246,800	230,843	245,247	261,014	271,064
	<b>Jumlah</b>	<b>459,300</b>	<b>499,863</b>	<b>508,963</b>	<b>519,161</b>	<b>529,357</b>

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya, 2014

#### **E. Penataan Ruang**

Adapun cakupan pelayanan penataan ruang sendiri antara lain meliputi penyediaan informasi rencana tata ruang wilayah, peran serta masyarakat dalam proses penyusunan tata ruang, penerbitan izin pemanfaatan ruang, tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang, serta penyediaan ruang terbuka hijau.

Dalam rangka penyediaan informasi rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Kubu Raya, dilaksanakan melalui pembangunan basis data, sarana dan prasarana, dan peraturan penunjang. Peran serta masyarakat telah dilibatkan dalam penyusunan dokumen dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya melalui kegiatan konsultasi publik.

Disamping itu Kabupaten Kubu Raya telah membentuk Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi diantaranya untuk mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten, mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang, dan memfasilitasi





pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang.

Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Kubu Raya telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Kubu Raya telah pula disampaikan ke DPRD Kabupaten Kubu Raya untuk dibahas guna ditetapkan menjadi RTRW Kabupaten Kubu Raya.

#### F. Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda No 16 Tahun 2009 tentang RPJP Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, perencanaan jangka menengah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2009-2014. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasi target tahunan RPJMD. Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 2.29**  
**DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009 - 2014**  
**KABUPATEN KUBU RAYA**

Indikator	Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Kubu Raya, 2013



## G. Perumahan

Dalam rangka penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, Pada tahun 2012 Kabupaten Kubu Raya telah melakukan rehabilitasi pembangunan rumah tidak layak huni yang tersebar di beberapa kecamatan. Substansi inti perumahan rakyat meliputi penyediaan tempat tinggal dan lingkungan layak huni, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang meliputi pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas perumahan. Perbaikan rumah dilakukan dengan memberikan bantuan bahan-bahan untuk perbaikan kondisi fisik rumah kategori tidak layak huni. Upaya penanganan rumah tidak layak huni, diselenggarakan secara bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan sasaran utama kawasan kumuh. Terkait dengan hal itu, kawasan kumuh di Kabupaten Kubu Raya seluas 1.087,5 Km<sup>2</sup> atau sekitar 15,57% dari luas wilayah Kabupaten Kubu Raya. Berikut data penanganan rumah layak huni hingga tahun 2013 di Kabupaten Kubu Raya.

**Tabel 2.30**  
**PENANGANAN RUMAH LAYAK HUNI TAHUN 2009-2013**

Kecamatan	Desa	Sumber	
		APBD	Kemenpera
Terentang	Teluk Empening	-	17
	Permata	-	8
Teluk Pekedai	Teluk Pekedai Hulu	-	25
Sungai Raya	Kuala Dua	30	10
	Sungai Asam	-	35
	Kapur	33	58
	Mekar Baru	5	-
	Limbung	21	-
	Arang Limbung	20	-
	Tebang Kacang	5	10
	Teluk Kapuas	5	14
	Mekar Sari	4	10
	S.Ambangah	26	10
Sungai Kakap	S. Raya	27	-
	Sungai Raya Dalam	4	-
	Parit Baru	17	29
	Punggur kecil	20	31



Kecamatan	Desa	Sumber	
		APBD	Kemenpera
	Sepuk Laut	-	19
	S. Belidak	10	28
	S.Itik	8	27
	S. Kakap	39	20
	Sungai Kupah	8	-
	Jeruju Besar	15	28
	Kalimas	16	82
	Punggur Besar	12	21
	S. Rengas	28	39
	Pal IX	19	78
Sungai Ambawang	Lingga	-	33
	Pasak	-	62
	Simpang Kanan	-	118
	Puguk	-	78
	Bengkarek	-	82
	Korek	-	86
	Jawa Tengah	10	52
	S. Ambawang Kuala	31	137
	Mega Timur	27	190
	Durian	1	123
	Pasak Piang	-	97
	Ampera Raya	-	21
Rasau Jaya	R.Jaya Umum	27	23
	R.Jaya 1	28	-
	R.Jaya 2	10	-
	Bintang Mas	23	-
	Rasau Jaya 3	5	-
	Pematang 7	15	-
Kubu	Jangkang 2	6	-
	Pinang Dalam	5	51
Kuala Mandor B	Kuala Mandor A	6	-
	Kuala Mandor B	5	-
	Retok	2	-
	S.Enau	-	3
Batu Ampar	Padang Tikar 2	-	20



Kecamatan	Desa	Sumber	
		APBD	Kemenpera
	Padang Tikar 1	-	10
	Tasik Malaya	-	10
	Nipah Panjang	-	10
<b>TOTAL</b>		<b>465</b>	<b>772</b>

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya, 2014

## H. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Urusan kebudayaan terkait dengan penanaman nilai-nilai budaya, perlindungan dan pemeliharaan cagar budaya baik di daratan maupun di bawah air, pembinaan kesenian tradisional dan modern, menjalin kerjasama dengan berbagai daerah dan luar negeri.

Benda cagar budaya di Kabupaten Kubu Raya cukup banyak, yang terbagi dalam benda purbakala bergerak dan tidak bergerak. Jumlah benda cagar budaya di Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2011 sebanyak 17 unit antara lain Makam Ismail Mundu, Makam Panglima Raja Kubu, Keraton Kubu, Pekong Tengah Laut sedangkan tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Kubu Raya sekitar 59 yang menyebar di beberapa kecamatan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan tahun 2011 sebagai tahun kunjungan wisata baik bagi Wisatawan Mancanegara (Wisman) maupun Wisatawan Nusantara (Wisnus). Pada Tahun 2011 banyaknya wisatawan nusantara (wisnus) yang tercatat oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya sebanyak 54.120 orang mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu 93,32% dari tahun 2010 sebanyak 810.269, sedangkan perkembangan wisatawan mancanegara mengalami penurunan juga yaitu dari 13.346 orang pada Tahun 2010 menjadi 3.375 orang pada Tahun 2011 dengan penurunan sebesar 72,01%.

## I. Penanaman Modal/Investasi

Penanaman modal atau Investasi merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi prekonomian yang semakin membaik di tahun 2012 telah mendorong pulihnya sektor rill di Kabupaten Kubu Raya. Laju pertumbuhan ekonomi terus meningkat diikuti dengan perkembangan di berbagai sektor. Berbagai regulasi dan



kebijakan pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang pro investasi, telah mendorong minat masyarakat untuk melakukan ekspansi kegiatan usahanya ke Kabupaten Kubu Raya. Faktor ketersediaan lahan yang masih luas dan merupakan daerah *hinterland* yang berbatasan dengan Kota Pontianak, menjadikan Kabupaten Kubu Raya sebagai kawasan yang potensial untuk penanaman modal dan investasi. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur jalan Trans-Kalimantan yang melintasi wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagai penghubung antar kabupaten bahkan antar provinsi, serta masuknya wilayah Kecamatan sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Raya ke dalam pusat kegiatan nasional, menjadi daya tarik pelaku bisnis untuk berinvestasi di Kabupaten Kubu Raya. Potensi lokasi dan SDA yang dimiliki, menjadi keunggulan Kabupaten Kubu Raya dalam pengembangan dan pertumbuhan kota baru di masa mendatang.

Kesinambungan pertumbuhan ekonomi memerlukan adanya penanaman modal atau investasi. Investasi di Kabupaten Kubu Raya terbagi menjadi dua kelompok yaitu Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Nilai investasi baik PMDN maupun PMA di Kabupaten Kubu Raya mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Naik turun nilai investasi terkait dengan kondisi perekonomian baik pada skala internasional, nasional, regional maupun domestik. Pada tahun 2009 nilai investasi PMDN tercatat sebesar Rp. 1.141.577,91 dari target investasi sebesar Rp. 268.153,52. Tahun 2010 sebagai akibat himbas krisis, kinerja investasi menurun menjadi Rp. 941.448,43 dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 7.682 orang. Tahun 2011 sampai dengan 2013 ekonomi dunia menunjukkan kondisi membaik, sehingga kembali mendongkrak kinerja investasi pada tahun 2013 menjadi Rp. 3.053.817,67.

Untuk melihat perkembangan Penanaman Modal baik dari Dalam Negeri maupun Asing di Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada table 2.37 dan 2.38 sebagai berikut :



**Tabel 2.31**  
**JUMLAH PROYEK, REALISASI INVESTASI PMDN DAN PENYERAPAN**  
**TENAGA KERJA DI KABUPATEN KUBU RAYA (JUTA RUPIAH)**  
**TAHUN 2009 - 2013**

Tahun	Jumlah Proyek	Nilai Realisasi (Juta Rp)		Tenaga Kerja Terserap (Orang)	
		Rencana	Realisasi	WNI	Asing
2009	102	268.153,52	1.141.577,91	21,669	22
2010	90	419.746,24	941.448,43	7.682	7
2011	207	570.071,27	1.207.104,03	7.706	7
2012	214	1.521.383,15	876.149,08	7.392	14
2013	227	1.388.949,52	3.053.817,67	10.109	17

Sumber : LKPM, BPMPT 2010-2013 (ditolah)

**Tabel 2.32**  
**JUMAH PROYEK, REALISASI INVESTASI PMA DAN PENYERAPAN**  
**TENAGA KERJA DI KABUPATEN KUBU RAYA (JUTA RUPIAH)**  
**TAHUN 2009 - 2013**

Tahun	Jumlah Proyek	Nilai Realisasi (Juta Rp)		Tenaga Kerja Terserap (Orang)	
		(Juta Rp)	Ribu US\$	WNI	Asing
2009	7	268.153,52	28.600,00	3.544	74
2010	12	354.682,49	8.600,00	3.915	20
2011	13	1.580.413,60	1.060,00	5.344	13
2012	18	76.639,38	107.725,74	4.854	27
2013	18	1.304.245,51	24.483,59	2.683	47

Sumber : LKPM, BPMPT 2010-2013 (ditolah)

Kegiatan investasi diharapkan dapat menciptakan dan perluasan lapangan kerja bagi penduduk sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya. Kinerja investasi Kabupaten Kubu Raya (PMTB) secara umum cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2008 investasi/PMTB Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp. 1,85 Triliun, pada tahun 2009 sebesar Rp. 1,94 Triliun pada tahun 2010 sebesar Rp. 2,13 Triliun, pada tahun 2011 sebesar Rp. 2,60 Triliun dan pada tahun 2012 serta tahun 2013 terus meningkat menjadi sebesar Rp. 2,40 dan Rp. 2,41 Triliun. Peningkatan kinerja investasi Kabupaten Kubu Raya seiring dengan semakin membaiknya iklim investasi dan usaha maupun percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan investasi. Upaya untuk memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha yang diperlukan untuk



mendorong peningkatan investasi terus dilakukan dan telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan.

**Tabel 2.33**  
**PERBANDINGAN INVESTASI/PMTB DI KABUPATEN KUBU RAYA**  
**(JUTA RUPIAH)**

Tahun	Investasi (PMTB)			
	Harga Berlaku	Kontribusi Terhadap PDRB(%)	Harga Konstan	Kontribusi Terhadap PDRB(%)
2008	1.848.129,52	26,81	1.209.769,36	31,27
2009	1.943.274,54	25,52	1.263.585,42	32,22
2010	2.125.708,55	24,15	1.289.494,68	26,12
2011	2.597.147,73	26,03	1.319.797,90	25,10
2012	2.405.160,41	21,47	1.329.767,69	23,65
2013	2.408.634,88	18,90	1.334.296,46	22,27

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2014

Posisi daya saing investasi yang dicerminkan dari angka *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Tingkat efektivitas dan efisiensi investasi yang dianggap baik adalah diantara 3 hingga 4. Semakin tinggi ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam investasi. Pada tahun 2009 ICOR Kabupaten Kubu Raya tercatat sebesar 3,97 dan semakin menurun sebesar 3,15 di tahun 2010 dibandingkan ICOR tahun 2008 yang sebesar 4,11. Tahun 2011 angka ICOR Kubu Raya kembali menurun menjadi 3,46 begitu juga di tahun 2012 dan 2013 angka ICOR Kabupaten Kubu Raya menurun menjadi 3,37 dan 3,33. Dengan nilai ICOR sebesar 3,33 di tahun 2013, maka Kabupaten Kubu Raya masuk dalam kategori kabupaten yang semakin efisien dalam berinvestasi.



**Tabel 2.34**  
**NILAI INVESTASI DAN ICOR KABUPATEN KUBU RAYA**  
**DAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Investasi/ (Triliun)</b>	<b>ICOR Kalimantan Barat</b>	<b>ICOR Kabupaten Kubu Raya</b>
2009	1,94	5,67	3,97
2010	2,12	5,26	3,51
2011	2,60	4,47	3,46
2012	2,40	5,17	3,37
2013	2,40	4,71	3,33

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2014

Nilai Investasi di Kabupaten Kubu Raya pada tabel 2.41 terlihat terus meningkat secara signifikan dari 1,94 triliun rupiah pada tahun 2009 menjadi 2,60 triliun rupiah di tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah tujuan investasi yang terus berkembang. Untuk itu perlu memprioritaskan kebijakan yang mengarah pada iklim investasi yang kondusif dan disertai dengan perluasan kesempatan kerja serta didukung oleh peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas.

#### **J. Koperasi dan UMKM**

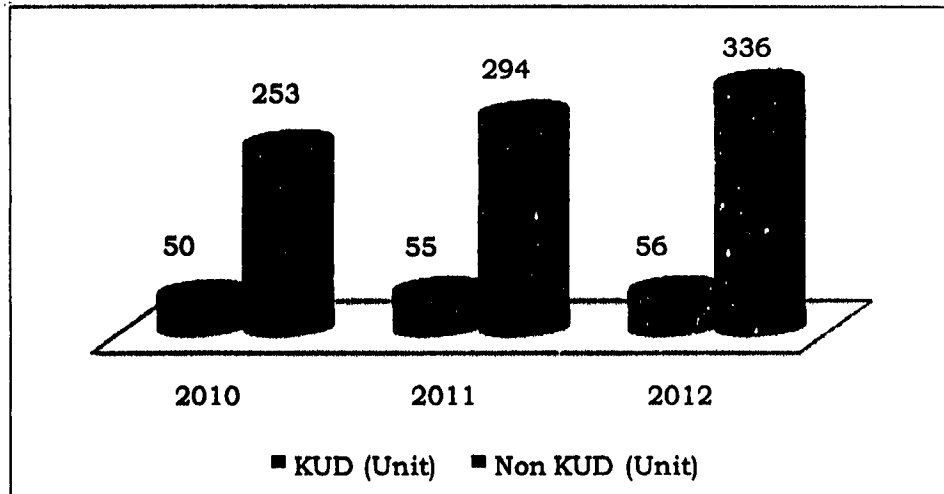
Aktivitas koperasi dan usaha mikro, kecil/menengah (UMKM) juga telah berkembang dan turut mendorong aktivitas perdagangan dan perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Selama ini, koperasi dan UMKM merupakan kekuatan riil dalam membangun kehidupan ekonomi masyarakat. Perkembangan koperasi dan UMKM merupakan hasil nyata dari komitmen pembangunan yang meletakkan ekonomi kerakyatan sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Sampai tahun 2012, di Kabupaten Kubu Raya terdapat 392 koperasi primer, yang terdiri dari 56 unit KUD dan 336 unit Non KUD. Dari jumlah tersebut, jenis koperasi yang paling banyak adalah koperasi Kredit Serba Usaha (KSU) berjumlah 226 unit (57,65%), sedangkan yang paling sedikit adalah jenis koperasi KOPANG, Kopermas dan Kopti yakni masing-masing sebanyak 1 unit (0,26%). Adapun jumlah anggota koperasi sampai tahun 2012 sebanyak 27.858 orang, yang terdiri dari anggota KUD sebanyak 5.162 orang (18,53%) sedangkan koperasi Non KUD sebanyak 22.696 orang (81,47%).





Selanjutnya, keberadaan UMKM formal maupun non formal di Kabupaten Kubu Raya juga menunjukkan perkembangan yang cukup memadai. Sesuai dengan lingkup usahanya, saat ini tercatat sebanyak 133 UMKM unggulan daerah, yang sebagian besar bergerak dibidang usaha makanan dan minuman serta kerajinan rumah tangga. Berkembangnya kegiatan UMKM formal maupun berbagai usaha masyarakat lainnya tentunya tidak terlepas dari dukungan perbankan dan lembaga keuangan mikro (*micro finance*) yang sudah beroperasi di daerah ini.



Sumber: BPS KKR, Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2013 (diolah)

Grafik 2.3

**PERKEMBANGAN KOPERASI PRIMER DI KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 - 2012**

**K. Kependudukan dan Catatan sipil**

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kubu Raya, penyebaran penduduk di Kabupaten Kubu Raya belum merata. Dari 9 Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu 217 jiwa per Km<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Sungai Raya 207 jiwa per Km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Terentang memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 13 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Terkait dengan pelayanan kependudukan (KTP) dari jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya yang wajib KTP sebanyak 373.740 jiwa, sebanyak 171.358 jiwa (45,8%) telah memiliki KTP. Sedangkan kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2012 mencapai 40,48 per 1000 penduduk, dimana jumlah penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran sebanyak 202.794 jiwa. Saat ini, Kabupaten Kubu Raya juga telah melaksanakan



penerapan KTP Nasional berbasis NIK dengan sistem SIAK Online dan Program Nasional E-KTP.

Terkait dengan hal itu, kendala pelayanan pendaftaran penduduk yang online SIAK dengan pelayanan di Kantor Kecamatan adalah baru di 3 (tiga) kecamatan, Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap dan Sungai Ambawang, sedangkan untuk Kecamatan Batu Ampar, Kubu, Terentang, Kuala Mandor B, Teluk Pakedai dan Rasau Jaya kegiatan pelayanan masih dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya disebabkan masih terbatasnya ketersediaan jaringan komunikasi online.

#### **L. Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial.

Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 6,95% dibandingkan tahun 2010, dari 237.118 orang menjadi 253.598 orang. Sedangkan jumlah pengangguran pada tahun 2011 mengalami penurunan dari 14.713 orang di tahun 2010 menjadi 11.468. Namun pada tahun 2012 angkatan kerja mengalami penurunan sedangkan angka pengangguran mengalami peningkatan dari tahun 2011. Berikut gambaran ketenagakerjaan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2009-2012 .



**Tabel 2.35**  
**GAMBARAN KONDISI KETENAGAKERJAAN**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009 - 2012**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1	Angkatan Kerja (jiwa)	237.108	237.118	253.598	227.891
2	Pengangguran (jiwa)	17.220	14.713	11.468	13.808
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,20	6,20	4,52	6,06
4	Penduduk yang bekerja (jiwa)	221.888	222.405	242.130	214.083
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,89	69,57	73,26	66,17

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

Pada tahun 2012 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat signifikan dari 4,52% menjadi 6,06% (jauh di atas rata-rata Kalbar yang TPT-nya sebesar 3,48). Selain itu, indikator yang terpenting dalam ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu rasio dalam persen antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (penduduk berumur 15 tahun ke atas). Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2011 sebesar 73,26 % mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 66,17%.

Masalah dalam bidang ketenagakerjaan adalah rendahnya pendidikan para pencari kerja (rata-rata lulus SD/sederajat), keterampilan relatif terbatas sehingga tidak dapat bersaing dalam pasar kerja industri. Penting untuk dicermati peningkatan jumlah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel 2.36**  
**ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA DAN MENGANGGUR BERDASARKAN**  
**TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2011 - 2012**

No	Uraian	2011		2012		Perubahan	
		Bekerja	Menganggur	Bekerja	Menganggur	Bekerja	Menganggur
1	< SD	137,160	1,853	118,009	4,331	-19,151	2,478
2	SMP	39,203	3,608	35,079	3,137	-4,124	-471
3	SMU	54,900	5,312	47,563	5,285	-7,337	-27
4	DIII	4,095	505	5,508	287	1,413	-218
5	PT	6,772	190	7,924	768	1,152	578
<b>JUMLAH</b>		<b>242,130</b>	<b>11,468</b>	<b>214,083</b>	<b>13,808</b>	<b>-28,047</b>	<b>2,340</b>

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya, Agustus 2012



Tabel diatas menunjukkan penambahan yang signifikan jumlah pengangguran pada angkatan kerja berpendidikan <SD dan Perguruan Tinggi (PT). Pertambahan pengangguran berpendidikan <SD sebanyak 625 jiwa diduga sebagai akibat tutupnya industri kayu di KKR. Sementara itu, lonjakan pengangguran sebesar 200% (dua kali lipat), selain karena berkurangnya sektor industri manufaktur dan moratorium PNS, juga (diduga) karena ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan.

Sebagian besar angkatan kerja, pada tahun 2012 bekerja di sektor pertanian yaitu sebanyak 101.004 orang, pada usaha industri 14.643 orang, konstruksi 19.865 orang, perdagangan sebanyak 41.520 orang, transportasi 6.273 orang, lembaga keuangan 2.696, jasa kemasyarakatan 27.356 orang.

Salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yakni melalui pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi mencakup penyediaan lahan tinggal dan usaha yang disertifikasi, pembuatan Rumah Transmigran, fasilitasi perpindahan keluarga transmigran dari daerah asal ke daerah tujuan. Penempatan warga Transmigrasi di Kabupaten Kubu Raya telah dituangkan dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Pada tahun 2011 jumlah areal yang diperuntukan untuk transmigrasi sudah mencapai 132.257 Ha dengan daya tampung warga transmigran 2.594 KK. Terkait dengan upaya solidaritas penanganan musibah erupsi merapi, Kabupaten Kubu Raya sudah menyiapkan lahan cadangan transmigrasi terpadu di Kecamatan Batu Ampar seluas 16.740 Ha. Lokasi pencadangan transmigrasi baru di Batu Ampar dengan luas 6.775 Ha dipersiapkan untuk menampung 1.355 KK yang terbagi meliputi 4 Satuan Pemukiman (SP). Pada lokasi Padu Empat dengan luas 5.145 Ha direncanakan menampung sekitar 1.029 KK yang terbagi atas 3 SP dan lokasi Cabang Ruan seluas 4.840 Ha direncanakan menampung 968 KK yang terbagi menjadi 3 SP. Untuk mendukung rencana tersebut, pencapaian pada tahun 2011 yang sudah dilaksanakan antara lain peningkatan jalan arteri primer Batu Ampar – Sei Kerawang, peningkatan jalan poros SP-1 Padang Tikar L-3m (Sub Kaw. Sei Kerawang), peningkatan jalan Poros SP-2 Padang Tikar L-3m (Sub. Kaw. Sei Kerawang), penyusunan Rencana Teknis Unit Pemukiman Transmigrasi (RTUPT), peningkatan Dermaga Kayu Cabang Ruan, rehabilitasi dan penambahan Kelas SD



Swasta Cabang Ruan, rehabilitasi Gedung SD Padang Tikar SP-1, rehabilitasi Gedung SD Padang Tikar SP-2.

### M. Ketahanan Pangan

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi dan imbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Pada tahun 2012 jumlah produksi tanaman padi sebesar 205.000 ton dengan rincian padi sawah sebanyak 203.523 ton dan padi ladang 1.478 ton; turun sebesar 0,92% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan luas panen dari 60.694 ha menjadi 60.032 ha atau turun sebesar 1,10%. Hasil produksi jagung pada tahun 2012 sebesar 20.785 ton, ubi kayu sebesar 8.588 ton; ubi jalar sebesar 1.315 ton, kacang tanah sebesar 72 ton, kacang kedelai 36 ton, dan kacang hijau sebesar 8 ton.

Dalam upaya mempertahankan stok pangan di daerah, kendala utama yang dihadapi adalah semakin meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, terutama untuk kegiatan industri perkebunan skala besar. Penyusutan lahan pertanian tersebut diperkirakan akan terus terjadi sejalan dengan meningkatnya pembangunan. Guna mempertahankan luas areal pertanian diantaranya dilakukan melalui penetapan lahan-lahan pertanian abadi dalam bentuk *food estate* dan *rice estate*. Berikut kawasan khusus yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

**Tabel 2.37**  
**KAWASAN KHUSUS PENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN AGRIBISNIS TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012**

Kawasan	Lokasi	Luas Areal (Ha)
Rice Estate	Kuala Mandor B	100
Kakap Bangkit Food Estate	Sungai Kakap	2.000
	Padu Empat	5.000
	Kecamatan Batu Ampar	



Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Kecamatan Rasau Jaya Kecamatan Sungai Raya Kecamatan Teluk Pakedai Kecamatan Kubu	97.710 (terdiri dari 24 UPT / 14.301 KK dan 15 Desa / 4.500 KK)
----------------------------	--	---

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya, 2012

#### N. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG dan IDG salah satunya dapat dilihat dari Ratio Angka Partisipasi Murni (APM) anak perempuan terhadap anak laki-laki pada setiap jenjang pendidikan.

**Tabel 2.38**  
**RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) ANAK PEREMPUAN**  
**TERHADAP ANAK LAKI-LAKI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012**

No	Angka Partisipasi Murni (APM)	2012		
		L	P	Rasio (%)
1.	Kelompok Umur 7-12 tahun (SD)	94,47	95,49	101,08
2.	Kelompok Umur 13-15 tahun (SLTP)	67,14	78,31	116,66
3.	Kelompok Umur 16-18 tahun (SLTA)	44,76	55,56	124,13

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

Di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2012 nilai ratio pada jenjang SD sebesar 101,08%, pada jenjang SLTP sebesar 116,66%, dan pada jenjang SLTA sebesar 124,13%. Angka-angka tersebut sudah melampaui Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015 sebesar 100%.

Selain itu Pemberdayaan perempuan yang tercermin dalam kesetaraan gender semakin dirasakan kontribusinya dalam proses pembangunan. Dari 1.743 PNS yang terserap di seluruh instansi Pemerintah Daerah, 30% di antaranya adalah perempuan. Di BUMN/BUMD ada 44 perempuan dari 226 pegawai/karyawan. Di legislatif, di antara 45 anggota



DPRD Kabupaten Kubu Raya, ada 2 (dua) perempuan. Hasil SAKERNAS 2012 menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan hampir sama dengan TPAK Laki-laki, yakni di kisaran 96%.

Kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) ber-KB di KKR semakin meningkat. Ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya peserta KB aktif. Hingga tahun 2012, peserta KB aktif tercatat sebanyak 61.686 PUS, bertambah 9,7% dibanding tahun 2011. Penambahan peserta KB aktif dikarenakan adanya penambahan akseptor KB baru dari 18.661 PUS tahun 2011 menjadi 26.915 PUS tahun 2012. Sayangnya, penambahan peserta KB aktif dan KB baru tidak diikuti peningkatan peran kaum pria. Jenis kontrasepsi MOP sebanyak 337 (0,55%) atau tidak sampai 1 (satu) persen. Jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh akseptor baik peserta KB aktif maupun peserta KB baru adalah jenis suntikan (28.814 PUS atau 46,7%).

Berikut ditampilkan Realisasi Peserta KB Baru Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebagai berikut :

**Tabel 2.39**  
**REALISASI PESERTA KB BARU KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN 2013**

No	Uraian	PPM	IUD	MOW	MOP	KDM	IMPL	STK	PIL	Total	%
1.	Sungai Raya	8.849	1.721	211	59	761	1.566	5.091	4.054	13.463	152,14
2.	Kuala Mandor B	1.312	152	0	0	27	209	499	175	1.062	80,95
3.	Sungai Ambawang	1.519	153	0	14	165	241	1.430	698	2.701	177,81
4.	Terentang	853	235	1	2	73	459	842	270	1.882	220,63
5.	Batu Ampar	1.770	488	0	29	198	625	741	371	2.452	138,53
6.	Kubu	1.917	233	1	2	72	461	920	297	1.986	103,60
7.	Rantau Jaya	1.150	149	0	26	0	206	1.027	366	1.744	151,65
8.	Teluk Pakedal	770	155	0	17	28	210	371	64	845	109,74
9.	Sungai Kakap	2.065	502	1	438	332	505	2.413	1.520	5.711	276,56
	JUMLAH	20.205	3.788	214	587	1.656	4.482	13.334	7.785	31.846	157,61

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kubu Raya, 2014

## O. Perhubungan

Pembangunan infrastruktur di sektor transportasi merupakan bagian integral dari pembangunan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Sektor transportasi juga mempunyai peran yang penting dalam



memperkokoh persatuan dan ke satuan bangsa serta diyakini sebagai pendorong pembangunan suatu kawasan. Guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, maka fungsi pelayanan umum transportasi harus ditujukan melalui penyediaan jasa transportasi, melayani kebutuhan masyarakat luas serta untuk kelancaran mobilitas distribusi barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi wilayah sekitarnya. Fungsi pembangunan infrastruktur transportasi tidak sebatas mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan, tetapi dapat memperlancar kegiatan perdagangan dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah.

Di bidang transportasi darat, dalam rangka mengembangkan keterkaitan antar wilayah, pemerintah telah melaksanakan program pembangunan jalan trans kalimantan. Terkait dengan hal itu, untuk mendukung program transportasi nasional tersebut, dibangun terminal yang berfungsi sebagai sarana transportasi antarmoda yang terintegrasi (*domestic connectivity*). Pembangunan Terminal Tipe A (antar provinsi) dan sekaligus berfungsi sebagai terminal antar lintas batas negara (ALBN) saat ini sudah dalam proses untuk segera dapat difungsikan. Berikut terminal-terminal yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya.

**Tabel 2.40**  
**JUMLAH TERMINAL DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013**

Terminal	Lokasi	Tipe	Luas Terminal (m <sup>2</sup> )	Daya Tampung (kendaraan)
Sungai Ambawang	Kecamatan Sungai Ambawang	A		
Sungai Durian	Kecamatan Sungai Raya	B	3.500	50
Sungai kakap	Kecamatan Sungai Kakap	B	888	30
Rasau Jaya	Kecamatan Rasau Jaya	B	5.625	100
KORPRI	Kecamatan Sungai Raya/Jeruju Besar	C	1.032	20

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, 2014

Perkembangan trayek angkutan di Kabupaten Kubu Raya, kurang mengalami perkembangan bahkan cenderung menurun. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah pemakaian kendaraan pribadi (roda dua). Pada jenis armada publik seperti Oplet pada tahun 2011 tercatat berjumlah





205 unit, meningkat 5 kendaraan dari tahun 2010. Sementara jenis armada angkutan publik taxi, terjadi penurunan jumlah kendaraan, pada tahun 2009 berjumlah 102 unit, pada tahun 2010 menurun menjadi 93 unit, dan kembali menurun menjadi 67 unit kendaraan pada tahun 2011. Sementara untuk jenis angkutan barang semakin meningkat, sebagai akibat meningkatnya aktivitas bongkar muat dan pergudangan di kawasan Sungai Raya dan sekitarnya. Pada tahun 2011 jumlah armada angkutan barang sebanyak 895 unit kendaraan, meningkat dari tahun 2009 dan tahun 2010, masing-masing sebanyak 565 kendaraan dan 797 kendaraan. Untuk pelayanan transportasi di wilayah terpencil dan pedalaman masih menggunakan moda transportasi air. Berikut Alat Angkutan Pedalaman/Transportasi Air Dirinci Menurut Jenisnya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2013.

**Tabel 2.41**  
**BANYAKNYA ALAT ANGKUTAN PEDALAMAN/TRANSPORTASI AIR**  
**DIRINCI MENURUT JENISNYA DI KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN 2011 - 2013**

No.	Jenis Angkutan	2011	2012	2013
1	Motor Boat	62	74	85
2	Tongkang Gandeng	-	-	-
3	Long Boat	32	34	37
4	Speed Boat	14	16	19
5	Ferry Boat	5	6	7

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, 2014

Pada saat ini terdapat 3 lintasan penyeberangan di Kabupaten Kubu Raya, yaitu Lintasan Antar Kabupaten : Rasau Jaya (Kabupaten Kubu Raya) - Teluk Batang (Kabupaten Ketapang), sedangkan Lintasan Dalam Kabupaten : Rasau Jaya - Pinang Baru dan Parit Sarem-Sungai Nipah. Pada lintasan Rasau Jaya - Teluk Batang merupakan lintasan antar kab/kota yang menghubungkan Kabupaten Ketapang, Kayong Utara ke Kabupaten Kubu Raya/Kota Pontianak. Pada Jalur ini ASDP (persero) telah mengoperasikan KMP. Gunung Palong, KMP. Semah, KMP/ Primas dan CV. Kapuas Kubu Raya (Swasta Murni) mengoperasikan Ltc. Honda I dan Ltc. Honda II dengan kapasitas angkut rata-rata 50 orang penumpang dan 12 unit kendaraan roda empat dengan waktu tempuh  $\pm$  12 jam.

Penyeberangan Parit Sarem - Sungai Nipah, merupakan penghubung antara Parit Sarem (Kecamatan Sungai Kakap) ke Sungai Nipah



(Kecamatan Teluk Pakedai). Guna melayani jasa penyeberangan di lintasan ini PT. ASDP (Persero) telah mengoperasikan "KMP. Merawan I" yang mampu mengangkut 50 penumpang dan 4 unit kendaraan roda empat. Berikut Lokasi, Jenis Dermaga beserta Fasilitas yang dimiliki Dermaga Penyeberangan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.

**Tabel 2.42**  
**LOKASI, JENIS DERMAGA BESERTA FASILITAS YANG DIMILIKI**  
**DERMAGA KAPAL PENYEBERANGAN DI KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN 2013**

No.	Lokasi Dermaga	Jenis Dermaga	Tahun pembuatan	Uraian fasilitas	Luas m <sup>2</sup>	Kondisi
1.	Penyeberangan Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya	Dermaga Mobile Bridge (MB)	1991/1992	Dermaga	144	Baik
				Gedung Operasional	300	
				Mobile Bridge (MB)	56	
				Trestel	91	
				Jembatan Dermaga	180	
				Ruang Hidrolik	16	
				Lap. Parkir	1000	
2.	Penyeberangan Pinang Baru (Kec. Kubu)	Pelengsengan	2005/2008	Trestle	91	
				Dermaga	172	
				Areal Pelabuhan	4500	
				Jalan Masuk Dermaga	800	
				Lapangan Parkir	340	
				Gedung Kantor	127	
				Pos Operasional	24	
3.	Penyeberangan Parit Sarem (Kec. Teluk Pakedai)	Dermaga Ponton	2003/2004	Dermaga Ponton	172	Baik
				Areal Pelabuhan	4500	
				Jalan Masuk Dermaga	804	
				Lapangan Parkir	340	
				Gedung Kantor	127	



				Pos Operasional	24	
4.	Penyeberangan Sungai Nipah, Kecamatan Teluk Pakedai	Dermaga Ponton	2005/2006	Dermaga Ponton	172	Baik
				Areal Pelabuhan	4000	
				Jalan Masuk Dermaga	1000	
				Lapangan Parkir	400	
				Gedung Kantor	127	
				Pos Operasional	24	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, 2014

**Tabel 2.43**  
**JUMLAH DERMAGA/STEIGHER ANGKUTAN SUNGAI**  
**DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2008 - 2013**

NO	KECAMATAN	STEIGHER						JUMLAH	KETERANGAN
		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	Sungai Raya	-	4	3	2	10	9	28	APBD KKR
		2	-	-	-	-	-	2	EX Kanwil X/Hibah Kab. Ptk
2	Rasau Jaya	-	1	-	1	2	2	6	APBD KKR
		2	-	-	-	-	-	2	EX Kanwil X/Hibah Kab. Ptk
3	Sungai Kakap	-	-	2	2	2	3	9	APBD KKR
		1	-	-	-	-	-	1	EX Kanwil X/Hibah Kab. Ptk
4	Teluk Pakedai	-	1	3	-	2	3	9	APBD KKR
		-	-	-	-	-	-	-	
5	Batu Ampar	-	1	-	1	6	3	11	APBD KKR
		-	-	-	-	-	-	-	
6	Kubu	-	2	1	4	8	4	19	APBD KKR
		1	-	-	-	-	-	1	EX Kanwil X/Hibah Kab. Ptk
7	Ambawang	-	1	1	2	6	4	14	APBD KKR
		-	-	-	-	-	-	-	
8	Terentang	-	1	3	1	5	1	11	APBD KKR
		-	-	-	-	-	-	-	
9	Kuala Mandor B	-	-	-	3	5	5	13	APBD KKR
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>46</b>	<b>34</b>	<b>126</b>	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, 2014

Selain itu dalam tatanan kepelabuhan nasional, Pelabuhan Teluk Air telah ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul, yang dipersiapkan menjadi salah satu pelabuhan masuk ke Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mendukung hal tersebut, saat ini sudah tersedia DED (Detail Enginer Desain) pembangunan pelabuhan laut Teluk Air. Kedepannya, pelabuhan laut yang akan dikembangkan yaitu Pelabuhan Laut Tanjung Intan di Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap dan Pelabuhan Laut Terpadu Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar



Pada sektor transportasi udara, keberadaan bandara memiliki nilai strategis bagi upaya pengembangan perekonomian di Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat. Pencapaian di sektor ini pada tahun 2011 adalah : (1) Perluasan dan pengembangan bandara Supadio, (2) Perluasan landasan pacu. Selain itu kedepannya Bandara Supadio akan dikembangkan menjadi Bandara Internasional, sehingga diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya.

#### **P. Komunikasi dan Informatika**

Pelayanan dibidang jasa pos di Kabupaten Kubu Raya dilayani oleh 8 Kantor Pos, yang terdiri dari 6 (satu) kantor Pos Pembantu dan 2 Kantor Pos tambahan. Pelayanan kantor pos meliputi jasa pengiriman surat, paket dan tempat pembayaran berbagai tagihan. Penggunaan jasa pos di Kabupaten Kubu Raya untuk pengiriman uang dengan wesel pos sebanyak 586 kali dan penerimaan uang dengan wesel pos sebanyak 17.271 kali.

Telekomunikasi dewasa ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia. Alat komunikasi yang banyak dipakai di Kabupaten Kubu Raya adalah telepon genggam atau *hand phone* (HP). Hampir semua wilayah di Kabupaten Kubu Raya dapat terlayani dengan jaringan sinyal HP yang dikelola oleh berbagai operator.

Adapun pencapaian pembangunan pos dan telematika pada tahun 2011 antara lain selesainya RUTR telekomunikasi, yang mengatur titik-titik pembangunan tower komunikasi melalui pengembangan transmisi swasta, pelayanan internet kecamatan dan dibangunnya beberapa tower transmisi pada daerah-daerah yang terisolir, melalui kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi negara (PT. Telkom).

Media cetak yang beredar di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2011 berdasarkan lokasi penerbitannya berjumlah 28 buah, 4 penerbit ada di Kabupaten Kubu Raya, 5 Penerbit berada di luar Kabupaten Kubu Raya, 19 penerbit di luar provinsi Kalimantan Barat. Dari 28 media cetak yang beredar di Kabupaten Kubu Raya, 8 diantaranya adalah surat kabar, 7 berupa tabloid, 10 berupa majalah dan 2 berupa buletin dan 1 lain-lain.

Sedangkan untuk media elektronik dan hiburan pada tahun 2011 sebanyak 59 buah, Stasiun radio 3, Warnet 50, Web site 6.



## **Q. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dengan terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan pementapan ideologi bagi seluruh komponen masyarakat.

Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman keamanan dan ketertiban Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga meningkatkan jalinan hubungan dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres. Disamping itu untuk mengantisipasi kerawanan sosial politik maka dilakukan pembinaan dan monitoring yang terkait dengan kegiatan politik daerah.

Sementara angka kriminal meningkat dari tahun sebelumnya. Namun berbagai pendekatan dan pembinaan untuk menekan angka kriminal di Kabupaten Kubu Raya dijalankan melalui kerjasama dengan seluruh element di Kabupaten dan Kecamatan. Selain itu, komunikasi antar Muspida dalam rangka stabilitas politik dan keamanan, tetap dibangun melalui Rapat Koordinasi Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda), Forum Komunikasi Daerah (Forkomda), Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) se Kabupaten Kubu Raya, dan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Kubu Raya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 244 Tahun 2009 tentang Kominda Kabupaten Kubu Raya.

## **R. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian**

Standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan yang memuaskan, aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional, serta sistem yang lebih komprehensif merupakan faktor penting dalam upaya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kabupaten Kubu Raya sebagai Kabupaten termuda di Kalimantan Barat selalu berusaha meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yaitu transparan, kompeten, pertanggungjawaban, efektif dan efisien, responsif, berkeadilan, partisipasi, penegakan hukum, kesamaan, mengedepankan musyawarah dan bervisi untuk menuju Kabupaten Kubu



Raya Terdepan dan Berkualitas. Upaya meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi telah dilaksanakan secara intensif melalui pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan, reformasi birokrasi.

Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, Persandian, antara lain adalah penyusunan produk Peraturan Daerah melalui Program penataan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan padu serasi peraturan sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum di masyarakat.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Kubu Raya dan mengurangi pelanggaran dan penyimpangan hukum telah dilakukan upaya preventif berupa penyuluhan dan sosialisasi produk hukum daerah terhadap masyarakat. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) selain itu berbagai kegiatan juga sudah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna menegakkan Peraturan Daerah dan mengurangi penyakit masyarakat dan mengamankan segala bentuk gangguan ketertiban umum untuk menciptakan keamanan dan ketentraman masyarakat. Kegiatan nyata yang telah dilaksanakan Satpol PP antara lain penertiban pedagang kaki lima, razia tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat yang menimbulkan penyakit masyarakat, pengamanan demo, serta razia tempat usaha yang tidak memiliki izin.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan upaya pembinaan dan pencegahan pelanggaran secara intensif. Disamping itu dilakukan upaya mensinergikan antara pengawasan fungsional dengan pengawasan masyarakat. Peningkatan upaya pengawasan dan pembinaan pada masing-masing SKPD pada aspek tupoksi, pengelolaan keuangan, dan pendapatan, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara identifikasi, preventif, konsultatif dan solutif. Pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan langsung pada saat pemeriksaan maupun konsultasi aktif ke Inspektorat, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelembagaan pemerintahan daerah atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah KKR berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2009 terdiri dari



Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 15 Dinas, 11 Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Staf Ahli, Kecamatan, dan Kelurahan.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah KKR Tahun 2012, seluruh PNS KKR sampai dengan tahun 2013 berjumlah 8.042 orang, yang terdiri dari 4.579 orang laki-laki dan 3.463 orang perempuan. Dilihat dari golongan kepangkatannya, maka Golongan I sebanyak 103 orang, Golongan II sebanyak 2.181 orang, Golongan III sebanyak 3.589 orang, dan Golongan IV sebanyak 2.169 orang.

Sedangkan jumlah pejabat struktural untuk eselon II berjumlah 26 orang, eselon III berjumlah 151 orang, eselon IV berjumlah 395. Dari 8.042 orang pegawai negeri sipil tersebut jika dilihat dari tingkat pendidikan, 1,82 persen dari pegawai tersebut berpendidikan SD; 1,94 persen berpendidikan SMP; 36,23 persen berpendidikan SLTA; 29,77 persen berpendidikan Diploma I/II dan 30,24 persen berpendidikan Diploma III ke atas.

Dalam peningkatan kapasitas aparatur telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah, pendidikan dan pelatihan bagi PNS daerah, sosialisasi tentang disiplin pegawai.

Disamping itu dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada reformasi birokrasi dengan fokus pada upaya-upaya peningkatan kinerja birokrasi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintahan yang didukung dengan peningkatan kualitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan menjalankan agenda reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik dengan menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang disertai dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah di dalam penerapan SPM seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar



Pelayanan Minimal. Kondisi Pencapaian SPM di Kabupaten Kubu Raya sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.43 sebagai berikut :

**Tabel 2.44**  
**JENIS PELAYANAN DASAR, JUMLAH INDIKATOR DAN JUMLAH**  
**INDIKATOR YANG SUDAH MENCAPAI TARGET (100%)**  
**TAHUN 2013**

No	Uraian	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Indikator	Jumlah Indikator Yang Sudah Mencapai Target (100%)	Prosentase Pencapaian SPM (%)
1.	Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	3	11	1	9,09%
2.	Bidang Kesehatan	4	18	2	11,11%
3.	Bidang Sosial	4	7	4	57,14%
4.	Bidang Lingkungan Hidup	4	4	2	50,00%
5.	Bidang Perumahan Rakyat	2	3	0	0,00%
6.	Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	5	8	3	37,50%
7.	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	3	9	4	44,44%
8.	Bidang Pendidikan	2	27	2	7,41%
9.	Bidang Ketenagakerjaan	5	8	3	37,50%
10.	Bidang Kominfo	2	6	1	16,67%
11.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	23	9	39,13%
12.	Bidang Kesenian	2	7	5	71,43%
13.	Bidang Ketahanan Pangan	4	7	0	0,00%
14.	Bidang Perhubungan	18	26	4	15,38%
15.	Bidang Penanaman Modal	7	10	7	70,00%
<b>Jumlah</b>		<b>73</b>	<b>174</b>	<b>47</b>	<b>27,01%</b>

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2014

## S. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat desa bertujuan meningkatkan keberdayaan





masyarakat desa, mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, dan meningkatkan peran serta perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif dan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam upaya pemberdayaan, pembangunan masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintahan Desa, telah dilakukan beberapa pemekaran desa yang bertujuan mempermudah jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Sampai tahun 2012, setidaknya terdapat 10 desa pemekaran baru yang sudah disahkan oleh legislatif, 3 desa lainnya dalam tahapan penyelesaian administratif.

Dalam kerangka penanganan dan penyelesaian batas, telah diidentifikasi beberapa potensi sengketa batas, baik batas desa, batas kecamatan, maupun batas kabupaten. Penanganan batas Kabupaten Kubu Raya-Kabupaten Sanggau telah berhasil terpasang 25 pilar batas (PABU. 060 - PABU. 084), Kabupaten Kubu Raya-Kayong Utara, telah terpasang 21 pilar batas (PABU. 085 - PABU. 105), Kabupaten Kubu Raya-Kabupaten Landak, telah terpasang 60 Pilar Batas Utama (PBU. 001 - PABU. 060), dan Kabupaten Kubu Raya-Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak sedang dalam fase fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.

Dalam upaya memotivasi pembangunan masyarakat Desa, telah dilakukan beberapa perlombaan pembangunan Desa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berimplikasi positif dalam menggairahkan partisipasi masyarakat Desa. Dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa juga telah berhasil dilakukan program karya bhakti TNI untuk membangun infrastruktur desa.

## **T. Statistik**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Oleh karena itu ketersediaan data dan informasi statistik yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Datad an informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi tujuan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat



untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya. Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi belum sepenuhnya terpenuhi namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya.

Data produk-produk statistik diantaranya buku Kubu Raya Dalam Angka, buku PDRB kabupaten, buku Kecamatan Dalam Angka, dan buku informasi pembangunan lainnya.

### 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### A. Pertanian

Pada Tahun 2011 pertanian masih menjadi sektor penting penopang perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Sektor pertanian memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Kubu Raya yang cukup signifikan yakni sebesar 18,66 % dari total PDRB. Untuk itu pembangunan sektor pertanian harus terus ditingkatkan guna menopang perekonomian Kabupaten Kubu Raya.

Sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan mencakup padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Gambaran sektor pertanian dapat dilihat di tabel :

**Tabel 2.45**  
**LUAS PANEN, RATA-RATA PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS SEKTOR**  
**PERTANIAN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009 - 2013**

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	Padi Sawah					
	Luas Panen (ha)	57.160	53.770	60.105	59.330	63,937.00
	Rata-rata prod. (kw/ha)	34,04	34,19	34,22	34,30	34.37
	Produksi (ton)	194.600	183.851	205.670	203.523	219,783.00
2	Padi Ladang					
	Luas Panen (ha)	2.443	2.026	589	702	435.00
	Rata-rata prod. (kw/ha)	19,49	21,31	20,76	21,05	21.11
	Produksi (ton)	4.761	4.318	1.223	1.478	918.00
3	Jagung					



No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
	Luas Panen (ha)	7.314	4.752	6.953	7.135	4,105.00
	Rata-rata prod. (kw/ha)	28,56	29,01	29,08	29,13	29.11
	Produksi (ton)	20.889	13.784	20.218	20.785	11,949.00
4	Ubi Kayu					
	Luas Panen (ha)	824	430	457	599	343.00
	Rata-rata prod. (kw/ha)	142,34	142,46	143,26	143,38	144.95
	Produksi (ton)	11.729	6.126	6.547	8.588	4,972.00
5	Ubi Jalar					
	Luas Panen (ha)	202	146	152	167	155.00
	Rata-rata prod. (kw/ha)	78,12	78,81	78,78	78,73	78.47
	Produksi (ton)	1.578	1.151	1.198	1.315	1,216.00
6	Kacang Tanah					
	Luas Panen (ha)	111	62	41	61	59.00
	Rata-rata prod. (kw/ha)	11,43	11,73	11,73	11,75	11.73
	Produksi (ton)	127	73	48	72	69.00
7	Kedelai					
	Luas Panen (ha)	96	141	79	30	53.00
	Rata-rata prod. (kw/ha)	11,82	12,01	11,93	11,95	11.93
	Produksi (ton)	113	169	95	36	63.00
8	Kacang Hijau					
	Luas Panen (ha)	5	6	5	11	6.00
	Rata-rata prod. (kw/ha)	6,94	7,03	7,06	7,06	6.67
	Produksi (ton)	5	4	3	8	4.00

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya, 2014

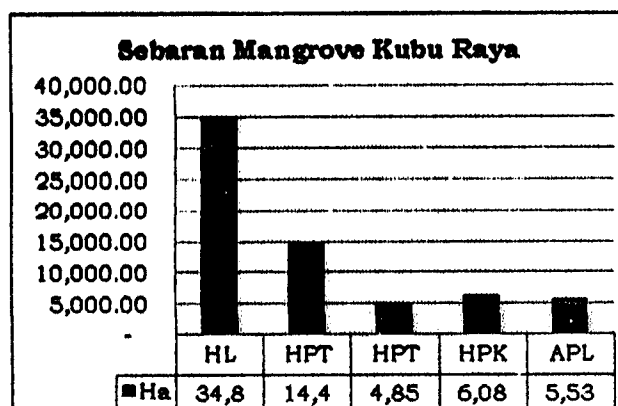


## B. Kehutanan

Berdasarkan data Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya, luas hutan lebih kurang 831.679 hektar dengan rincian 388.392,73 hektar atau 46,70% merupakan kawasan hutan lindung dan 443.286,83 hektar merupakan Areal Penggunaan Lain (APL). Dilihat dari kondisinya, terdapat lahan dengan kondisi sangat kritis seluas 875,11 hektar.

Potensi sumber daya hutan dalam bentuk HPH di Kabupaten Kubu Raya relatif berkurang sejak tahun 1990. Aktivitas kehutanan saat ini digantikan oleh kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). HTR dilaksanakan pada Hutan Produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin/hak lain. Berdasarkan hasil penelaahan pada Peta penunjukan Kawasan Hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Barat SK 936/Menhut-II/2013 sebagian Areal Hutan Produksi telah diperuntukkan untuk kegiatan Investasi IUPHHK-Hutan Alam dan kegiatan IUPHHK hutan Tanaman namun terdapat lebih kurang ±1.000 ha Hutan Produksi yang dapat dipersiapkan untuk pencadangan kegiatan HTR. Selain kegiatan-kegiatan tersebut terdapat aktivitas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan Alam (IUPHHK-HA), Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK- HT), Pengumpulan hasil Hutan Non Kayu, dan usaha Pemanfaatan Kayu (IPK).

Selain potensi hutan, mangrove merupakan vegetasi hutan yang menjadi potensi di Kabupaten Kubu Raya. Mangrove berfungsi untuk mencegah atau mengurangi tingginya erosi oleh gerusan air laut serta sebagai habitat perkembangbiakan ikan. Pada tahun 2011 telah dilakukan identifikasi potensi hutan mangrove Kubu Raya yang tercatat seluas 60,973,73 ha. Berikut sebaran mangrove di Kabupaten Kubu Raya.



**Grafik 2.4**

### **SEBARAN MANGROVE DI KABUPATEN KUBU RAYA**



Mangrove di Kabupaten Kubu Raya saat ini sudah banyak yang dieksploitasi oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi produktif. Kegiatan indentifikasi mangrove menghasilkan data kerusakan mangrove oleh aktivitas penduduk lokal maupun kegiatan usaha tambak/keramba. Data kerusakan mangrove terklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu, produktifitas rendah seluas ±33.149 Ha yang tersebar di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Kakap. Mangorve katagori rusak ringan seluas ± 561 Ha berada di Kecamatan Batu Ampar, dan mangorve dalam kondisi rusak berat seluas ±3.981 Ha yang tersebar di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu dan Kecamatan Teluk Pakedai.

### C. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi tambang yang tersebar di beberapa kecamatan. Jenis Tambang yang ada di Kabupaten Kubu Raya antara lain Andesit, Granit, Gambut, Pasir Sungai, Pasir Kuarsa, Gas Methan dan Bauksit. Dari sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Kubu Raya, semuanya memiliki potensi tersendiri. Kecamatan Batu Ampar misalnya memiliki potensi Andesit/ Dasit, Granit/ Diorit/ Granodiorit dan Gambut. Sedangkan untuk jenis Pasir sungai terdapat di Kecamatan Terentang, Sungai Raya dan Kuala Mandor B. Jumlah perusahaan pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2011 ada 29 unit. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.46**  
**JUMLAH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN SERTA**  
**JUMLAH TENAGA KERJA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012**

No.	Kecamatan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Batu Ampar	1	7
2.	Terentang	6	42
3.	Kubu	2	14
4.	Teluk Pakedai	-	-
5.	Sungai Kakap	-	-
6.	Rasau Jaya	-	-
7.	Sungai Raya	21	147
8.	Sungai Ambawang	4	28
9.	Kuala Mandor B	-	-

Sumber: Dinas Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya, 2013



Di sektor kelistrikan, Kebutuhan energi listrik di Kabupaten Kubu Raya sebagian besar bersumber dari pembangkit listrik tenaga diesel. Di daerah perdesaan yang sulit terjangkau oleh pelayanan listrik negara (PLN), diupayakan pengembangan potensi energi lokal dengan memanfaatkan energi terbarukan diantaranya melalui pembangunan Energi Tenaga Surya (ETS) dan dengan menggunakan Mikro Hydro. Pencapaian sampai tahun 2011, pemasangan ETS di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 759 unit. Sebaran kecamatan yang mendapatkan ETS, difokuskan di wilayah pesisir dan daerah pedalaman.

**Tabel 2.47**  
**PEMASANGAN ENERGI TENAGA SURYA ENERGI DI**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2011**

Kecamatan	Desa	Jumlah
Sungai Raya	Gn.Tamang	425
	Sungai Asam	50
	Pulai Limbung	126
Sungai Ambawang	Teluk Bakung	50
	Pasak Piang	20
Teluk Pakedai	Sungai deras	20
Terentang	Terentang Hulu	30
	Sungai Dungun	38
Total		759

Sumber: Dinas Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya, 2013

Proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Kubu Raya sampai tahun 2028 diperkirakan sebesar 174,938.54 Kwh. Selain itu, upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki sambungan, dilakukan antara lain dengan penyediaan sambungan bersubsidi berkerjasama sama dengan PLN Wilayah.

Pencapaian ketenagalistrikan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut seiring dengan rencana pembangunan pembangkit listrik dari program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW yang dicanangkan oleh Pemerintah, salah satunya di Kecamatan Batu Ampar, serta beberapa pembangkit listrik lainnya.

Di tahun 2011, pemenuhan listrik sambungan baru bagi rumah penduduk yang belum dialiri listrik namun memiliki potensi pelanggan



sudah dilakukan di beberapa desa. Desa Mekar Sari SP-2 Makmur, Desa Cahaya Baru, Desa Sekunder C, Desa Tanjung Wangi Patok 50, Desa Batu Ampar Dsn. Parot Pak Tahir, Desa Batu Ampar Dsn. Gunung Kruwing, Desa Teluk Bayur Dsn. Sampur, Desa Terentang Hilir Dsn. Karya Tani, Desa Tanjung Harapan, Teluk Empening, merupakan pencapaian perluasan jaringan untuk memenuhi rasio desa yang mendapatkan aliran listrik. Pada tahun 2012 rencana pengembangan dan perluasan jaringan bagi desa yang belum mendapatkan pelayanan listrik, ditujukan untuk memenuhi kapasitas dan daya terpasang listrik sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Upaya tersebut ditempuh dengan kerjasama kesepakatan pembangunan (K-lisda/sambungan 1.000 pelanggan yang digagas oleh PLN.

Banyaknya pelanggan, daya terpasang, listrik terjual yang tercatat di PLN ranting Rasau Jaya Tahun 2011 rata-rata masing-masing sebanyak 26.470 pelanggan, 20.898.954 VA, 3.143.043 KWH dan Rp. 1,83 milyar.

#### **D. Perikanan dan Kelautan**

Secara geografis, Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi di bidang perikanan, baik perikanan laut dan perikanan umum maupun perikanan budidaya. namun pada kenyataannya potensi tersebut belum dioptimalkan.

Produksi dan nilai produksi perikanan laut di Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2011 masing-masing 7.906,4 ton dan 110,06 milyar rupiah. Produksi ikan perairan umum yang ada di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 124,9 ton, dan nilai produksinya sebesar 1,41 milyar rupiah, sedangkan produksi ikan budidaya yang ada di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 1.601,5 ton, sedangkan nilai produksinya sebesar 26,74 milyar rupiah.

#### **E. Industri dan Perdagangan**

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari peran kegiatan industri dan perdagangan. Nilai tambah sektor industri pengolahan dalam PDRB Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2010 sebesar Rp. 4.160,67 milyar, dan meningkat menjadi Rp. 4.548,79 milyar pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 4.958,89 milyar. Nilai tambah sektor industri pengolahan berasal dari berbagai kegiatan usaha industri kecil dan menengah, maupun industri besar. Sampai tahun 2012, jumlah industri di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 485 unit, yang terdiri dari industri kecil dan menengah sebanyak 400 unit usaha dan industri



besar sebanyak 85 unit usaha. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2011 yang sebanyak 470 unit, terdiri dari 395 unit usaha industri kecil menengah dan 75 unit usaha industri besar. Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2012 sebanyak 400 unit usaha, bertambah 5 unit usaha dibandingkan tahun 2011. Dari jumlah tersebut, terbanyak adalah jenis industri makanan sebesar 277 unit usaha (69,25%) dan paling sedikit adalah industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang hanya berjumlah 1 unit usaha (0,25%).

**Tabel 2.48**  
**JUMLAH INDUSTRI DI KABUPATEN KUBU RAYA, TAHUN 2011 - 2012**

<b>Sektor Industri</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Jumlah Usaha (Unit)	470	485
Tenaga Kerja (Orang)	17.245	18.614
Nilai Investasi (Rp Juta)	636.416,64	1.039.660,60

*Sumber: BPS KKR, Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2013 (diolah)*

Total penyerapan tenaga kerja pada kegiatan industri kecil dan menengah tahun 2012 sebanyak 1.347 orang, meningkat 43 orang dibandingkan tahun 2011. Penyerapan tenaga kerja yang paling banyak berada pada industri makanan yaitu sebanyak 863 orang, kemudian disusul industri barang dari kayu, gabus, rotan dan bambu dengan tenaga kerja sebanyak 248 orang. Keseluruhan nilai investasi industri kecil dan menengah tahun 2012 sebesar Rp. 7,77 milyar, meningkat dibandingkan tahun 2011 yang sebesar Rp. 6,71 milyar. Nilai investasi yang terbesar berada pada industri makanan, yaitu Rp. 4,55 milyar.

Jumlah industri besar di Kabupaten Kubu Raya tahun 2012 sebanyak 85 unit usaha, bertambah 10 unit usaha dibandingkan tahun 2011. Dari jumlah tersebut, terbanyak adalah jenis industri dowel, moulding sebesar 18 unit usaha (21%), sedangkan industri remiling karet, industri garam beryodium, industri pengolahan nenas, industri kelapa sawit, industri penyosohan bersa dan industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes masing-masing hanya berjumlah 1 unit usaha.

Total penyerapan tenaga kerja pada industri besar sebanyak 17.267 orang, meningkat 1.326 orang dibandingkan tahun 2011. Penyerapan tenaga kerja yang paling banyak berada pada industri kayu lapis yaitu sebanyak





5.760 orang, kemudian disusul industri dowel/moulding dengan tenaga kerja sebanyak 4.356 orang, dan industri sawmill sebanyak 3.419 orang.

Keseluruhan nilai investasi industri besar tahun 2012 sebesar Rp. 1.031,89 milyar, meningkat dibandingkan tahun 2011 yang sebesar Rp. 629,70 milyar. Nilai investasi terbesar berada pada industri crum rubber yaitu Rp. 226,12 milyar, kemudian disusul industri kelapa sawit sebesar Rp. 190,00 milyar, dan industri kayu lapis sebesar Rp. 177,83 milyar.

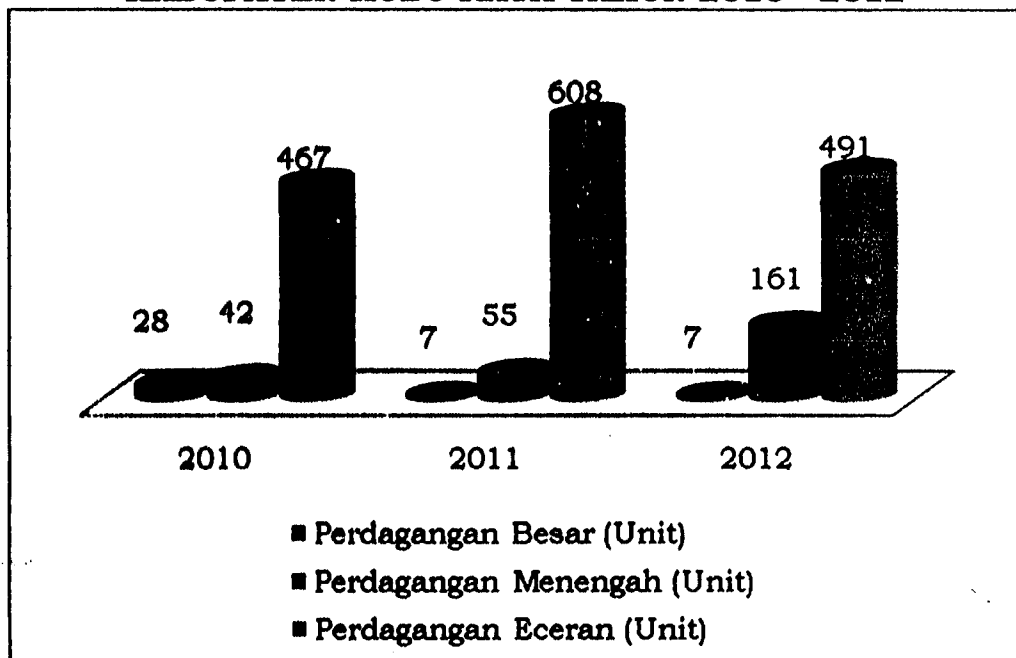
Selain kegiatan industri, secara kuantitas perekonomian Kabupaten Kubu Raya ditopang pula oleh sektor perdagangan. Nilai tambah sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.539,34 milyar, dan meningkat menjadi Rp. 1.697,23 milyar pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.921,94 milyar. Nilai tambah terbesar berasal dari sub sektor perdagangan besar dan eceran serta sub sektor restoran, sedangkan nilai tambah dari sub sektor hotel relatif masih kecil.

Kegiatan perdagangan terus dikembangkan dikarenakan selama ini merupakan sektor yang memegang peranan cukup penting dalam perekonomian daerah maupun dalam pemerataan kesempatan berusaha dan perluasan lapangan kerja. Sektor perdagangan (termasuk hotel dan restoran) memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap perekonomian daerah setelah sektor industri pengolahan dan sektor pertanian.

Aktivitas usaha perdagangan berupa usaha perdagangan skala besar, menengah dan perdagangan kecil/eceran. Sampai tahun 2012, terdapat 659 perusahaan perdagangan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dari jumlah tersebut, jenis perdagangan kecil paling dominan dalam kepemilikan SIUP yaitu sebesar 491 atau sebesar 74,51%, kemudian perdagangan menengah sebanyak 161 atau sebesar 24,43%, dan perdagangan kecil sebanyak 7 atau sebesar 1,06 %.



**Grafik 2.5**  
**PERKEMBANGAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN DI**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2010 - 2012**



Sumber: BPS KKR, Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2013 (diolah)

Perusahaan perdagangan berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebanyak 478 buah, terdiri dari 205 buah atau 42,89% merupakan perusahaan perseorangan (PT), dan CV sebanyak 194 buah atau 40,59%. Kemudian diikuti perusahaan berbentuk PT sebanyak 58 buah atau 12,13%, dan Koperasi sebanyak 20 buah atau 4,18%. Sedangkan Perusahaan Asing dan Badan Usaha Lainnya tidak ada yang terdaftar.

#### 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya Saing Daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dari tahun ke tahun terus berupaya untuk mengembangkan daya saing daerah yang bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah dalam rangka untuk lebih menarik investor masuk ke daerah. Salah satu kebijakan dan strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka untuk menggali sumber-sumber pendanaan daerah yang bertujuan untuk lebih meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah menumbuhkan investasi di daerah. Upaya ini juga harus diarahkan pada bagaimana cara menciptakan daya saing daerah sehingga diharapkan suatu daerah mempunyai keunggulan dalam menarik minat investor dibandingkan dengan daerah lain.



#### **2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Dari sisi permintaan (pengeluaran), kinerja sumber-sumber pencapaian pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga untuk makanan. Pada tahun 2013 konsumsi rumah tangga tercatat sebesar Rp. 6.894.939,08 meningkat dari tahun 2012 yang sebesar Rp. 5.994.113,19. Peningkatan konsumsi rumah tangga tahun 2012 sebagian besar disumbang pengeluaran untuk konsumsi makanan yang berkontribusi sebesar 55,22% dibandingkan pengeluaran rumah tangga untuk non makanan yang tercatat sebesar 44,78%.

Peningkatan konsumsi rumah tangga per kapita tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kubu Raya yang mengakibatkan meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat.

Selain rumah tangga, pemerintah juga melakukan konsumsi. Konsumsi pemerintah yang terjabarkan dalam berbagai program/kegiatan yang teruang dalam APBD. Pengeluaran konsumsi Pemerintah dalam berbagai kegiatan di daerah memerlukan biaya-biaya operasional yang merupakan pengeluaran untuk konsumsi terkait tugas pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengeluaran konsumsi Pemerintah dalam hal ini dapat disebut juga sebagai investasi pemerintah. Konsumsi pemerintah di Kabupaten Kubu Raya terus meningkat seiring dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya serta berbagai kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat lainnya di berbagai sektor yang menjadi kewenangannya.

Pada tahun 2008 konsumsi pemerintah sebesar Rp. 1.336.184,45, dan cenderung terus meningkat menjadi Rp. 1.686.588,01 dan Rp. 1.712.353,76 di tahun 2009 dan 2010 serta di tahun 2011 sebesar Rp. 1.761.120,76, hingga pada tahun 2012 dan tahun 2013 menjadi Rp. 2.067.370,19 dan Rp. 2.281.625,47. Peningkatan konsumsi pemerintah Kabupaten Kubu Raya dimungkinkan sebagai kabupaten baru, diperlukan



berbagai investasi publik guna mendorong peningkatan sarana dan prasarana di segala bidang. Selama tiga tahun terakhir nilai konsumsi pemerintah menunjukkan pola fluktuatif, masing-masing dari 19,39 % pada tahun 2008 menjadi sebesar 22,15 % di tahun 2009 dan 19,46 % pada tahun 2010 menjadi 17,65 % di tahun 2011 dan hingga akhirnya menjadi 18,45 % di tahun 2012.

**Tabel 2.49**  
**KONSUMSI PEMERINTAH DAN KONSUMSI RUMAH TANGGA DI**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2008 - 2013 (JUTA RUPIAH)**

Tahun	Konsumsi Pemerintah	Konsumsi Rumah Tangga		
		Makanan	Non Makanan	Jumlah
2008	1.336.184,45	2.089.388,48	1.416.212,43	3.505.600,91
2009	1.686.588,01	2.263.883,85	1.473.563,50	3.741.447,35
2010	1.712.353,76	2.692.150,17	2.002.095,98	4.694.246,15
2011	1.761.120,76	2.877.363,98	2.436.025,08	5.313.389,06
2012	2.067.370,19	3.310.174,72	2.683.938,47	5.994.113,19
2013	2.281.625,47	3.799.897,14	3.095.041,94	6.894.939,08

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2014

#### 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus Kedua dari Aspek daya Saing Daerah adalah Fokus Fasilitas Wilayah atau ketersediaan Infrastruktur yang memadai di daerah. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 176, yang mengamatkan bahwa Pemerintah Daerah agar memberikan kemudahan bagi masyarakat atau investor dengan penyediaan sarana dan prasarana.

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.



Pembangunan sarana dan prasarana wilayah dalam rangka untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik daerah tentunya juga harus memperhatikan tingkat aksesibilitas, karena tingkat aksesibilitas tersebut yang akan menjadi potensi bagi daerah tersebut dalam menarik investor.

Ketersediaan sarana prasarana wilayah yang didukung dengan infrastruktur yang memadai baik kualitas dan kuantitasnya yang memadai serta persebarannya yang merata akan menumbuhkan daya tarik dan daya saing daerah sehingga diharapkan akan memberikan nilai lebih atau keunggulan kompetitif yang bersifat dinamis bagi Kabupaten Kubu Raya disamping keunggulan kompetitif statis yang sudah dimiliki sejak lama terkait dengan kondisi geografis Kabupaten Kubu Raya yang letaknya sangat strategis yaitu berdekatan dengan kota Pontianak.

Ketersediaan sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang terus dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya meliputi sarana pendidikan, kesehatan, permukiman, perdagangan, perbankan, sarana perhubungan darat, serta sarana rekreasi dan olah raga. Prasarana permukiman, prasarana perhubungan, prasarana jaringan, yang terdiri dari jaringan drainase, jaringan irigasi, serta jaringan utilitas lainnya, serta prasarana persampahan.

### **2.4.3. Fokus Iklim Investasi**

Peran investasi sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Peluang investasi sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi diantaranya ketersediaan tenaga kerja, suku bunga, dan kondisi ekonomi makro. Sedangkan faktor non ekonomi diantaranya adalah pelayanan perijinan, kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta kepastian hukum dalam berusaha.

Peningkatan peluang investasi di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan dengan meningkatkan daya tarik investasi, diantaranya dengan perbaikan pelayanan perijinan, penciptaan keamanan dan ketertiban, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, mendorong pertumbuhan industri kreatif. Hal lain yang tidak kalah penting dalam menumbuhkan investasi di Kabupaten Kubu Raya adalah dengan meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public private partnership*).



Statistik kriminalitas sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana tingkat keamanan suatu daerah. Kriminalitas yang cukup tinggi di suatu daerah memberikan implikasi yang sangat kurang baik terhadap iklim investasi di suatu daerah. Semakin rendah tingkat kriminalitas suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut cukup aman bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data dari Poltabes Kota Pontianak mengenai banyaknya kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan dan diselesaikan di wilayah hukum Sungai Raya, Sungai Ambawang, Sungai Kakap, Rasau Jaya, dan Kuala Mandor B tercatat sebanyak 800 dilaporkan dan 248 diselesaikan. Jenis kejahatan dibagi menjadi empat yaitu: Kejahatan konvensional, kejahatan trans nasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan kontijensi. Dari jenis kejahatan yang ada, jenis kejahatan konvensional yang paling banyak dilaporkan dan diselesaikan yakni masing-masing sebanyak 799 dan 248, sedangkan jenis kejahatan kontijensi di Kubu Raya tidak ada yang dilaporkan ke Poltabes Kota Pontianak.

#### **2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia**

##### **A. Kualitas Tenaga Kerja**

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

Dari sekian banyak pencari kerja yang terdaftar, sebanyak 175 orang atau 43,86 persen memiliki ijazah SLTA; 72 orang atau 18,05 persen memiliki ijazah akademi/diploma III, dan sebanyak 60 orang atau 15,04 persen berijazah Sarjana. Jumlah lulusan sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2/S3) di Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2008-2012 dapat dilihat pada gambar berikut :



**Tabel 2.50**  
**JUMLAH LULUSAN SARJANA (S1) DAN PASCA SARJANA (S2/S3) DI**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2008 - 2012**

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah lulusan S1	3.063	1.096	951	60	60
2.	Jumlah lulusan S2	0	0	0	0	0
3.	Jumlah lulusan S3	0	0	0	0	0
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	3.063	1.096	951	60	60
5.	Jumlah penduduk	482.487	490.408	500.970	511.235	522.174
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4) / (5) (%)	0,6	0,2	0,2	0,01	0,01

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

Data ketenagakerjaan khususnya pencari kerja yang ada disini dapat dianggap kurang mewakili keadaan yang sebenarnya karena masih kurang sadarnya para pencari kerja untuk melaporkan diri ke dinas yang bersangkutan. Dalam hal ini yang dicatat sebagai pencari kerja hanya mereka yang melapor ke Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi (yang mencari kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja). Sedangkan yang tidak melapor tidak dapat diketahui. Sehingga data yang diperoleh cenderung under estimate karena data pencari kerja yang tercatat cenderung jumlahnya lebih kecil.

#### **B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)**

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase dependency ratio maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk



membayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu tahun 2008-2012.

**Tabel 2.51**  
**RASIO KETERGANTUNGAN PENDUDUK DI KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN 2008 - 2012**

No	Uraian	2008	2009	2010	2012
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	169.728	167.821	161.811	163.792
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	17.397	17.207	17.708	19.512
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1)&(2)	187.125	185.028	179.519	183.304
4.	Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun	308.834	305.380	321.451	338.870
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4) (%)	60,6	60,6	55,9	54,1

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2013

### C. Bonus Demografi

Sejak beberapa tahun lalu, Indonesia telah mulai menikmati bonus demografi. Kabupaten Kubu Raya akan menikmati bonus demografi pada tahun 2020-2035, dan puncaknya pada tahun 2030, yaitu ketika rasio ketergantungan pada level terendah (44 penduduk muda setiap 100 pekerja), atau dengan kata lain penduduk usia produktif lebih banyak daripada non produktif. Bonus demografi merupakan potensi sekaligus tantangan bagi daerah untuk memanfaatkan jumlah penduduk usia kerja produktif yang sangat besar serta rasio ketergantungan yang menurun dibanding periode sebelumnya.

Bonus demografi hanya dialami sekali oleh sebuah bangsa, karena itu kedatangannya harus dipersiapkan dengan matang. Bonus demografi harus dimanfaatkan secara baik oleh semua pemangku kebijakan, karena bisa menjadi penyokong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jika ditangani dengan tepat. Selain peningkatan kualitas sumberdaya manusia, upaya pengendalian penduduk dengan menekan jumlah kelahiran harus dilakukan agar bonus demografi terus dapat dinikmati.

Langkah-langkah kebijakan menyongsong bonus demografi antara lain:

1. Melakukan pemetaan potensi kesempatan kerja;





2. Melakukan penyiapan tenaga kerja terkait jenis dan kompetensinya;
3. Mendorong investasi padat karya sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.



## **B A B   I I**

# **G A M B A R A N   U M U M   D A N K O N D I S I   D A E R A H**

---

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019**



### **B A B   I I I**

## **G A M B A R A N   P E N G E L O L A A N K E U A N G A N   D A E R A H S E R T A   P E N D A N A A N**

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019**



### **BAB III**

## **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENDANAAN**

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Negara. Pelaksanaannya diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengertian lain Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sehingga secara ringkas dapat disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun ruang lingkup keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak - hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta



6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

### 3.1. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (2009 - 2014)

Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu elemen dalam penilaian akuntabilitas pemerintah daerah. Pengukuran kinerja tersebut diharapkan mampu menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam masa 5 (lima) tahun atau satu siklus pelaksanaan RPJMD. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dalam satu siklus perencanaan jangka menengah.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Pengelolaan pendapatan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari :
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari :
  - a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak



- b. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus Lain – Lain Pendapatan Yang Sah, yang terdiri dari :
  - a. Hibah
  - b. Dana Darurat
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah yang lainnya
  - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
  - e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
  - f. Pendapatan lainnya.

Kabupaten Kubu Raya sebagai kabupaten baru (dibentuk pada tahun 2008), pada tahun pertama pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi 3 (tiga) komponen sumber pendapatan daerah di atas masih belum dapat dikelola dengan optimal. Pendapatan daerah saat itu masih bertumpu pada PAD yang berasal dari lain-lain PAD yang sah, dan belum memiliki sumber penerimaan yang berasal dari pajak atau retribusi daerah. Setelah memasuki tahun 2009, dan terutama setelah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah yang pertama, semua sumber - sumber pendapatan daerah dapat dioptimalkan. Angka Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**  
**REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN 2009-2013**

NO.	URAIAN	JUMLAH (Dalam Ribuan Rupiah)				
		TA. 2009	TA. 2010	TA.2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>9.845.348</b>	<b>13.679.129,524</b>	<b>55.577.649,588</b>	<b>44.201.933,899</b>	<b>64.277.117,327</b>
1.1	Pajak Daerah	5.847.360	3.608.300,884	41.811.687,276	33.695.092,360	48.513.648,885
1.2	Retribusi Daerah	1.839.090	4.417.408,473	5.570.968,831	6.835.292,867	8.166.001,288
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	166.756,499
1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	1.858.898	5.653.420,167	8.194.993,480	3.671.548,671	7.430.710,654



NO.	URAIAN	JUMLAH (Dalam Ribuan Rupiah)				
		TA. 2009	TA. 2010	TA.2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>426.063.501</b>	<b>502.356.229,028</b>	<b>568.776.736,372</b>	<b>656.353.283,172</b>	<b>774.980.539,716</b>
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	32.048.561	39.358.362,028	41.684.074,372	40.032.847,172	48.162.438,716
2.2	Dana Alokasi Umum	375.546.940	414.760.167	460.516.762	535.464.386	627.894.391
2.3	Dana Alokasi Khusus	18.468.000.	48.237.700	66.575.900	80.856.050	98.923.710
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>12.991.843,487</b>	<b>90.536.175,386</b>	<b>141.284.803,942</b>	<b>92.859.871,976</b>	<b>115.029.563.617</b>
3.1	Hibah	5.000.000	2.841.000	2.500.000	0,00	0,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	75.031.060,360		31.174.451,617
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Dan Daerah Lainnya	7.991.843,487,00	10.354.578,254	23.275.728,222	32.346.190,167	10.724.000,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	38.385.959,132	0,00	0,00	0,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	11.118.000	7.866.500,00		
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>27.246.226.530,00</b>	<b>448.600.692.487,00</b>			

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kubu Raya, 2014

Untuk melihat performa pemerintah daerah dari angka pendapatan daerah, perlu disajikan angka target dan realisasi pendapatan tersebut mulai periode tahun 2009 hingga 2013 secara bersamaan. Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN 2009-2013**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	2009	471.736.892.406,23	473.460.797013,29	100,4
2	2010	635.915.730.784,54	606.571.533.938,93	95,4
3	2011	770.713.423.803,42	741.570.719.543,01	96,2
4	2012	822.408.609.617,98	793.415.089.047,86	96,5
5	2013	960.682.549.371,00	954.287.220.660,27	99,3



Bila dilihat dari Tabel 3.2, rata - rata target pendapatan yang telah ditentukan dalam setiap tahun anggaran dapat dicapai di atas angka 95%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya telah menentukan target yang cukup rasional dalam setiap tahun penganggaran. Adapun kenaikan pendapatan rata - rata per tahun adalah 20%, dengan komposisi masing - masing komponen pendapatan daerah sebagaimana yang terlampir dalam Tabel 3.3 berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN 2009-2013**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pendapatan Asli Daerah	10.332.817.590,55	13.679.129.524,53	55.577.649.588,28	44.201.933.899,50	64.277.177.327,27
2	Dana Perimbangan	423.065.107.971	502.356.229.028	568.776.736.372	656.353.283.172	774.980.539.716
3	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	40.062.871.451,74	90.536.175.386,40	141.284.803.942,73	92.859.871.976,36	115.029.563.617

Berdasarkan kontribusi masing - masing komponen pendapatan daerah, Dana Perimbangan masih menduduki porsi yang paling besar, yang berarti bahwa Kabupaten Kubu Raya masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun secara bertahap, komposisi tersebut mulai diimbangi oleh komponen - komponen yang lain hingga dicapai angka komposisi rata - rata pertahun 82,1% untuk Dana Perimbangan, 13,1% untuk Lain - Lain Pendapatan Yang Sah dan 4,8% untuk dana PAD.

Mengingat besarnya potensi perolehan PAD Kabupaten Kubu Raya, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan tetap memperhatikan agar kebijakan - kebijakan yang diambil tidak berakibat pada penciptaan ekonomi biaya tinggi, inflasi serta menurunnya daya beli masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Upaya peningkatan pendapatan daerah *bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.

Upaya peningkatan pendapatan daerah bukan PAD perlu ditetapkan secara selektif, baik jenis kegiatan maupun instrumennya. Kegiatan ini perlu ditetapkan berdasarkan prioritas pada nilai manfaat dan resiko bagi pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan kepentingan





kesejahteraan masyarakat, yaitu kegiatan yang memiliki resiko tinggi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan perlu dipertimbangkan untuk dikenakan beban pajak dan/atau retribusi yang tinggi pula sebagai upaya merubah perilaku serta menekan biaya resiko di masa yang akan datang, selain itu juga melakukan upaya penyehatan keuangan daerah dengan mempertimbangkan peningkatan kapasitas untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Upaya ini perlu menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, namun tidak untuk membatasi kreatifitas menciptakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang produktif dan dapat meningkatkan pendapatan daerah selain dari sumber PAD.

Identifikasi sumber pendapatan daerah perlu dilakukan bersamaan dengan cek silang potensi sumber pendapatan. Proses cek silang ini dapat dilakukan dengan memahami dan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara, daerah, dan sistem perpajakan, seperti ; a) Yang terkait dengan berapa tarif pajak ; b). Apa yang menjadi basis pajak ; dan c). Bagaimana pajak terhutang dihitung. Pengenalan terhadap tiga hal ini memberikan kemampuan daerah untuk melakukan cek silang dari sumber-sumber pendapatan selain PAD.

Proyeksi pendapatan daerah bukan Pendapatan Asli Daerah diprediksi mengalami peningkatan sebesar 10% tiap tahunnya. Data Proyeksi pendapatan daerah bukan Pendapatan Asli Daerah disajikan pada Tabel 3.4 berikut :

**Tabel. 3.4**  
**PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH BUKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2014-2019**

No	Uraian	Tahun Anggaran		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
1	<b>DANA PERIMBANGAN</b>			
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	55.678.984.000	61.246.882.400	67.371.570.640
1.2	Dana Alokasi Umum	699.700.430.000	769.670.473.000	846.637.520.000
1.3	Dana Alokasi Khusus	82.076.280.000	90.283.908.000	99.312.298.000
2	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>			
2.1	Hibah	-	-	-
2.2	Dana Darurat	-	-	-
2.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Dan Daerah Lainnya	56.525.330.000	62.177.863.000	68.395.649.300



No	Uraian	Tahun Anggaran		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
2.4	Dana Penyesuaian dan Otsus	-	-	-
2.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	30.000.000.000	33.000.000.000	36.300.000.000
2.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	87.848.276.735	96.633.104.408	106.296.414.849
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>1.011.829.300.735</b>	<b>1.113.012.230.808</b>	<b>1.224.313.452.789</b>

No	Uraian	Tahun Anggaran		
		2017	2018	2019
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>			
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	74.108.727.704	81.519.600.474	89.671.560.522
1.2	Dana Alokasi Umum	931.301.272.000	1.024.431.399.000	1.126.874.539.000
1.3	Dana Alokasi Khusus	109.243.528.000	120.167.881.000	132.184.669.000
<b>2</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>			
2.1	Hibah	-	-	-
2.2	Dana Darurat	-	-	-
2.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Dan Daerah Lainnya	75.235.214.200	82.758.735.600	91.034.609.200
2.4	Dana Penyesuaian dan Otsus	-	-	-
2.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	39.930.000.000	43.923.000.000	48.315.000.000
2.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	116.926.056.334	128.618.661.967	141.480.528.164
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>1.346.744.798.238</b>	<b>1.481.419.278.041</b>	<b>1.629.560.905.886</b>

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kubu Raya, (Data diolah 2014)

## 2. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD merupakan cerminan kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan. Daerah yang berkarakteristik unggul dalam sumber daya manusia dan tidak tergantung pada sumber daya alam biasanya memiliki PAD yang tinggi.

Upaya peningkatan PAD memenuhi "Prinsip *Good Governance*" dan "Sistem Akuntansi Negara" serta mencerminkan fungsi pemerintah daerah. Peningkatan PAD yang tidak terarah, dikhawatirkan justru akan membebani masyarakat dan dunia usaha.



Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha memiliki kewajiban dan hak yang sama saling melengkapi dan ketergantungan. Ketika kewajiban dan hak dilaksanakan dengan baik, maka dipastikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kinerja pemerintah daerah akan baik. Kewajiban masyarakat dan dunia usaha antara lain membayar pajak dan retribusi daerah, sementara hak masyarakat dan dunia usaha mendapatkan pelayanan publik, sebaliknya kewajiban pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik dan berhak mendapatkan penerimaan pajak dan retribusi atas pelayanan publik tersebut. Upaya melakukan penambahan jenis pajak dan retribusi baru, maka yang perlu diperhatikan adalah apakah ada penambahan kemampuan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, tanpa pertimbangan ini maka azas keadilan, kelayakan dan keselarasan pajak dan retribusi tidak akan tercapai.

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut :

- a. Estimasi penerimaan dari komponen PAD diasumsikan meningkat minimal sebesar 10% setiap tahun, berdasarkan pertimbangan adanya peningkatan jumlah wajib pajak/retribusi daerah dan implementasi Peraturan Daerah di bidang pajak/retribusi daerah.
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui pelayanan prima dan penerapan teknologi informasi (*e-Government*).
- c. Estimasi pendapatan dari komponen Dana Perimbangan diasumsikan meningkat sebesar 10% setiap tahun.

Untuk mengetahui proyeksi pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah disajikan pada Tabel 3.5 berikut :

**TABEL. 3.5**  
**PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN 2014-2019**

No	Uraian	Tahun Anggaran		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
1.1	Pajak Daerah	47.122.347.740	50.420.912.082	53.950.375.928
1.2	Retribusi Daerah	10.831.710.970	11.589.930.738	12.401.225.890
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	30.184.640.116,08	32.297.564.924,21	34.558.394.468,90
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>88.138.698.826,08</b>	<b>94.308.407.744,21</b>	<b>100.909.996.286,90</b>



No	Uraian	Tahun Anggaran		
		2017	2018	2019
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
1.1	Pajak Daerah	57.726.902.242	61.767.785.399	66.091.530.377
1.2	Retribusi Daerah	13.269.311.702	14.198.163.521	15.192.034.967
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	36.977.482.081,72	39.565.905.827,44	42.335.519.235,36
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>107.973.696.025,72</b>	<b>115.531.854.747,44</b>	<b>123.619.084.579,36</b>

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kubu Raya, (Data diolah 2014)

### 3.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Secara Umum, pengelolaan belanja daerah terbagi dalam 2 (dua) kategori belanja, yaitu :

- a. Belanja Tidak Langsung (Belanja Rutin/Administrasi Umum)
- b. Belanja Langsung (Belanja Program/Pembangunan)

Belanja Tidak Langsung atau Belanja Rutin adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program/kegiatan. Belanja tidak langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama- sama (*common cost*) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan di unit kerja, sedangkan Belanja Langsung atau Belanja Program/Pembangunan adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program/kegiatan yang direncanakan.

Perkembangan Belanja Daerah selama 5 (lima) tahun anggaran yaitu tahun 2009 dan Tahun 2013, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**PROPORSI BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2009 - 2013**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Belanja Tidak Langsung	357.483.093.377	459.173.574.961	371.003.661.969	413.084.562.651,74	72.801.325.541
2	Belanja Langsung	120.616.875.875	216.136.019.888	435.169.407.010	456.261.069.328	88.991.934.865
<b>Total Belanja Daerah</b>		<b>478.099.969.252</b>	<b>675.309.594.849</b>	<b>806.173.068.979</b>	<b>869.345.631.979,74</b>	<b>161.793.260.406</b>



Berdasarkan rincian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009-2013, tampak bahwa Pemerintah Daerah berusaha menurunkan proporsi Belanja Tidak Langsung cukup besar pada tahun – tahun awal penganggaran (2009) yaitu semula mencapai 74,77% dari total belanja menjadi hanya 49,16% dari total belanja daerah pada tahun akhir RPJMD (2013).

Untuk proyeksi Belanja Daerah 5 (lima) tahun ke depan, dapat dikemukakan hal – hal sebagai berikut :

- a. Estimasi Belanja Tidak Langsung, komponen Belanja Pegawai diperkirakan rata-rata pertahun mengalami kenaikan sekitar 20% karena masih memerlukan tambahan pegawai dan untuk membiayai kenaikan gaji berkala dan belanja pegawai lainnya.
- b. Untuk prediksi Alokasi Belanja Pendidikan tetap diupayakan tiap tahunnya mencapai 20% dari APBD tidak termasuk Belanja Pegawai.
- c. Estimasi Belanja Langsung diperkirakan naik rata-rata sekitar 10% per tahun. Kenaikan ini dalam upaya untuk memenuhi Belanja Langsung Minimal.

Untuk mengetahui proyeksi Belanja Daerah menurut Kewenangan dan Urusan Tahun 2014-2019 disajikan pada Tabel 3.7 berikut :

**Tabel. 3.7**  
**PROYEKSI BELANJA DAERAH MENURUT KEWENANGAN DAN URUSAN**  
**KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019**

No	Uraian	Tahun Anggaran		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
1.1	Belanja Pegawai	444.158.038.679	488.573.842.547	537.431.226.802
1.2	Belanja Hibah	24.102.000.000	24.584.000.000	25.075.000.000
1.3	Belanja Bantuan Sosial	6.067.000.000	6.370.000.000	6.688.000.000
1.4	Belanja Bantuan Keuangan	25.519.680.000	27.306.057.000	29.217.481.000
1.5	Belanja Tidak Terduga	300.000.000	600.000.000	900.000.000
<b>2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	-	-	-
2.1	Belanja Pegawai	47.385.176.742	49.754.435.579	52.242.157.358
2.2	Belanja Barang dan Jasa	209.778.988.022,04	230.756.886.824,21	253.832.575.506,90
2.3	Belanja Modal	373.641.971.060	379.375.416.602	419.837.008.409
<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>		<b>1.130.952.854.503,04</b>	<b>1.207.320.638.552,21</b>	<b>1.325.223.449.075,90</b>



No	Uraian	Tahun Anggaran		
		2017	2018	2019
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
1.1	Belanja Pegawai	591.174.349.482	650.291.784.430	715.320.962.873
1.2	Belanja Hibah	25.577.000.000	26.088.000.000	36.610.000.000
1.3	Belanja Bantuan Sosial	7.023.000.000	7.374.000.000	7.743.000.000
1.4	Belanja Bantuan Keuangan	31.262.705.000	33.451.094.000	35.792.671.000
1.5	Belanja Tidak Terduga	1.200.000.000	1.500.000.000	1.800.000.000
<b>2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
2.1	Belanja Pegawai	54.854.265.225	57.596.978.487	60.476.827.411
2.2	Belanja Barang dan Jasa	279.215.833.058	307.137.416.363	337.851.157.999
2.3	Belanja Modal	464.411.341.499	513.511.859.508	557.585.371.182
<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>		<b>1.454.718.494.264</b>	<b>1.596.951.132.788</b>	<b>1.753.179.990.465</b>

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kubu Raya, (Data diolah 2014)

Berdasarkan data Tabel 3.6 dan Tabel 3.7, diketahui bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dibandingkan dengan pendapatan daerah. Dengan demikian rata-rata belanja daerah defisit tiap tahun diperkirakan sebesar 13,15%. Untuk menghindari defisit anggaran ini, maka perlu diupayakan peningkatan pendapatan daerah bersumber dari PAD, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta peningkatan penerimaan dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Tugas Pembantuan, dan lain-lain.



**B A B I V**  
**A N A L I S I S I S U - I S U**  
**S T R A T E G I S**

---

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**  
**Kabupaten Kubu Raya 2014-2019**



## **BAB IV**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Kabupaten Kubu Raya sebagai kabupaten baru hasil pemekaran tahun 2007, baru melakukan satu tahapan RPJMD dari empat tahapan RPJMD yang direncanakan dalam RPJPD 2009-2029. Pembangunan yang dilakukan masih bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan dasar. Rentang geografis wilayah yang luas juga mempengaruhi pencapaian target pembangunan di daerah menjadi tidak optimal ditambah dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan yang belum memadai. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan utama adalah:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68,86 yang menduduki peringkat 11 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat;
2. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dengan penambahan penduduk rata-rata mencapai 2,14% per tahun;
3. Ketersediaan infrastruktur wilayah belum merata sehingga berpengaruh pada rendahnya interkoneksi antar kecamatan;
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai;
5. Masih tingginya angka kemiskinan yang mencapai 6,27% atau 31.900 jiwa dari 522.174 penduduk Kabupaten Kubu Raya dan pengangguran terbuka yang mencapai angka 6,06% atau 13.808 jiwa.

##### **4.1.1. Identifikasi Lingkungan Internal**

###### **A. Kekuatan Daerah**

1. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi apabila sumberdaya manusia yang ada berkualitas sebagai potensi pembangunan di Kabupaten Kubu Raya;
2. Kabupaten Kubu Raya memiliki sumberdaya alam yang cukup melimpah, yang meliputi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, sektor pertambangan dan sektor lainnya;





3. Posisi geografis Kabupaten Kubu Raya cukup strategis sebagai beranda terdepan Provinsi Kalimantan Barat dan berada dalam kawasan *Pontianak Metropolitan Area* yang berpotensi untuk pengembangan wilayah perkotaan serta akses langsung wilayah perairan Selat Karimata yang berpotensi untuk pengembangan sektor kelautan;
4. Kondisi masyarakat yang multietnis/ heterogen memiliki keberagaman budaya sebagai aset dan potensi pembangunan daerah;
5. Potensi tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
6. Potensi sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar sebagai sumber penerimaan daerah.

#### **B. Kelemahan Daerah**

1. Jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dengan kualitas sumberdaya manusia rendah;
2. Keterbatasan infrastruktur dasar yang mengakibatkan keterbatasan pengembangan usaha dan pelayanan publik;
3. Belum tergalinya secara maksimal potensi daerah sebagai sumber-sumber pendapatan asli daerah;
4. Masih belum optimalnya pengelolaan hasil sumberdaya alam;
5. Pembangunan ekonomi yang belum merata sebagai akibat rentang wilayah yang cukup luas dan terisolir;
6. Tingkat pengangguran yang tinggi dan minimnya lapangan pekerjaan yang dapat diserap oleh angkatan kerja yang ada;
7. Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi;
8. Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan dan penyelenggaraan urusan publik;
9. Degradasi lingkungan terus berlangsung akibat kegiatan pemanfaatan/ eksploitasi sumberdaya alam;
10. Rendahnya produktivitas dan pemasaran hasil sumberdaya alam;
11. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berpengaruh pada kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, lapangan pekerjaan penyediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas lainnya.



#### **4.1.2. Identifikasi Lingkungan Eksternal**

##### **A. Peluang Daerah**

1. Kerjasama/ kemitraan dalam skala lokal, regional, nasional dan global antara pemerintah, swasta dan dunia usaha dalam percepatan pembangunan wilayah yang terbuka, luas, dan cukup besar;
2. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kebijakan lainnya yang berbasis daerah dalam rangka pemberdayaan, pengentasan kemiskinan masyarakat dan pembangunan daerah yang terdepan, terluas, terpendek dan terisolir;
3. Komitmen Global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian tujuan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs);
4. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Masterplan Program Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Koridor III, akan memberikan dampak ikutan bagi Kabupaten Kubu Raya;
5. Perekonomian regional, nasional bahkan internasional yang dapat mempengaruhi investasi dan pengembangan usaha berbasis lokal, ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan.
6. Karakteristik masyarakat yang terbuka dan dinamis;
7. Pertumbuhan ekonomi regional yang relatif tinggi.

##### **B. Ancaman Daerah**

1. Masuknya budaya negatif sebagai pengaruh langsung dari globalisasi yang dapat mempengaruhi eksistensi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kubu Raya;
2. Pemberlakuan Zona Bebas Perdagangan (*Free Trade Zone*) mengakibatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional yang akan memberikan determinansi terhadap pasar lokal;
3. Arus informasi yang bersifat negatif sulit dihindarkan akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat;
4. Perubahan iklim dan pemanasan global berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat;



5. Angka kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban yang tidak segera teratasi berpengaruh pada stabilitas wilayah dan ketenteraman masyarakat.

#### **4.2. Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi fokus perhatian dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi internal dan eksternal, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis berdasarkan pada 8 (delapan) prioritas/fokus pembangunan, yang meliputi:

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
2. Peningkatan Kesejahteraan
3. Peningkatan Infrastruktur
4. Peningkatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa
5. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya dan Mental Spiritual
6. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan
7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah
8. Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif

##### **4.2.1. Isu Strategis Bidang Ekonomi**

Permasalahan umum terkait dengan aspek perekonomian dapat dilihat dari urusan Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang ada di wilayah. Pembangunan dalam bidang



ekonomi diarahkan pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu juga tingkat kebutuhan energi, tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya lapangan kerja yang tersedia serta belum optimalnya pengembangan sektor-sektor yang berpotensi dapat mendorong pembangunan sektor ekonomi daerah, seperti sektor pertambangan, pariwisata, perikanan dan pertanian. Pembangunan ekonomi wilayah dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap sektor unggulan komparatif wilayah. Isu-isu strategis Bidang Ekonomi, antara lain meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi dan kesempatan berusaha yang lebih baik;
3. Revitalisasi pertanian dan peningkatan ketahanan pangan; dan
4. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

#### **4.2.2. Isu Strategis Bidang Sosial Budaya**

Pembangunan dalam bidang sosial budaya lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dimana hal tersebut dapat dilihat dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama berhubungan dengan derajat pendidikan dan kesehatan. Dalam mencapai tujuan pembangunan idang sosial budaya akan diselenggarakan dalam 10 (sepuluh) urusan pemerintahan yang akan disinergikan, meliputi: urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketransmigrasian. Isu-isu strategis bidang sosial budaya, meliputi:

1. Tingkat pendidikan wajib belajar belum dapat tercapai dengan baik;
2. Ketersediaan sarana pendidikan dan prasarana pendukung pendidikan yang masih terbatas;
3. Kualitas sarana pendidikan yang belum memadai;
4. Aksesibilitas, sarana, prasarana, tenaga dan mutu pelayanan kesehatan masih belum baik;
5. Masih terdapatnya penduduk Kabupaten Kubu Raya yang termasuk kedalam kategori miskin dan belum meratanya hasil-hasil pembangunan; dan



6. Masih tingginya angkatan kerja yang belum terserap dalam kesempatan kerja yang ada.

#### **4.2.3. Isu Strategis Bidang Infrastruktur**

Isu strategis bidang infrastruktur dikelompokkan kedalam 6 (enam) urusan yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup dan energi serta sumberdaya mineral. Beberapa isu strategis bidang infrastruktur antara lain meliputi:

1. Kuantitas dan kualitas infrastruktur darat dan air yang masih rendah dalam melayani kebutuhan masyarakat;
2. Terbatasnya pengembangan akses perhubungan untuk daerah pesisir maupun daerah terisolir lainnya akibat limitasi kondisi fisik alam;
3. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/ rawa;
4. Rendahnya pelayanan jaringan air bersih dan sanitasi;
5. Rencana pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional di Kabupaten Kubu Raya terhadap kualitas lingkungan hidup;
6. Percepatan pembangunan jalan lingkar luar (*outer ring road*) dan kanal lingkar luar (*outer ring canal*);
7. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana dan layanan komunikasi dan informatika di daerah pesisir maupun pulau terluar untuk melayani kebutuhan masyarakat;
8. Penurunan kualitas lingkungan hidup;
9. Meningkatnya konversi lahan-lahan produktif dalam merespon perkembangan aktivitas perkotaan;
10. Jangkauan pelayanan energi listrik yang belum optimal; dan
11. Penataan ruang yang masih belum dilaksanakan secara optimal.

#### **4.2.4. Isu Strategis Kewilayahan**

Isu strategis kewilayahan Kabupaten Kubu Raya secara geografis dikelompokkan kedalam 2 (dua) kategori wilayah, yaitu wilayah pesisir yang meliputi Kecamatan Sungai Kakap, Teluk Pakedai, Kubu dan Batu Ampar serta wilayah daratan yang meliputi Kecamatan Kuala Mandor B, Sungai Ambawang, Sungai Raya, Terentang dan Rasau Jaya.



#### **4.2.4.1 Isu Strategis Wilayah Pesisir**

Pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya sebagai wilayah strategis pembangunan daerah, memerlukan perhatian khusus dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkeadilan. Isu-isu strategis wilayah pesisir antara lain meliputi:

1. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang relatif lebih tinggi;
2. Belum optimalnya implementasi penanganan daerah pesisir, misalnya untuk aspek infrastruktur, pendanaan, pelayanan kesehatan, pendidikan;
3. Pemerataan pembangunan, pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud;
4. Degradasi lingkungan kawasan pesisir;
5. Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh kebijakan yang bersifat khusus bagi kawasan yang bersangkutan;
6. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan, sanitasi, energi serta air bersih;

#### **4.2.4.2 Isu Strategis Wilayah Daratan**

Isu-isu strategis wilayah daratan antara lain meliputi:

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan, sanitasi, energi serta air bersih;
2. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk;
3. Konversi lahan-lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman sebagai respon perkembangan aktivitas perkotaan.

Dari analisis isu-isu strategis sebagaimana diuraikan diatas, akan dilakukan analisis *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats* (SWOT) Kabupaten Kubu Raya sebagaimana disajikan dalam table 4.1 berikut ini:



**Tabel 4.1**  
**ANALISIS SWOT KABUPATEN KUBU RAYA**

<b>SWOT</b>	<b><u>Strengths (S)</u></b>	<b><u>Weaknesses (W)</u></b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi dengan SDM yang berkualitas;</li><li>2. Sumberdaya alam melimpah;</li><li>3. Posisi geografis wilayah yang strategis;</li><li>4. Kondisi masyarakat yang memiliki keberagaman budaya;</li><li>5. Potensi partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan;</li><li>6. Potensi sumber pendapatan asli daerah sebagai sumber PAD.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah penduduk besar dengan kualitas SDM yang rendah;</li><li>2. Infrastruktur yang terbatas;</li><li>3. Masih terbatasnya PAD;</li><li>4. Pengelolaan SDA yang belum optimal;</li><li>5. Pembangunan ekonomi belum merata;</li><li>6. Tingkat pengangguran tinggi dan lapangan pekerjaan minim;</li><li>7. Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparatur birokrat;</li><li>8. Kinerja aparatur dalam pelayanan publik masih belum optimal;</li><li>9. Degradasi lingkungan;</li><li>10. Rendahnya produktivitas dan pemasaran hasil SDA;</li><li>11. Laju pertumbuhan penduduk terus meningkat berpengaruh pada kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, lapangan pekerjaan, penyediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas lainnya.</li></ol>



<p><b><u>Opportunities (O)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kerjasama dalam skala lokal, regional, nasional dan global antara pemerintah, swasta dan dunia usaha dalam pembangunan wilayah yang terbuka, luas, dan cukup besar;</li><li>2. Kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kebijakan lainnya dalam pemberdayaan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah terluas, terdepan, terpencil, dan terisolir;</li><li>3. Komitmen global dalam MDGs;</li><li>4. Kebijakan Pemerintah dalam MP3EI Koridor III;</li><li>5. Perekonomian regional, nasional dan internasional yang mempengaruhi investasi dan pengembangan usaha berbasis lokal, ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan.</li><li>6. Karakteristik masyarakat yang terbuka dan dinamis;</li><li>7. Pertumbuhan ekonomi regional yang relatif tinggi.</li></ol>	<p><b><u>S + O</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dengan jumlah penduduk yang besar, multi etnis dan sumberdaya alam yang melimpah dioptimalkan dengan kerjasama antara pemerintah, swasta dan dunia usaha dalam skala lokal, regional, nasional dan global untuk memacu pembangunan wilayah;</li><li>2. Mengoptimalkan program kebijakan pemerintah pusat dan provinsi di segala bidang.</li></ol>	<p><b><u>W + O</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan kerjasama dan pembiayaan pembangunan;</li><li>2. Sinergisasi dan pengoptimalan program pemerintah pusat dan provinsi untuk meningkatkan kualitas SDM.</li></ol>
<p><b><u>Threats (T)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dampak negatif akibat arus globalisasi;</li></ol>	<p><b><u>S + T</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan SDM, potensi SDA yang dimiliki dan posisi</li></ol>	<p><b><u>W + T</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memaksimalkan sumberdaya yang ada secara efektif</li></ol>





<p>2. Pemberlakuan Zona Bebas Perdagangan dapat memberikan tekanan terhadap pasar.</p> <p>3. Arus informasi negatif akibat perkembangan teknologi informasi;</p> <p>4. Perubahan lingkungan hidup dan pemanasan global berpengaruh pada aspek kesejahteraan masyarakat;</p> <p>5. Angka kriminalitas, gangguan kamtibmas yang tidak segera ditangani berpengaruh pada stabilitas wilayah.</p>	<p>geografis yang strategis berupaya mengatasi permasalahan pembangunan dengan berpegang teguh pada nilai kearifan lokal dalam menetralsir budaya/ teknologi informasi negatif yang masuk;</p> <p>2. Menciptakan kondisi politik dan ekonomi yang kondusif dengan keberagaman budaya masyarakat yang ada;</p> <p>3. Mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan.</p>	<p>dan efisien dalam meminimalisir pengaruh negatif akibat arus globalisasi;</p> <p>2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha masyarakat untuk meminimalisir pengaruh global;</p> <p>3. Mendorong penyediaan tenaga kerja lokal yang handal dan berdaya saing dalam menghadapi persaingan global;</p> <p>4. Mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan;</p> <p>5. Peningkatan karakter masyarakat melalui pendidikan moral dan wawasan kebangsaan untuk menyaring budaya negatif dari arus globalisasi.</p>
---	---	--



**B A B V**

**V I S I , M I S I ,  
T U J U A N D A N S A S A R A N**

---

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019**



## BAB V

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, bahwa RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan tahap kedua pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, visi misi dalam RPJMD harus mempunyai keterkaitan dengan visi RPJPD yaitu "Kabupaten Kubu Raya Mandiri dan Sejahtera" dengan Misi:

1. Meningkatkan masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia, religius, bertoleransi, berbudaya yang tinggi, mengembangkan modal sosial dan nilai kearifan lokal, serta meningkatkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, mengembangkan penelitian, mendorong inovasi, kreativitas dan kemandirian daerah di berbagai bidang, serta meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas kinerja aparatur pemerintahan, mengefektifkan reformasi birokrasi, menerapkan *Good Governance* dan *Clean Government*;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, agroindustri, teknologi, jasa, kemitraan, dan meningkatkan sarana, prasarana, infrastruktur wilayah yang merata dan berkualitas, serta memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.

Dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya 2014-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018, RPJMN 2010-2014, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 sebagai berikut:



### 5.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing”.**

Visi Pembangunan Jangka Menengah tersebut dapat dijelaskan bahwa :

**Maju**, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki kemajuan dibidang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.

**Harmonis dan Berbudaya**, adalah masyarakat Kabupaten Kubu Raya memiliki nilai-nilai luhur saling menghormati keberagaman, memiliki ahlak mulia dan didukung tata kelola pemerintahan yang baik.

**Memiliki Daya Saing**, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki keunggulan komparatif dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dengan didukung kemampuan ekonomi daerah, sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur wilayah yang memadai dan iklim investasi yang kondusif.

### 5.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kubu Raya tahun 2015-2019, dirumuskan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*Good Governance*);
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreativitas;
3. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah;
4. Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat.



### **Penjelasan masing-masing Misi:**

#### **Misi Pertama : Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa (*Good Governance*)**

Misi ini merupakan pilar utama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah, dimana upaya pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan dukungan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaannya, yang diwujudkan melalui reformasi birokrasi.

Pembangunan pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik merupakan upaya yang perlu didorong untuk menunjang terwujudnya Kabupaten Kubu Raya sebagai kabupaten yang maju dan berdaya saing dimasa depan.

Secara umum reformasi birokrasi mencakup penataan kelembagaan, sumberdaya aparatur, tata laksana dan manajemen, akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja produktif, efektif dan efisien dengan koordinasi dan integrasi yang terlaksana dengan baik serta menciptakan harmonisasi baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

#### **Misi Kedua : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreativitas**

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya, disamping itu juga untuk memperkuat daya saing daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan mendorong dan memperkuat pembangunan di bidang sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pemenuhan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan penguatan daya saing daerah yang didukung oleh kondisi yang aman dan damai, persebaran penduduk yang merata, mengatasi kesenjangan wilayah serta pemerataan pembangunan di segala bidang.



### **Misi Ketiga : Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah**

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kubu Raya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dengan memanfaatkan secara efektif keunggulan komparatif masing-masing wilayah dengan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumberdaya lokal serta meningkatkan kemandirian dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan hidup.

### **Misi Keempat : Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat**

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Kubu Raya dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana layanan dasar guna mendukung pembangunan di bidang sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi publik untuk bersama-sama pemerintah dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik.

Pembangunan sarana dan prasarana akan diwujudkan dengan memperhatikan tata ruang wilayah, potensi wilayah dan sebaran penduduk serta kondisi geografis dengan mengedepankan skala prioritas, kemampuan pembiayaan, daya manfaat dan tingkat keterdesakan.

### **5.3. Tujuan dan Sasaran Misi-Misi**

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.

Bahwa tujuan umum pembangunan Kabupaten Kubu Raya untuk 5 (lima) tahun ke depan pada dasarnya adalah untuk mencapai standar kehidupan masyarakat yang lebih baik, yaitu:



1. Kabupaten yang memiliki masyarakat cerdas, berkemampuan ekonomi yang memadai, dapat mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi;
2. Kabupaten yang memiliki tingkat toleransi masyarakat yang baik dan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif;
3. Kabupaten yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan didukung dengan sumberdaya aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik;
4. Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di tingkat Regional Kalimantan Barat;
5. Kabupaten yang mampu memanfaatkan sumberdaya alam dengan berwawasan lingkungan;
6. Kabupaten yang mampu mengembangkan diri menjadi pusat perdagangan dan jasa;
7. Kabupaten yang memiliki konektivitas antar wilayah yang memadai.

Untuk mencapai standar kehidupan masyarakat yang lebih baik sebagaimana di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan sesuai masing-masing misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Misi Pertama : Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa (*Good Governance*)**

**Tujuan:**

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima.

**Sasaran:**

1. Terwujudnya Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien;
3. Meningkatnya kapasitas SKPD penyelenggara pelayanan publik.



**Misi Kedua : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berakhlak  
Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreativitas**

**Tujuan:**

1. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat;
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan peran stakeholder dalam pelestarian budaya;
4. Meningkatkan kualitas pembinaan keagamaan.

**Sasaran:**

1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat;
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat;
3. Meningkatkan kepedulian stakeholder terhadap pelestarian budaya dan peningkatan kreativitas;
4. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama.

**Misi Ketiga : Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi  
sesuai Potensi Wilayah**

**Tujuan:**

1. Meningkatkan perekonomian daerah;
2. Meningkatkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup.

**Sasaran:**

1. Terwujudnya perekonomian daerah yang mempunyai daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
2. Meningkatnya investasi penanaman modal daerah;
3. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Tersedianya ketahanan pangan yang berkelanjutan;
6. Terjaganya kualitas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.





**Misi Keempat : Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana  
Layanan Dasar Masyarakat**

**Tujuan:**

1. Menyediakan infrastruktur wilayah yang layak;
2. Membangun perumahan dan sanitasi lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni;
3. Mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan cakupan layanan persampahan.

**Sasaran:**

1. Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya
2. Tersedianya infrastruktur energi yang layak dan merata;
3. Tersedianya layanan air bersih yang memadai dan pengelolaan air limbah yang baik;
4. Terbangunnya kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni;
5. Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya;
6. Terkendalinya pemanfaatan ruang;
7. Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan.



**Tabel 5.1**  
**KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**  
**KABUPATEN KUBU RAYA**

<b>Visi : “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya serta Memiliki Daya Saing”</b>		
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<b>Misi 1 : Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (Good Governance)</b>	1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik	1. Terwujudnya Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik
		2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
	2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya kapasitas SKPD penyelenggara pelayanan publik
<b>Misi 2 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreativitas</b>	1. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat	1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat
	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat
	3. Meningkatkan peran <i>stakeholder</i> dalam pelestarian budaya	1. Meningkatkan kepedulian <i>stakeholder</i> terhadap pelestarian budaya dan peningkatan kreativitas
	4. Meningkatkan kualitas pembinaan keagamaan	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama
<b>Misi 3 : Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah</b>	1. Meningkatkan perekonomian daerah	1. Terwujudnya perekonomian daerah yang mempunyai daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi



Misi	Tujuan	Sasaran
		2. Meningkatnya investasi penanaman modal daerah
		3. Meningkatnya pendapatan masyarakat
	2. Meningkatkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup	1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
		2. Tersedianya ketahanan pangan yang berkelanjutan
		3. Terjaganya kualitas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup
<b>Misi 4 : Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat</b>	1. Menyediakan infrastruktur wilayah yang layak	1. Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya
		2. Tersedianya infrastruktur energi yang layak dan merata
		3. Tersedianya layanan air bersih yang memadai dan pengelolaan air limbah yang baik
	2. Membangun perumahan dan sanitasi lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni	1. Terbangunnya kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni



<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
	3. Mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan	1. Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya
		2. Terkendalinya pemanfaatan ruang
	4. Meningkatkan cakupan layanan persampahan	1. Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan



**B A B   V I**  
**S T R A T E G I   D A N**  
**A R A H   K E B I J A K A N**

---

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**  
**Kabupaten Kubu Raya 2014-2019**



## BAB VI

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya 2014-2019, perlu perubahan secara mendasar, terencana dan terukur. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik.

#### 6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Adapun strategi yang digunakan untuk menjalankan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dirumuskan sebagai berikut:

**Misi Pertama : Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa (*Good Governance*)**

**Strategi:**

1. Meningkatkan sumberdaya aparatur yang berkualitas dan professional;
2. Mendorong keterlibatan dan peran serta aktif *stakeholder* dalam proses perencanaan pembangunan;



3. Mengembangkan kapasitas dan mengefektifkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara pelayanan publik;
4. Menyediakan akses layanan pengaduan yang cepat.

**Misi Kedua :Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreativitas**

**Strategi:**

1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan;
3. Mengembangkan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan daerah;
4. Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan;
5. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
6. Peningkatan kualitas layanan kesehatan;
7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam melestarikan seni dan budaya;
8. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
9. Meningkatkan kehidupan keagamaan dan toleransi antar umat beragama;

**Misi Ketiga : Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah**

**Strategi:**

1. Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif;
2. Peningkatan kemitraan usaha koperasi/usaha kecil, menengah dan besar dalam menunjang ekonomi kreatif masyarakat;
3. Pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya wilayah dan investasi untuk menunjang perekonomian daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
4. Peningkatan kualitas pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing daerah;
5. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha;



6. Peningkatan dan pemerataan pembangunan melalui percepatan pengembangan kawasan strategis yang berkelanjutan;
7. Pengelolaan potensi sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian dengan fungsi lingkungan hidup;
8. Peningkatan ketersediaan akses, kualitas dan ketahanan pangan;
9. Peningkatan revitalisasi pertanian dan pengembangan pusat agrobisnis dan agroindustri;
10. Peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
11. Pengendalian pencemaran dan perusakan kualitas lingkungan hidup.

**Misi Keempat: Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat**

**Strategi:**

1. Meningkatkan pelayanan penyediaan sarana prasarana transportasi;
2. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi;
3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana sanitasi lingkungan;
4. Meningkatkan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman;
5. Menetapkan rencana umum dan rencana rinci Kabupaten Kubu Raya;
6. Mengedepankan pembangunan berperspektif lingkungan;
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam penataan ruang;
8. Perlindungan kawasan Ruang Terbuka Hijau dalam tata ruang;
9. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
10. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan;
11. Peningkatan kapasitas personil pengolahan persampahan;

**6.2. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.





Penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan proses pendefinisian visi dan misi untuk memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah agar lebih terarah kepada pencapaian tujuan daerah. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

**Misi Pertama : Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa (*Good Governance*)**

**Arah Kebijakan:**

1. Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur teknis dan fungsional;
2. Pengkajian dan evaluasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD);
3. Penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi;
4. Memberikan porsi pembiayaan pembangunan berbasis perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis secara proporsional dan akuntabel;
5. Memberikan akses informasi sistem perencanaan pembangunan berbasis Informasi Teknologi (IT);
6. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik;
7. Mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Peningkatan pelayanan publik yang kompeten dan berorientasi pada pemanfaatan IT dalam proses kerja;
9. Membentuk unit layanan pengaduan yang responsive dan akuntabel;
10. Memberikan kemudahan/fasilitasi dalam pelayanan pengaduan dan pelayanan publik.

**Misi Kedua : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreativitas**

**Arah Kebijakan:**

1. Melaksanakan Wajib Belajar 9 Tahun dan Perintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat;
2. Pemenuhan hak-hak pendidikan bagi siswa miskin;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak;
4. Pemerataan jumlah sekolah;



5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik;
6. Menempatkan tenaga pendidik berkualitas secara merata;
7. Membangun sekolah kejuruan;
8. Menyediakan sarana penunjang/fasilitas bagi sekolah kejuruan;
9. Memberikan insentif pendidikan bagi penduduk miskin;
10. Mengkampanyekan pentingnya pendidikan;
11. Menerapkan Jaminan Perlindungan Sosial terhadap masyarakat;
12. Membangun Rumah Sakit Umum Daerah;
13. Mengembangkan dan meningkatkan puskesmas rawat inap;
14. Memperkuat dan mengembangkan kelembagaan desa siaga;
15. Menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di pedesaan;
16. Meningkatkan kualitas surveillance berbasis masyarakat;
17. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB Mandiri;
18. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
19. Meningkatkan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat;
20. Mengembangkan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit;
21. Meningkatkan dan melestarikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat;
22. Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan seni budaya yang kreatif;
23. Meningkatkan kegiatan keagamaan masyarakat;
24. Membina kerukunan kehidupan beragama;
25. Mengembangkan lembaga pembina keagamaan;
26. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder keagamaan;
27. Memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana keagamaan.



**Misi Ketiga : Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi  
Sesuai Potensi Wilayah**

**Arah Kebijakan:**

1. Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah;
2. Mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat berbasis potensi lokal masyarakat;
3. Meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah;
4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif;
5. Meningkatkan akses pemodalannya bagi UMKM dan koperasi;
6. Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi, jaringan pemasaran dan penggunaan teknologi tepat guna;
7. Memfasilitasi pemenuhan standart mutu dan label halal bagi produk UMKM dan koperasi;
8. Mempermudah proses perizinan;
9. Meningkatkan infrastruktur perekonomian daerah;
10. Menginventarisasi dan mengembangkan potensi sumber daya wilayah dan produk unggulan daerah;
11. Meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja;
12. Meningkatkan dan mengembangkan diversifikasi usaha;
13. Mengembangkan dan meningkatkan manajemen pelaku usaha untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah;
14. Mengembangkan usaha-usaha ekonomi kreatif bagi masyarakat;
15. Mengembangkan kawasan-kawasan sentra industri;
16. Memperluas lapangan pekerjaan dan berusaha;
17. Mengembangkan pemanfaatan tata ruang kawasan potensi ekonomi cepat tumbuh berbasis daya dukung lingkungan;
18. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung percepatan pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi cepat tumbuh;
19. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;



20. Melakukan perlindungan/konservasi terhadap Sumber Daya Alam yang rawan kepunahan;
21. Meningkatkan ketersediaan kualitas pangan dan cadangan pangan yang berkelanjutan;
22. Meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian
23. Membangun dan meningkatkan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan;
24. Mengembangkan kawasan budi daya untuk ketahanan pangan;
25. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan;
26. Mengembangkan sentra-sentra produksi hasil pertanian;
27. Mengembangkan kawasan agropolitan dan agroindustri;
28. Membangun infrastruktur pendukung kawasan pusat agrobisnis dan agroindustri;
29. Mengembangkan kawasan produksi kelautan dan perikanan;
30. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi kelautan dan perikanan;
31. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan serta kesejahteraan nelayan;
32. Menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
33. Meningkatkan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup
34. Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup;
35. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

**Misi Keempat: Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana  
Layanan Dasar Masyarakat**

**Arah Kebijakan:**

1. Pengembangan sistem sarana dan prasarana transportasi terpadu untuk mendukung pertumbuhan wilayah;
2. Peningkatan aksesibilitas pusat-pusat permukiman;
3. Peningkatan akses dan membuka isolasi wilayah sebagai sentra produksi dan akses pasar;



4. Pengembangan, peningkatan dan fasilitasi penyediaan prasarana dan layanan komunikasi dan informasi;
5. Pengembangan jaringan listrik PLN bagi daerah yang masih terisolir;
6. Pengembangan energi alternatif dari potensi setempat dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan;
7. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih yang merata dan berkualitas;
8. Pengembangan, pengolahan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana air limbah;
9. Pengembangan dan perlindungan sumber-sumber air baku untuk air bersih;
10. Menyediakan, membangun, meningkatkan dan memelihara infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman;
11. Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni;
12. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman;
13. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan;
14. Peningkatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
15. Peningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
16. Penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan;
17. Penguatan kelembagaan koordinasi penataan ruang dan pemberdayaan masyarakat;
18. Penetapan ruang terbuka hijau;
19. Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
20. Pembangunan tempat penampungan sampah sementara yang representative;
21. Pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) persampahan yang layak;
22. Penambahan, pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan
23. Pengembangan pengolahan persampahan sebagai sumberdaya ekonomi;



24. Penambahan petugas pengelola persampahan;
25. Memberikan jaminan dan perlindungan sosial dan kesejahteraan petugas pengelola persampahan.

**Tabel 6.1**  
**ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN RPJMD KABUPATEN KUBU RAYA**  
**2014-2019**

Tahun					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar serta Sarana Prasarana Pemerintahan	Peningkatan dan Pemantapan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat	Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah	Peningkatan Keunggulan dan Daya Saing Daerah

Untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD tahap kedua Kabupaten Kubu Raya 2014-2019, dibuat arah kebijakan tahunan yang akan menjadi tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama periode RPJMD kedua berlangsung. Dalam periode tersebut pentahapan pembangunan disusun dengan rencana dimana pada tahun 2014 masih merupakan penyelesaian tahapan pembangunan periode terakhir dalam RPJMD tahap pertama. Namun dalam periode ini sudah disertai pelaksanaan tata kelola pemerintahan untuk RPJMD kedua, mengingat masa akhir jabatan Bupati berakhir pada bulan Pebruari 2014.

Pada tahun 2015 arah kebijakan pembangunan sebagian masih mengacu pada RPJMD tahap pertama mengingat RKPD 2015 disusun sebelum RPJMD kedua ditetapkan dengan juga memperhatikan prioritas pembangunan RPJMD Propinsi Kalimantan Barat, sehingga fokus pembangunan ditujukan pada peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar serta pemenuhan infrastruktur pemerintahan Kabupaten Kubu Raya sebagai kabupaten baru.

RKPD tahun 2016 fokus pembangunan ditujukan pada peningkatan Infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antar wilayah. Ditahun ini juga sudah mulai dilakukan peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat yang mencakup urusan pendidikan, kesehatan dan lingkungan sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Kubu Raya.



Selanjutnya pada tahun 2017 pembangunan infrastruktur wilayah dan prasarana umum lain masih terus ditingkatkan yang disertai dengan peningkatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor sektor unggulan di Kabupaten Kubu Raya terkait pertanian, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap serta industri dan usaha mikro kecil dan menengah.

Pada tahun 2018 dalam rangka memberikan akselerasi pada pertumbuhan ekonomi dilakukan pembangunan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan sentra-sentra ekonomi unggulan di Kabupaten Kubu Raya khususnya pada kawasan kawasan strategis kabupaten, meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan agro industri, kawasan industri hilir dan sentra perdagangan. Hal ini dilakukan dengan harapan terjadi peningkatan nilai tambah pada usaha-usaha ekonomi berbasis masyarakat, investasi dan dunia usaha.

Pada akhir RPJMD kedua di tahun 2019 diharapkan target-target prioritas pembangunan jangka menengah sebagian besar sudah dapat dicapai sehingga dapat dilakukan upaya-upaya peningkatan pada semua aspek prioritas yang mencakup perbaikan Indeks Pembangunan Manusia dan infrastruktur wilayah sehingga dapat memberikan daya tarik dan nilai tambah bagi Kabupaten Kubu Raya untuk menjadi tujuan investasi yang kondusif dan tempat hunian yang didukung oleh infrastruktur wilayah yang memadai.

### **6.3. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Hubungan antara misi, tujuan dan sasaran dengan strategi dan arah kebijakan dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:



Tabel 6.2

**KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015-2019**

<b>VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG MAJU, HARMONIS DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI DAYA SAING</b>			
<b>MISI I : MEWUJUDKAN SISTEM DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BAIK DAN BERWIBAWA (GOOD GOVERNANCE)</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik	1. Terwujudnya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik	1. Meningkatkan sumberdaya aparatur yang berkualitas dan profesional	1. Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur teknis dan fungsional 2. Pengkajian dan evaluasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) 3. Peningkatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi
	2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien	1. Mendorong keterlibatan dan peran serta aktif stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan	1. Memberikan porsi pembiayaan pembangunan berbasis perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis secara proporsional dan akuntabel 2. Memberikan akses informasi sistem perencanaan pembangunan berbasis Informasi Teknologi (IT)
2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima	1. Meningkatkan kapasitas SKPD penyelenggara pelayanan publik	1. Mengembangkan kapasitas dan mengefektifkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara pelayanan publik	1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
			2. Mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat	1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat	2. Menyediakan akses layanan pengaduan yang cepat	<p>3. Peningkatan pelayanan publik yang kompeten dan berorientasi pada pemanfaatan IT dalam proses kerja</p> <p>1. Membentuk unit layanan pengaduan yang responsive dan akuntabel</p> <p>2. Memberikan kemudahan/fasilitas dalam pelayanan pengaduan dan pelayanan publik</p>
<b>MISI II : MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, BERKUALITAS DAN MEMILIKI KREATIVITAS</b>			
1. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat	1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat	<p>1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat</p> <p>2. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan</p>	<p>1. Melaksanakan Wajib Belajar 9 Tahun dan Perintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat</p> <p>2. Memenuhi hak-hak pendidikan bagi siswa miskin</p> <p>3. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak</p> <p>4. Pemerataan jumlah sekolah</p> <p>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik</p> <p>2. Menempatkan tenaga pendidik berkualitas secara merata</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Mengembangkan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan daerah</li><li>4. Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membangun sekolah kejuruan</li><li>2. Menyediakan sarana penunjang/fasilitas bagi sekolah kejuruan</li><li>1. Memberikan insentif pendidikan bagi penduduk miskin</li><li>2. Mengkampanyekan pentingnya pendidikan</li></ol>
<ol style="list-style-type: none"><li>2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Jaminan Perlindungan Sosial terhadap masyarakat</li><li>2. Membangun Rumah Sakit Umum Daerah</li><li>3. Mengembangkan dan meningkatkan puskesmas rawat inap</li><li>4. Memperkuat dan mengembangkan kelembagaan desa siaga</li><li>5. Menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Pedesaan</li><li>6. Meningkatkan kualitas surveillance berbasis masyarakat</li><li>7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB Mandiri</li><li>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.</li></ol>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat</li> <li>Mengembangkan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit</li> </ol>
3. Meningkatkan peran <i>stakeholder</i> dalam pelestarian budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kepedulian <i>stakeholder</i> terhadap pelestarian budaya dan peningkatan kreativitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan keimbagaan dalam melestarikan seni dan budaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan dan melestarikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.</li> <li>Meningkatkan dan mengembangkan kelebagaan seni budaya yang kreatif</li> </ol>
4. Meningkatkan kualitas pembinaan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas kehidupan beragama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kegiatan keagamaan masyarakat</li> <li>Membina kerukunan kehidupan beragama</li> <li>Mengembangkan lembaga Pembina keagamaan</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kehidupan keagamaan dan toleransi antar umat beragama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> keagamaan</li> <li>Memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana keagamaan</li> </ol>
<b>MISI III : MEMBANGUN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI SESUAI POTENSI WILAYAH</b>			
1. Meningkatkan perekonomian daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya perekonomian daerah yang mempunyai daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah</li> <li>Mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat berbasis potensi lokal masyarakat</li> </ol>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		<p>2. Peningkatan kemitraan usaha koperasi/usaha kecil, menengah dan besar dalam menunjang ekonomi kreatif masyarakat</p>	<p>3. Meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah</p> <p>4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif</p> <p>1. Meningkatkan akses pemodalanan bagi UMKM dan koperasi</p> <p>2. Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi, jaringan pemasaran dan penggunaan teknologi tepat guna</p> <p>3. Memfasilitasi pemenuhan standart mutu dan label halal bagi produk UMKM dan koperasi</p>
2. Meningkatkan investasi penanaman modal daerah		<p>1. Pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya wilayah dan investasi untuk menunjang perekonomian daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru</p> <p>2. Peningkatan kualitas pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing daerah</p>	<p>1. Mempermudah proses perizinan</p> <p>2. Meningkatkan infrastruktur perekonomian daerah</p> <p>3. Menginventarisasi dan mengembangkan potensi sumber daya wilayah dan produk unggulan daerah</p> <p>1. Meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja</p> <p>2. Meningkatkan dan mengembangkan diversifikasi usaha</p> <p>3. Mengembangkan dan meningkatkan manajemen pelaku usaha untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah</p>
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat		1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	1. Mengembangkan usaha-usaha ekonomi kreatif bagi masyarakat



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
2. Meningkatkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup	1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	1. Peningkatan dan pemerataan pembangunan melalui percepatan pengembangan kawasan strategis yang berkelanjutan  2. Pengelolaan potensi sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian dengan fungsi lingkungan hidup	2. Mengembangkan kawasan-kawasan sentra industri 3. Memperluas lapangan pekerjaan dan berusaha
			1. Mengembangkan pemanfaatan tata ruang kawasan potensi ekonomi cepat tumbuh berbasis daya dukung lingkungan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung percepatan pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi cepat tumbuh
	2. Tersedianya ketahanan pangan yang berkelanjutan	1. Peningkatan ketersediaan akses, kualitas dan ketahanan pangan  2. Peningkatan revitalisasi pertanian dan pengembangan pusat agribisnis	1. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan 2. Melakukan perlindungan/konservasi terhadap Sumber Daya Alam yang rawan kepunahan
			1. Meningkatkan ketersediaan kualitas pangan dan cadangan pangan yang berkelanjutan 2. Meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian 3. Membangun dan meningkatkan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan 4. Mengembangkan kawasan budi daya untuk ketahanan pangan
			1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		dan agroindustri	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan sentra-sentra produksi hasil pertanian</li> <li>3. Mengembangkan kawasan agropolitan dan agroindustri</li> <li>4. Membangun infrastruktur pendukung kawasan pusat agrobisnis dan agroindustri</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kawasan produksi kelautan dan perikanan</li> <li>2. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi kelautan dan perikanan</li> <li>3. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan serta kesejahteraan nelayan</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Terjaganya kualitas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pencemaran dan perusakan kualitas lingkungan hidup</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</li> <li>2. Meningkatkan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>4. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup</li> </ol>
<p><b>MISI IV : MENJAMIN KETERSEDIAAN SARANA, PRASARANA LAYANAN DASAR MASYARAKAT</b></p>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan Infrastruktur Wilayah yang layak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan budaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelayanan penyediaan sarana prasarana transportasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem sarana dan prasarana transportasi terpadu untuk mendukung pertumbuhan wilayah</li> <li>2. Peningkatan aksesibilitas pusat-pusat permukiman</li> </ol>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
2. Membangun perumahan dan sanitasi lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni	1. Tersedianya infrastruktur energi yang layak dan merata  2. Tersedianya layanan air bersih yang memadai dan pengelolaan air limbah yang baik	1. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi  1. Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana sanitasi lingkungan	3. Peningkatan akses dan membuka isolasi wilayah sebagai sentra produksi dan akses pasar  4. Pengembangan, peningkatan dan fasilitasi penyediaan prasarana dan layanan komunikasi dan informasi  1. Pengembangan jaringan listrik PLN bagi daerah yang masih terisolir 2. Pengembangan energi alternatif dari potensi setempat dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan
2. Membangun perumahan dan sanitasi lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni	1. Terbangunnya kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni	1. Meningkatkan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman	1. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih yang merata dan berkualitas 2. Pengembangan, pengolahan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana air limbah 3. Pengembangan dan perlindungan sumber-sumber air baku untuk air bersih  1. Menyediakan, membangun, meningkatkan dan memelihara infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman. 2. Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
3. Mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan	1. Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya	1. Menetapkan rencana umum dan rancangan rinci Kabupaten Kubu Raya 2. Mengedepankan pembangunan berperspektif lingkungan	3. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman 1. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan 1. Peningkatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 3. Penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan
4. Meningkatkan cakupan layanan persampahan	2. Terkendalinya pemanfaatan ruang 1. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan	3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam penataan ruang 4. Perlindungan kawasan Ruang Terbuka Hijau dalam tata ruang 1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang 1. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	1. Penguatan kelembagaan koordinasi penataan ruang dan pemberdayaan masyarakat 1. Penetapan ruang terbuka hijau 1. Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang 1. Pembangunan tempat penampungan sampah sementara yang representatif 2. Pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) persampahan yang layak





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			3. Penambahan, pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan
			4. Pengembangan pengolahan persampahan sebagai sumberdaya ekonomi
		2. Peningkatan kapasitas personil pengolahan persampahan	1. Penambahan petugas pengelola persampahan
			2. Memberikan jaminan dan perlindungan sosial dan kesejahteraan petugas pengelola persampahan



**B A B   V I I**

**K E B I J A K A N   U M U M   D A N**  
**P R O G R A M   P E M B A N G U N A N**  
**D A E R A H**

---

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**  
**Kabupaten Kubu Raya 2014-2019**



## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **7.1. Kebijakan Umum Pembangunan**

Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Kubu Raya setelah dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai dengan target kinerja yang akan dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan. Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan resume dari semua arah kebijakan pembangunan yang dipilih, sementara program prioritas merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang terkait langsung dengan pelaksanaan visi dan misi RPJMD. Kebijakan umum dan program-program pembangunan daerah tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan visi dan misi dan prioritas daerah yang dituangkan ke dalam pelaksanaan semua urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya dalam 5 (lima) tahun mendatang secara umum diarahkan pada melanjutkan program pembangunan lima tahun sebelumnya, khususnya pada capaian sasaran pembangunan yang belum tercapai serta perlu mendapat perhatian lebih. Dan, sasaran yang telah tercapai untuk ditingkatkan dan dilanjutkan dalam pembangunan lima tahun ke depan.

Adapun kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar serta Sarana Prasarana Pemerintahan;
3. Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat;
4. Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
5. Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi sesuai Potensi Wilayah;
6. Peningkatan Keunggulan dan Daya Saing Daerah.



## **7.2. Prioritas Pembangunan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi pembangunan daerah yang ingin dicapai hingga lima tahun ke depan, maka disusun 3 (tiga) aspek yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 - 2019 yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) prioritas/fokus pembangunan. Adapun 3 (tiga) aspek dan 8 (delapan) prioritas/fokus pembangunan Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

### **A. Aspek Maju**

1. Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan
2. Peningkatan Kesejahteraan
3. Peningkatan Infrastruktur

### **B. Aspek Harmonis dan Berbudaya**

1. Peningkatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa
2. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya dan Mental Spiritual

### **C. Aspek Daya Saing**

1. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah
3. Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif

Penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya disesuaikan dengan kondisi daerah serta mengacu kepada Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional.

Adapun Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

### **A. Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, adalah sebagai berikut:**

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan



3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim investasi dan Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Disamping 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, terdapat 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional lainnya, yakni:

- a. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- b. Bidang Perekonomian
- c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

**B. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut:**

1. Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat, yang terbagi ke dalam 10 (sepuluh) fokus prioritas, yakni:
  - Fokus Prioritas Revitalisasi Pertanian
  - Fokus Prioritas Revitalisasi Perkebunan
  - Fokus Prioritas Revitalisasi Bidang Perikanan dan Kelautan
  - Fokus Prioritas Revitalisasi Peternakan
  - Fokus Prioritas Revitalisasi Kehutanan
  - Fokus Prioritas Revitalisasi Industri
  - Fokus Prioritas Penguatan Perdagangan
  - Fokus Prioritas Pembangunan Kepariwisata
  - Fokus Prioritas Pengembangan Koperasi dan UMKM
  - Fokus Prioritas Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral



- Fokus Prioritas Pembangunan Lingkungan Hidup
- 2. Meningkatnya Kecerdasan Sumber Daya Manusia, yang terbagi ke dalam 1 (satu) fokus prioritas, yakni:
  - Fokus Prioritas Peningkatan Keterampilan Masyarakat
- 3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, yang terbagi ke dalam 2 (dua) fokus prioritas, yakni:
  - Fokus Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan
  - Fokus Prioritas Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- 4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik, yang terbagi ke dalam 2 (dua) fokus prioritas, yakni:
  - Fokus Prioritas Peningkatan Sumber Daya Aparatur
  - Fokus Prioritas Restrukturisasi Organisasi dan Perangkatnya
- 5. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) fokus prioritas, yakni:
  - Fokus Prioritas Peningkatan Sarana dan Prasarana
  - Fokus Prioritas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
  - Fokus Prioritas Program Khusus
- 6. Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) fokus prioritas, yakni:
  - Fokus Prioritas Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM
  - Fokus Prioritas Peningkatan Pengelolaan PAD
  - Fokus Prioritas Peningkatan Sumber Pendanaan Dekonsentrasi
- 7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) fokus prioritas, yakni:
  - Fokus Prioritas Peningkatan Iklim dan Suasana Kondusif
  - Fokus Prioritas Peningkatan Kerukunan Beragama
  - Fokus Prioritas Peningkatan Ketahanan Budaya

Sedangkan keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Kubu Raya, Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Prioritas Pembangunan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 7.1**  
**KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN**

<b>PRIORITAS</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD KABUPATEN KUBU RAYA 2014-2019</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2013-2018</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJM NASIONAL 2010-2014</b>
1	Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan	<b>Prioritas 1</b> , Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat; <b>Prioritas 2</b> , Meningkatnya Kecerdasan Sumber Daya Manusia; <b>Prioritas 3</b> , Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	<b>Prioritas 2</b> , Pendidikan; <b>Prioritas 3</b> , Kesehatan; <b>Prioritas b</b> , Bidang Perekonomian
2	Peningkatan Kesejahteraan	<b>Prioritas 1</b> , Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat	<b>Prioritas c</b> , Bidang Kesejahteraan Rakyat
3	Peningkatan Infrastruktur	<b>Prioritas 5</b> , Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar	<b>Prioritas 6</b> , Infrastruktur; <b>Prioritas 8</b> , Energi
4	Peningkatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa	<b>Prioritas 4</b> , Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik	<b>Prioritas 1</b> , Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
5	Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya dan Mental Spiritual	<b>Prioritas 7</b> , Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya	<b>Prioritas 11</b> , Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi; <b>Prioritas a</b> , Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
6	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	<b>Prioritas 1</b> , Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat	<b>Prioritas 5</b> , Ketahanan Pangan; <b>Prioritas 9</b> , Lingkungan Hidup dan Bencana
7	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah	<b>Prioritas 1</b> , Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat; <b>Prioritas 2</b> , Meningkatnya Kecerdasan Sumber Daya Manusia; <b>Prioritas 6</b> , Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan	<b>Prioritas 4</b> , Penanggulangan Kemiskinan; <b>Prioritas 7</b> , Iklim dan Investasi Usaha; <b>Prioritas b</b> , Bidang Perekonomian
8	Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	<b>Prioritas 6</b> , Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan; <b>Prioritas 7</b> , Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya	<b>Prioritas 7</b> , Iklim dan Investasi Usaha; <b>Prioritas b</b> , Bidang Perekonomian



### **7.3. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019**

Adapun program-program prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dalam mendukung 8 (delapan) fokus/prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

#### **A. Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan**

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
8. Program Penyediaan Operasional Sekolah
9. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Pendidikan
10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
12. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
13. Program Penyehatan Lingkungan
14. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
16. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
17. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
18. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
19. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
20. Program Keluarga Berencana
21. Program Pelayanan Kontrasepsi





22. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
23. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
24. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
25. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
26. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
27. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
28. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
29. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
30. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
31. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

#### **B. Peningkatan Kesejahteraan**

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
8. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
11. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
12. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata



### **C. Peningkatan Infrastruktur**

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
6. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
10. Program Pengembangan Perumahan
11. Program Lingkungan Sehat Perumahan
12. Program Perencanaan Tata Ruang
13. Program Pemanfaatan Ruang
14. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
15. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
16. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
17. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (LLAJ)
18. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (LLAJ)
19. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
20. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas (LLAJ)
21. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas (LLAJ)
22. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor (LLAJ)
23. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



24. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
25. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
26. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
27. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

**D. Peningkatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
9. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
10. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
12. Program Penataan Administrasi Kependudukan

**E. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya dan Mental Spiritual**

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6. Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama



**F. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan**

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
10. Program Peningkatan Produksi Pertanian
11. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
12. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
13. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
14. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
15. Program Pemberdayaan Penyuluhan Perikanan
16. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
17. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
18. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
19. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
20. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
21. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan



**G. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah**

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
4. Program Peningkatan Pelayanan Akta Perizinan
5. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perizinan Tertentu
6. Program Pemberdayaan Kecamatan
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
12. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

**H. Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif**

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
4. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perizinan Tertentu
5. Program Penyiapan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal
6. Program Pemberdayaan Kecamatan
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja



10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
12. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah



**B A B   V I I I**

**I N D I K A S I   R E N C A N A**

**P R O G R A M   D A N   K E B U T U H A N**

**P E N D A N A A N**

---

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**  
**Kabupaten Kubu Raya 2014-2019**



## **BAB VIII**

### **INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN**

Pada bab ini akan disampaikan seluruh program pada setiap SKPD, urusan wajib maupun urusan pilihan dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 baik yang bersifat Program Prioritas maupun Program Penunjang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut:

#### **A. PROGRAM PADA SETIAP SKPD**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi/Data Base

#### **B. URUSAN WAJIB**

##### **1. PENDIDIKAN**

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
8. Program Penyediaan Operasional Sekolah





9. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Pendidikan
10. Program Peningkatan Kinerja Sekolah Cerdas
11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

## **2. KESEHATAN**

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
6. Program Penyehatan Lingkungan
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
11. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
12. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
15. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
16. Program Penyusunan Sistem Informasi Kesehatan
17. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

## **3. LINGKUNGAN HIDUP**

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam



5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
7. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan
8. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
9. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

#### **4. PEKERJAAN UMUM**

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
3. Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong
4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
5. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
8. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
9. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
11. Program Pengendalian Banjir
12. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
13. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
14. Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum
15. Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan
16. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air



## **5. PENATAAN RUANG**

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

## **6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

1. Program Pengembangan Data/Informasi
2. Program Kerjasama Pembangunan
3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
5. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
8. Program Perencanaan Sosial Budaya
9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

## **7. PERUMAHAN**

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

## **8. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
4. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
5. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga



## **9. PENANAMAN MODAL DAERAH**

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
4. Peningkatan Pelayanan Akta Perizinan
5. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perizinan Tertentu
6. Program Penyiapan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal

## **10. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5. Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

## **11. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Kependudukan

## **12. KETENAGAKERJAAN**

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan



### **13. KETAHANAN PANGAN**

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

### **14. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

### **15. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

1. Program Keluarga Berencana
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
5. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
6. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
7. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
8. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
10. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
11. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
12. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
13. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KB



14. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Masyarakat Pedesaan

**16. PERHUBUNGAN**

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (LLAJ)
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas (LLAJ)
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (LLAJ)
4. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas (LLAJ)
5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor (LLAJ)
6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
7. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (LLASDP)
8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (LLASDP)
9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (LLASDP)
10. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)
11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor (LLASDP)
12. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan (LLASDP)

**17. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. Program Pengembangan dan Implementasi E-Government
3. Program Implementasi LPSE

**18. PERTANAHAN**

1. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah



3. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
4. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

**19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat
8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
9. Program Kewaspadaan Dini/Daerah
10. Program Penerapan dan Penegakan Hukum Daerah
11. Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana
12. Program Rehabilitasi Pasca Bencana
13. Program Ketahanan Seni, Budaya dan Masyarakat

**20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN**

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten



6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
7. Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
12. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
13. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
14. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
15. Program Penataan Kelembagaan
16. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
17. Program Penataan Kecamatan/Kelurahan
18. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
19. Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama
20. Program Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi
21. Program Pemberdayaan Kecamatan
22. Program Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan Daerah
23. Program Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah.
24. Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
25. Program Peningkatan Kapasitas Camat sebagai Kepala SKPD
26. Program Peningkatan Kinerja Badan Usaha Daerah
27. Program Pendidikan Kedinasan
28. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
29. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
30. Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis
31. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur





## **21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan ADD
8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan PNPM
9. Program Penataan Wilayah Administrasi Desa
10. Program Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Aset Desa
11. Program Pengembangan dan Penatausahaan Administrasi Desa

## **22. SOSIAL**

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
8. Program Keluarga Harapan
9. Program Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan
10. Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial



### **23. KEBUDAYAAN**

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

### **24. STATISTIK**

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

### **25. KEARSIPAN**

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

### **26. PERPUSTAKAAN**

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

## **C. URUSAN PILIHAN**

### **1. KELAUTAN DAN PERIKANAN**

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
3. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
4. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat
5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
7. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan



8. Program Pemberdayaan Penyuluhan Perikanan
9. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
10. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
11. Program Pengembangan Sarana Prasarana Pemasaran Pengolahan Hasil Perikanan
12. Program Pembinaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
13. Program Promosi Perikanan
14. Program Pemberdayaan Pengolahan Hasil Perikanan
15. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan

## **2. PERTANIAN**

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
6. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
7. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
9. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
10. Program Sistem Informasi/Database Pertanian
11. Program Pengembangan Agribisnis
12. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
13. Program Pencapaian Swasembada Daging Berkelanjutan



14. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
15. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
16. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
17. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
18. Program Penciptaan Teknologi Tepat Guna dan Varietas Unggul Spesifik Lokasi

### **3. KEHUTANAN**

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
4. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kehutanan
6. Peningkatan Usaha Kehutanan
7. Program Optimalisasi Produk Hasil Hutan
8. Program Pembangunan Hutan Kota
9. Program Pembangunan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH)
10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Kehutanan

### **4. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi



## **5. PARIWISATA**

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan
4. Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif

## **6. INDUSTRI**

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3. Program Penataan Struktur Industri
4. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

## **7. PERDAGANGAN**

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
5. Program Pengembangan Kelembagaan PKL
6. Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Pedagang di Pasar Tradisional
7. Program Penyelenggaraan Metrologi Legal

## **8. KETRANSMIGRASIAN**

1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2. Program Transmigrasi Lokal
3. Program Transmigrasi Regional



**Tabel 8.1**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM KABUPATEN KABUPATEN KUBU RAYA YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**  
**TAHUN 2014-2019**

NO	NOMOR URUTAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (KYP/COMES)	KORDER TAHUN 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		REKAPITULASI JAWAB
				TARGET	RP (UTA)	TARGET	RP (UTA)	TARGET	RP (UTA)	TARGET	RP (UTA)	TARGET	RP (UTA)	TARGET	RP (UTA)	
1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4	100%	Rp 26.558,16	100%	Rp 26.923,36	100%	Rp 26.917,37	100%	Rp 26.937,82	100%	Rp 26.931,29	100%	Rp 26.931,29	Seluruh SKPD
2	2	Program Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Daya Saing	8%	100%	Rp 30.144,30	100%	Rp 102.430,07	100%	Rp 77.901,81	100%	Rp 98.560,51	100%	Rp 88.671,84	100%	Rp 83.310,26	Seluruh SKPD
3	3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	100%	Rp 1.506,75	100%	Rp 1.853,12	100%	Rp 1.665,50	100%	Rp 1.783,19	100%	Rp 1.988,89	100%	Rp 2.048,66	Seluruh SKPD
4	4	Program Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Daya Saing	100%	100%	Rp 3.582,19	100%	Rp 3.953,20	100%	Rp 4.594,73	100%	Rp 4.058,69	100%	Rp 5.388,64	100%	Rp 5.813,73	Seluruh SKPD
5	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	Rp 2.785,25	100%	Rp 2.785,20	100%	Rp 3.148,03	100%	Rp 3.391,07	100%	Rp 3.659,34	100%	Rp 3.987,89	Seluruh SKPD
6	6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Keunggulan Daerah	-	-	Rp 7.334,55	-	Rp 48.593,91	-	Rp 53.818,11	-	Rp 53.962,24	-	Rp 84.133,89	-	Rp 109.313,18	Seluruh SKPD
7	7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Keunggulan Daerah	-	-	Rp 1.724,41	-	Rp 52.403,87	-	Rp 51.717,79	-	Rp 53.094,85	-	Rp 52.125,13	-	Rp 102.773,76	Seluruh SKPD
8	8	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi/Desa Baku	-	-	Rp 153,95	-	Rp 1.780,00	-	Rp 1.893,48	-	Rp 2.023,73	-	Rp 2.095,00	-	Rp 2.512,85	Seluruh SKPD
9	9	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi/Desa Baku	-	-	Rp 73.809,97	-	Rp 240.729,74	-	Rp 224.888,78	-	Rp 248.309,80	-	Rp 273.814,83	-	Rp 300.778,09	Seluruh SKPD
10	10	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi/Desa Baku	-	-	Rp 848.301,41	-	Rp 844.891,44	-	Rp 894.818,71	-	Rp 898.098,44	-	Rp 928.722,64	-	Rp 984.797,45	Seluruh SKPD
11	11	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi/Desa Baku	70,70%	88%	Rp 1.655,63	89%	Rp 1.738,41	90%	Rp 1.825,33	91%	Rp 1.916,60	92%	Rp 2.012,43	93%	Rp 2.113,05	Dinas Pendidikan
12	12	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	112,04	112	Rp 53.427,45	113	Rp 56.098,82	114	Rp 58.903,76	115	Rp 61.848,95	116	Rp 64.941,40	117	Rp 68.188,47	Dinas Pendidikan
13	13	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi/Desa Baku	90,89	95	Rp 99,80	96	Rp 99,90	97	Rp 99,90	98	Rp 99,90	99	Rp 99,90	100	Rp 99,90	Dinas Pendidikan
14	14	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi/Desa Baku	98,45	99,80	Rp 85	99,90	Rp 85	99,90	Rp 85	99,90	Rp 85	99,90	Rp 85	99,90	Rp 85	Dinas Pendidikan
15	15	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi/Desa Baku	75,71	85	Rp 100	87	Rp 100	89	Rp 100	91	Rp 100	93	Rp 100	95	Rp 100	Dinas Pendidikan
16	16	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi/Desa Baku	99,95	100	Rp 100	100	Rp 100	100	Rp 100	100	Rp 100	100	Rp 100	100	Rp 100	Dinas Pendidikan
17	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi/Desa Baku	97,35	100	Rp 100	100	Rp 100	100	Rp 100	100	Rp 100	100	Rp 100	100	Rp 100	Dinas Pendidikan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR BENTANG PENGANTARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM (PERFORMER)	BENTANG TAMBAH DIMAS	2014		2015		2016		2017		2018		2019		SIFAT PERENCANAAN JANGKA WAKTU
				TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	
1	2	Penerapan Penerapan: Angka Putus sebelum Penyelesaian Dasar SDYNE, SMP/MTA	4	1%	5	0,6%	9	0,4%	11	0,4%	13	0,2%	15	0,1%	17	
7	7	Program Pendidikan Manajemen	7,80	80	Rp 29.909,72	85	90	Rp 32.975,47	95	Rp 34.624,25	100	100	Rp 36.355,46	100	Rp 38.173,25	Dinas Pendidikan
		SMA/SMK/MA/SMALB/PT sistem C														
		Peningkatan AFM SMA/SMK/MA/SMALB/PT sistem C	63,54	69,25		75,25	80					85		90		
		Peningkatan Angka Kehadiran Siswa	94,38			99,98	99,9					99,99		100		
		SMA/SMK/MA/SMALB/PT sistem C														
		Penerapan Penerapan: Angka Putus sebelum Penyelesaian Manajemen (SMA/SMK/MA)	0,14%	1,08%		0,75%	0,50%					0,00%		0,00%		
4	4	Peningkatan Angka Melek Hurst	97,80%	93,45%	Rp 2.082,02	96,00%	96,50%	Rp 2.295,43	96,75%	Rp 2.410,20	99,00%	99,00%	Rp 2.530,71	99,25%	Rp 2.657,25	Dinas Pendidikan
5	5	Program Peningkatan Melek Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	10	Rp 4.713,52	15	20	Rp 5.196,44	25	Rp 5.456,26	30	30	Rp 5.729,08	35	Rp 6.015,53	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik (Berpontasi dan Berkeadilan)	40	50		60	60					70		75		
		Penerapan Peningkatan Guru bertalenta SD/PTD IV	66,37	72,47		77	81					86		94		
6	6	Program Pengembangan Siswa Baru dan Peningkatan Perencanaan			Rp 177,51			Rp 195,70		Rp 205,49			Rp 215,76		Rp 226,55	Dinas Pendidikan, Kantor Arpanas
7	7	Program Manajemen Relayanan Pendidikan	100	100	Rp 261,97	100	100	Rp 286,83	100	Rp 303,27	100	100	Rp 318,43	100	Rp 334,35	Dinas Pendidikan
8	8	Program Penyediaan Operasional Sekolah	60	100	Rp 10.998,89	65	75	Rp 12.126,28	85	Rp 12.732,59	95	95	Rp 13.369,22	100	Rp 14.037,68	Dinas Pendidikan
9	9	Program Pengembangan Sistem Informasi/Datas Base Pendidikan	60	75	Rp 49,25	80	85	Rp 54,39	90	Rp 57,01	100	100	Rp 59,86	100	Rp 62,85	Dinas Pendidikan
10	10	Program Peningkatan Kemaja Sekolah Cerdas	60	70	Rp 177,00	75	80	Rp 195,14	85	Rp 204,90	90	90	Rp 215,14	95	Rp 225,90	Dinas Pendidikan
11	11	Program Pemberdayaan Kebudayaan Keajahteraan Sosial	50	60	Rp 82,50	65	70	Rp 90,96	75	Rp 95,50	80	80	Rp 100,28	85	Rp 105,29	Dinas Pendidikan
		SUB-JUDULAS URUSAN WALID PENDIDIKAN			Rp 108.712,04			Rp 114.147,64		Rp 119.885,02			Rp 126.847,77		Rp 132.140,16	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR PROGRAM DAN PROGRAM	INDIKATOR KEBERJAYA PROGRAM (OUTPUT)	REKORDE TERSEBUT	2014		2015		2016		2017		2018		2019		REKORDE TERSEBUT	DINAS KEMASUKAN
				TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	KESEHATAN																
1	Program Obat dan Perbaikan Kesehatan	Konsumsi Obat Esensial Generik Sensus Kabupaten Di Seluruh Pelayanan Kesehatan Dasar	90%	Rp 4.041,38	Rp 4.436,93	90%	Rp 4.747,51	90%	Rp 5.079,84	90%	Rp 5.435,43	90%	Rp 5.835,43	90%	Rp 6.235,43	Dinas Kesehatan	
		Perawatan kesehatan obat dan vehicle	90%														
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenyuluhan Tenaga Kesehatan Pelayanan Terpadung Bangun Operasional dan Pemeliharaan UPT	235 Orang	Rp 8.538,41	Rp 6.333,19	235 Orang	Rp 6.776,50	235 Orang	Rp 7.230,87	235 Orang	Rp 7.738,44	235 Orang	Rp 8.235,44	235 Orang	Rp 8.738,44	Dinas Kesehatan	
		Jumlah Puskesmas rampung PORSD	3														
		Cakupan Pelayanan Rujukan Masyarakat	17,85%														
		jumlah pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	15,89%														
		Cakupan pengeringan kesehatan siswa SD dan sekitarnya	25,24														
		Cakupan rumah jalan	59%														
		Cakupan pelayanan rumah	100%														
		jumlah Puskesmas dengan BLJED	0														
		Cakupan pelayanan kesehatan dan terpadu dan sangat terpadu	4,50%														
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	meningkatkan SDM pengawasan kesehatan secara menyeluruh	30%	Rp 111,87	Rp 120,86	30%	Rp 129,32	30%	Rp 138,38	30%	Rp 148,08	30%	Rp 158,08	30%	Rp 168,08	Dinas Kesehatan	
		Jumlah IRTP yang di monitoring pengawasan cara produksi pangan yang baik	30%														
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Sagu Aktif	96,70%	Rp 779,65	Rp 483,90	96%	Rp 517,77	96%	Rp 554,01	96%	Rp 592,79	96%	Rp 631,57	96%	Rp 670,33	Dinas Kesehatan	
		Perentase Rumah Tangga ber PHBS	0														
		Jumlah Sarana Kesehatan dengan Media Promosi Standar	60%														
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	Rp 446,02	Rp 290,11	100	Rp 310,42	100	Rp 332,15	100	Rp 355,40	100	Rp 380,15	100	Rp 405,40	Dinas Kesehatan	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

RO	NAMA PROGRAM DAN SUB-PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI TAHUN 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		SATUAN PENGANGGARAN JAWAB
				TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Penyehatan Lingkungan	Cakupan keluarga yang menggunakan Air bersih	65%	Rp 363,50	65,30%	Rp 317,57	65,30%	Rp 360,00	65,30%	Rp 364,04	65,57%	Rp 389,52	65,57%	Rp 416,79	Dinas Kesehatan	
2		Cakupan keluarga yang menggunakan jamban sehat	60%		60%		60%		60%		65,56%		65,56%			
3		Persentase rumah Desa yang telah Melaksanakan STBM	51,43%		51,91%		51,30%		51,30%		53,13%		53,99%			
4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	44%	Rp 2.151,82	60%	Rp 1.442,25	75%	Rp 1.543,28	80%	Rp 1.651,23	85%	Rp 1.766,81	95%	Rp 1.890,49	Dinas Kesehatan	
5		Menurunnya angka kejadian DBD < 1	1,57%		<1%		<1%		<1%		<1%		<1%			
6		Persentase kasus DBD yang dibenarkan dan ditangani	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
7		Persentase Rasyon KLB > 24 Jam (Pengambilan Spondemologi)	75%		84%		85%		88%		90%		96%			
8		Persentase kasus baru TB Paru BTA Positif yang ditemuan	39%		40%		42%		43%		44%		45%			
9		Angka Cakupan penemuan kasus diare pada balita	39,77%		45%		50%		55%		58%		60%			
10		Persentase penemuan dan pengobatan pneumonia balita sesuai standar	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
11		Penurunan Kasus Telenus Neonatorum < 1/ 1000 Kelahiran Hidup	0,4		0,39		<1		<1		<1		<1			
12		Tercapainya cakupan non-pelo AFP Rate 2/ 100.000 penduduk usia < 15 tahun	3,48		2,34		2,2		2,2		2,2		2,2			
13	Program Standartisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas dengan Akreditasi	80	Rp 49,61	80	Rp 38,41	80	Rp 41,10	80	Rp 43,97	80	Rp 47,05	80	Rp 50,35	Dinas Kesehatan	
14	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Rujukan Masyarakat Miskin	17,65%	Rp 5.279,33	20,30%	Rp 5.607,05	23%	Rp 5.999,54	27%	Rp 6.419,51	31%	Rp 6.868,88	36%	Rp 7.349,70	Dinas Kesehatan	
15		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	15,89%		18,47%		21%		24%		28%		32%			
16		Cakupan pelayanan kesehatan dasar terpencil dan sangat terpencil	4,50%		7,21%		9,91%		12,61%		15,32%		18,92%			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	INDIKATOR KEBERLA- PROGRAM (OUTPUT)	KONDISI TASUR 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		REKAP PERANGKUTAN JAWAB 17
			TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	
			6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	4	100%			100%									
2	3	100%													
3	4	2	2	5	Rp 9.401,97	2	Rp 10.060,11								
4	5	2	2	3		3									
5	6	2	6	6		6									
6	7	4	4	2		2									
7	8	7	7	4		4									
8	9	1	1	1		1									
9	10	1	1	2		2									
10	11	1	1	15%	Rp 1.123,61	25%	Rp 1.202,26	50%	Rp 1.286,42	80%	Rp 1.370,47	100%	Rp 1.472,82	Dinas Kesehatan	
11	12	0%	0%	0%		0%									
12	13	85%	85%	90%	Rp 1.100,00	95%	Rp 1.200,00	95%	Rp 1.300,00	95%	Rp 1.400,00	95%	Rp 1.500,00	Dinas Kesehatan	
13	14	78%	78%	80%	Rp 297,31	81%	Rp 318,12	82%	Rp 340,39	83%	Rp 364,22	84%	Rp 389,71	Dinas Kesehatan	
14	15	87%	87%	90%		91%									
15	16	80%	80%	82%		85%									
16	17	0	0	2	100,00	5	110,00	10	120,00	15	130,00	20	140,00		
17	18	0	0												
18	19	0	0												
19	20	0	0												
20	21	0	0												
21	22	0	0												
22	23	0	0												
23	24	0	0												
24	25	0	0												
25	26	0	0												
26	27	0	0												
27	28	0	0												
28	29	0	0												
29	30	0	0												
30	31	0	0												
31	32	0	0												
32	33	0	0												
33	34	0	0												
34	35	0	0												
35	36	0	0												
36	37	0	0												
37	38	0	0												
38	39	0	0												
39	40	0	0												
40	41	0	0												
41	42	0	0												
42	43	0	0												
43	44	0	0												
44	45	0	0												
45	46	0	0												
46	47	0	0												
47	48	0	0												
48	49	0	0												
49	50	0	0												
50	51	0	0												
51	52	0	0												
52	53	0	0												
53	54	0	0												
54	55	0	0												
55	56	0	0												
56	57	0	0												
57	58	0	0												
58	59	0	0												
59	60	0	0												
60	61	0	0												
61	62	0	0												
62	63	0	0												
63	64	0	0												
64	65	0	0												
65	66	0	0												
66	67	0	0												
67	68	0	0												
68	69	0	0												
69	70	0	0												
70	71	0	0												
71	72	0	0												
72	73	0	0												
73	74	0	0												
74	75	0	0												
75	76	0	0												
76	77	0	0												
77	78	0	0												
78	79	0	0												
79	80	0	0												
80	81	0	0												
81	82	0	0												
82	83	0	0												
83	84	0	0												
84	85	0	0												
85	86	0	0												
86	87	0	0												
87	88	0	0												
88	89	0	0												
89	90	0	0												
90	91	0	0												
91	92	0	0												
92	93	0	0												
93	94	0	0												
94	95	0	0												
95	96	0	0												
96	97	0	0												
97	98	0	0												
98	99	0	0												
99	100	0	0												



### Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR BENTANG	REVISI	NOMOR TANDA	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN												INDIKATOR		
				2014		2015		2016		2017		2018		2019				
				TARGET	RP (JUOTA)	TARGET	RP (JUOTA)	TARGET	RP (JUOTA)	TARGET	RP (JUOTA)	TARGET	RP (JUOTA)	TARGET	RP (JUOTA)			
1	2		4	5		7		9		11		13		15		17	PELAKSANAAN	
				6		8		10		12		14		16				
				37,07		51,41		49,71		11		13		15		17		
				82%		95%		95%		95%		95%		95%		95%		
25	Program Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan		6															
				7														
				142,43		87,48		98,60		100,15		107,36		124,58		124,58		
				82%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
27	Program Pengembangan Kualitas dan Mutu Perencanaan Pembangunan		7															
				8														
				569,54		236,77		253,34		271,08		280,05		306,38		306,38		
				100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3	1	3	8	0												Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
				1														
				7,651,48		10,268,89		12,324,66		13,540,13		14,877,14		16,347,85			16,347,85	
				0%		60 org (untuk BLH)		60 org (untuk BLH)		60 org (untuk BLH)		60 org (untuk BLH)		80 org (untuk BLH)			80 org (untuk BLH)	
2	Program Penyelenggaraan Perencanaan dan Pelayanan Lingkungan Hidup		9															
				10														
				4,879,27		3,813,70		3,185,00		3,075,00		3,115,00		3,205,00			3,205,00	
				0		60 org (untuk BLH)		60 org (untuk BLH)		60 org (untuk BLH)		60 org (untuk BLH)		90 org (untuk BLH)			90 org (untuk BLH)	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR KEMERIA PROGRAM (KEMERIA)	NOMOR TARIK 2015	2014		2015		2016		2017		2018		2019		KETERANGAN
			TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)	
			0	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	
1	Program Perencanaan dan Konservasi Sumber Daya Alam	2	0	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Bahan Lingkungan Hidup	
2	Program Perencanaan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3	0	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Bahan Lingkungan Hidup	
3	Program Perencanaan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	4	0%	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Bahan Lingkungan Hidup	
4	Program Perencanaan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	5	0%	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Bahan Lingkungan Hidup	
5	Program Perencanaan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	6	0%	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Bahan Lingkungan Hidup	
6	Program Perencanaan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	7	0%	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Bahan Lingkungan Hidup	
7	Program Perencanaan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	8	0%	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Bahan Lingkungan Hidup	
8	Program Perencanaan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	9	0%	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Bahan Lingkungan Hidup	
9	Program Perencanaan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	10	0%	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Rp	2 kcs, 45 orang, 3 dokumen	Bahan Lingkungan Hidup	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NAMA URSI/AN PENGANTARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KEBERJA PROGRAM (OUTPUTS)	BONDIKI TARIF 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		REVISI PENGANTARAN JAWAB
				TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	
10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terjaganya luas RTH penyusutan norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	4	6	8	7	9	11	12	13	14	15	16	17	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebencanaan, Badan Lingkungan Hidup	
				Rp 863,30	Rp 1.994,25	Rp 2.692,43	Rp 2.931,67	Rp 3.194,83	Rp 3.494,32	Rp 3.852,17	Rp 4.210,00	Rp 4.567,85	Rp 4.925,70	Rp 5.283,55	Rp 5.641,40	
<b>509. JUMLAH URSI/AN WAKTU IMPLEMENTASI RUPF</b>																
4	<b>PERKERJAAN UMUM</b>															
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan	334,96 Km	46,424 Km	Rp 125.946,27	46 Km	Rp 115.000,00	46 Km	Rp 115.000,00	46 Km	Rp 115.000,00	46 Km	Rp 115.000,00	46 Km	Rp 115.000,00	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebencanaan, Dinas Bina Marga dan Pengairan
2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Corong-gorong	Bertambahnya saluran drainase yang terbangun	Rp 4.579,94	30%	Rp 9.382,94	66%	Rp 25.778,52	65%	Rp 17.290,48	70%	Rp 19.019,53	80%	Rp 20.921,49	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebencanaan		
3	Program Pembangunan Turap/Tebal/Brojog	Terwujudnya infrastruktur transportasi yang berkualitas dan meningkatkan pergerakan orang, barang dan jasa.	190 m	165.198 m	Rp 2.400,60	200 m	Rp 2.800,00	200 m	Rp 3.010,00	200 m	Rp 2.800,00	200 m	Rp 2.800,00	Dinas Bina Marga dan Pengairan		
4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terperbaikinya jalan dan jembatan lingkungan			Rp 32.185,97		Rp 31.200,94		Rp 34.710,12		Rp 33.083,64		Rp 35.090,20	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebencanaan, Dinas Bina Marga dan Pengairan		
5	Program Pembangunan Sistem Informasi/Deta Base Jalan dan Jembatan	Teratasnya informasi database jalan dan jembatan				353,00		368,00		427,00		470,00		517,00	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebencanaan, Dinas Bina Marga dan Pengairan	
6	Program Peningkatan Sistem dan Prasarana Kebencanaan	Tercedainya Sarana dan Prasarana Kebencanaan			Rp 100,00		4.083,25		1.100,00		1.200,00		1.400,00	Dinas Bina Marga dan Pengairan		
7	Program Pengembangan dan Penguatan Jaringan Irigasi, Rawe dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, Rawe dan Jaringan Pengairan Lainnya			Rp 27.992,72		Rp 28.248,00		Rp 56.900,00		Rp 55.725,00		Rp 57.610,00	Dinas Bina Marga dan Pengairan		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR UTM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	KONDISI TAHUN 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERHAHAN, DINAS BINA MARGA DAN PENGINTEAN
				TARGET	RP (UTA)	TARGET	RP (UTA)	TARGET	RP (UTA)	TARGET	RP (UTA)	TARGET	RP (UTA)	TARGET	RP (UTA)	
1	2	Program Penyediaan dan Pengalihan Air Baku	Rp 2.318,42	30%	Rp 1.515,42	7	Rp 3.497,05	9	Rp 3.497,05	11	Rp 3.497,05	13	Rp 3.497,05	16	Rp 4.273,93	
2	3	Program Pengembangan, Pengalihan dan Konversi Sempit, Deras dan Sumber Daya Air Lainnya														
3	4	Program Pengembangan Sistem Pengalihan Air Bersih dan Air Limbah	Rp 4.617,94	30%	Rp 5.599,44	40%	Rp 7.666,63	60%	Rp 9.200,32	60%	Rp 11.132,39	75%	Rp 12.245,62	80%	Rp 12.245,62	
4	5	Program Pengembangan Sistem Pengalihan Air Bersih dan Air Limbah	Rp 4.560,96		Rp 2.205,24		Rp 3.650,00		Rp 3.650,00		Rp 3.650,00		Rp 3.650,00		Rp 3.650,00	
5	6	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp 5.125,00	30%	Rp 10.360,00	14,88%	Rp 5.862,83	17,89%	Rp 7.143,40	19,64%	Rp 7.857,24	21,51%	Rp 8.643,51	23,77%	Rp 9.507,86	
6	7	Program Pengembangan Infrastruktur Perumahan	Rp 4.560,96	30%	Rp 2.253,18	40%	Rp 2.977,96	60%	Rp 3.513,56	70%	Rp 3.864,91	80%	Rp 4.251,40	85%	Rp 4.676,54	
7	8	Program Pengembangan Perumahan	Rp 1.795,28	30%	Rp 3.634,22	40%	Rp 3.163,32	60%	Rp 3.795,98	70%	Rp 4.175,58	80%	Rp 4.593,13	85%	Rp 5.052,45	
8	9	Program Pengembangan Pekerjaan Umum	Rp 979,55	30%	Rp 1.350,62	40%	Rp 1.755,81	60%	Rp 2.105,97	70%	Rp 2.317,66	80%	Rp 2.549,43	85%	Rp 2.804,37	
9	10	Program Pengembangan Pekerjaan Umum				5 Unit alat tebas rumput	Rp 25,00									
10	11	Program Pengembangan Pekerjaan Umum	Rp 224.384,77		Rp 224.384,77		Rp 224.384,77		Rp 224.384,77		Rp 224.384,77		Rp 224.384,77		Rp 224.384,77	
11	12	Program Pengembangan Pekerjaan Umum		4 Perda	Rp 1.383,66	3 Perda	Rp 1.867,71	2 Perda	Rp 2.241,25	2 Perda	Rp 2.465,38	2 Perda	Rp 2.711,91	2 Perda	Rp 2.983,11	
12	13	Program Pengembangan Pekerjaan Umum		30%	Rp 358,94	40%	Rp 538,41	50%	Rp 807,62	55%	Rp 888,98	60%	Rp 977,21	70%	Rp 1.074,94	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR KEMERIA PERATURAN DAERAH PROVINSI	NOMOR KEMERIA TARIF 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		REVISI JAWAB			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)				
1	2	4	30%	Rp 438,07	7	40%	Rp 410,73	10	60%	11	60%	12	70%	15	75%	16	80,00	Dinas Cipta Karya, Tim Rancang dan Eksekusi
3	3	10%																
<b>005 - JUMLAH URUSAN WAJIB PERENCANAAN PERANGKUAN</b>																		
6	PERENCANAAN PERANGKUAN																	
1	Program Pengembangan Data/Informasi	1 Dokumen	4 Dokumen	Rp 1.016,19	5 Dokumen	6 Dokumen	Rp 1.067,00	6 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 1.235,19		Beperda
2	Program Pengembangan Pembangunan	1 Dokumen	4 Dokumen	Rp 81,53	2 Dokumen	3 Dokumen	Rp 85,60	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 94,38		Beperda
3	Program Pengembangan Wilayah Perikanan		2 Kegiatan	Rp 40,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 25,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 25,00		Beperda
4	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cipta Tumbuhan		2 Kegiatan	Rp 20,00	3 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp 20,00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp 20,00		Beperda
5	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar		6 Kali Koordinasi	Rp 36,00	6 Kali Koordinasi	8 Kali Koordinasi	Rp 96,00	8 Kali Koordinasi	8 Kali Koordinasi	8 Kali Koordinasi	8 Kali Koordinasi	8 Kali Koordinasi	8 Kali Koordinasi	8 Kali Koordinasi	8 Kali Koordinasi	Rp 106,00		Beperda
6	Program Perencanaan Pengembangan Daerah	31 Kegiatan	31 Kegiatan	Rp 2.983,45	31 Kegiatan	31 Kegiatan	Rp 2.983,45	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	Rp 2.983,45		Beperda, Badan Perencanaan Makal dan Pelayanan Terpadu, Sekretariat Daerah
7	Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi	7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 1.648,85	7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 1.617,86	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 2.004,19		Beperda
8	Program Perencanaan Sosial Budaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 724,27	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 650,49	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 750,00		Beperda
9	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	3 Dokumen	1 Dokumen	Rp 534,24	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 350,00	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 600,00		Beperda
<b>005 - JUMLAH URUSAN WAJIB PERENCANAAN PERANGKUAN</b>																		
				Rp 7.084,54			Rp 7.267,74			Rp 7.258,43						Rp 7.787,39		8.044,15



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR BERKAS PERSYARIFAN DAS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS)	BUNDAK TAMBAH 2013	2014			2015			2016			2017			2018			2019		
				TARGET	RP (LUTA)	TARGET	RP (LUTA)	TARGET	RP (LUTA)	TARGET	RP (LUTA)	TARGET	RP (LUTA)	TARGET	RP (LUTA)	TARGET	RP (LUTA)	TARGET	RP (LUTA)	TARGET	RP (LUTA)
1	1	Program Pengembangan Sektor Perikanan		40%	Rp 5.155,00	50%	Rp 5.155,00	70%	Rp	75%	Rp	80%	Rp	85%	Rp	80%	Rp 6.079,03	80%	Rp 6.531,94	85%	Rp
2	2	Program Pengembangan Sektor Perikanan	Rp 2.727,65	30%	Rp 2.993,92	40%	Rp 4.192,23	60%	Rp 4.982,67	70%	Rp	80%	Rp	80%	Rp	80%	Rp 2.465,38	75%	Rp 2.711,91	80%	Rp 2.982,11
3	3	Program Pengembangan Sektor Perikanan	Rp 652,72	30%	Rp 1.231,78	40%	Rp 1.867,71	60%	Rp 2.241,25	70%	Rp	80%	Rp	80%	Rp	80%	Rp 7.946,32		Rp 8.790,94		Rp 9.635,08
4	4	Program Pengembangan Sektor Perikanan	0	91 Orang	Rp 24,35	120 Orang	40%	Rp 44,55	170 Orang	200 Orang	200 Orang	210 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	50,00	210 Orang	50,00	55,00	
5	5	Program Pengembangan Sektor Perikanan	5 Kelurahan	7 Kelurahan	Rp 543,75	10 Kelurahan	14 Kelurahan	17 Kelurahan	17 Kelurahan	20 Kelurahan	20 Kelurahan	22 Kelurahan	22 Kelurahan	22 Kelurahan	22 Kelurahan	22 Kelurahan	680,00	20 Kelurahan	680,00	717,00	
6	6	Program Pengembangan Sektor Perikanan	0	35 Orang	Rp 35,00	60 Orang	90 Orang	90 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang	285,00	120 Orang	285,00	309,00	
7	7	Program Pengembangan Sektor Perikanan	0	0	Rp	60 Orang	90 Orang	90 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	41,00	120 Orang	41,00	45,00		
8	8	Program Pengembangan Sektor Perikanan	7 Cabang	10 Cabang	Rp 50,00	15 Cabang	20 Cabang	20 Cabang	25 Cabang	25 Cabang	25 Cabang	30 Cabang	30 Cabang	30 Cabang	30 Cabang	75,00	30 Cabang	75,00	80,00		





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	KIDANG URDAN PEMERINTAH DAIRY PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	BOSKOR TARIK 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN												REKAP PERALOKAN JAWAB
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	
5	Program Pembinaan dan Pemasyarabutan Olahraga	Jumlah pelatihan peningkatan wawasan tentang keolahragaan	4 Kegiatan	54 Kegiatan	117 Kegiatan	121 Kegiatan	130 Kegiatan	132 Kegiatan	Rp 242,10	Rp 300,00	Rp 966,09	Rp 1.006,09	Rp 1.050,53	Rp 1.097,56	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	0	0	2 Tempet	6 Tempet	8 Tempet	10 Tempet	Rp	Rp 42,38	Rp 124,20	Rp 196,00	Rp 272,00	Rp 360,00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	
<b>SUB-JUDUL URDAN WAKIL KEPENDAH DAN OLIM RAGA</b>																
9	PERANAN MODAL															
1	Program Peningkatan Promosi dan Kinerja Investasi	Tumbuhnya kegiatan di Bidang Promosi dan Kinerja Investasi	71,49	4 Kali	6 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	Rp 466,42	Rp 585,00	Rp 575,00	Rp 675,00	Rp 750,00	Rp 775,00	Badan Ekonomi Pembangunan Kota, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
		Jumlah Promosi Investasi	100%	5 Kali	5 Kali	6 Kali	6 Kali	7 Kali								
		Jumlah Kegiatan Investasi		1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali								
		Jumlah Koordinasi Penanaman Modal		3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali								
		Jumlah Dokumen LKPM dan Direktori/Petusahaan		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen								
2	Program Peningkatan Iktin Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi (PMOR dan PMA)	100%	3.486.851.231.878,00	3.486.851.231.878,00	4.016.235.877.407,00	4.025.993.553.402,00	5.326.326.114.037,00	Rp 800,00	Rp 100,00	Rp 125,00	Rp 154,72	Rp 185,00	Rp 215,00	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Bappada	
		Jumlah Proyek Investasi (PMOR)		225	237	249	262	276								
		Jumlah Proyek Investasi (PMA)		18	18	19	19	19								
3	Program Penyajian Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah Sertifikat Kualitas Mutu Pelayanan Publik Berbasis Web online		100%	100%	20%	20%	20%	Rp 340,30	Rp 275,00	Rp 250,00	Rp 200,00	Rp 150,00	Rp 250,00	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
		Jumlah lain keluar	100%	1.350 Pemohon	2.750 Pemohon	3.000 Pemohon	3.200 Pemohon	3.300 Pemohon	Rp 448,77	Rp 1.284,30	Rp 1.495,00	Rp 1.575,00	Rp 1.655,69	Rp 1.905,00	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
4	Peningkatan Pelayanan/Akses Perizinan	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Perizinan dan Non Perizinan Nilai / Score IRM		4 Kali ke Kecamatan	2 Kali Pelaku Usaha	2 Kali Pelaku Usaha	2 Kali Pelaku Usaha	2 Kali Pelaku Usaha								
		Jumlah Pemangan Perizinan		81	82	83	84	85								
		Jumlah Pemangan Perizinan		30 Pengaduan	30 Pengaduan	30 Pengaduan	30 Pengaduan	30 Pengaduan								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kedu Raya 2014-2019

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM (OUTPUTS)	KONDISI TAHUN 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		REVISI		
				TARGET	RP (UTA)	TARGET	RP (UTA)	TARGET	RP (UTA)	TARGET	RP (UTA)	TARGET	RP (UTA)	TARGET	RP (UTA)		TARGET	RP (UTA)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
1	Program Peningkatan Pelayanan Perikanan & Bidang Perikanan Terpadu	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan Perikanan dan Non Perikanan Jumlah lain ketar	100%	2 Dokumen	Rp 492,25	2 Dokumen	Rp 100,00	2 Dokumen	Rp 100,00	2 Dokumen	Rp 100,00	2 Dokumen	Rp 400,00	2 Dokumen	Rp 100,00	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu		
2	Program Peningkatan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebijakan Bidang Penanaman Modal	100%	4 Dokumen	Rp 510,00	2 Dokumen	Rp 510,00	2 Dokumen	Rp 510,00	2 Dokumen	Rp 510,00	2 Dokumen	Rp 400,00	2 Dokumen	Rp 450,00	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu		
<b>SUB JUMLAH URaian WAJIB PESANAN MODAL</b>																		
3	KEPERIAS DAN UMAMA KECIL DAN MENENGAH				Rp 2.547,74		Rp 2.544,00		Rp 2.544,00		Rp 2.544,00		Rp 2.510,00		Rp 2.565,00			
1	Program Peningkatan Kualitas Usaha Kecil Menengah yang Inovatif	Meningkatnya Daya Saing Usaha Kecil Menengah yang dalam Perencanaan Pasar	422	100 orang/UMKM dan 100 Produk UMKM	Rp 250,00	100 orang/UMKM dan 100 Produk UMKM	Rp 511,00	200 orang/UMKM dan 100 Produk UMKM	Rp 502,00	300 orang/UMKM dan 300 Produk UMKM	Rp 618,00	300 orang/UMKM dan 300 Produk UMKM	Rp 680,00	300 orang/UMKM dan 100 Produk UMKM	Rp 680,00	Dinas Koperasi dan UMKM		
2	Program Pengembangan Kemitraan dan Konektivitas Komunitas UMKM yang berkualitas	Meningkatkan kemampuan SDM KUMEM yang berkualitas	535	300 Orang/UMKM	Rp 810,00	300 Orang/UMKM	Rp 810,00	300 Orang/UMKM	Rp 810,00	300 Orang/UMKM	Rp 810,00	300 Orang/UMKM	Rp 810,00	300 Orang/UMKM	Rp 810,00	Dinas Koperasi dan UMKM		
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya omset Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah	372	305 Orang / Koperasi	Rp 253,00	450 Orang / Koperasi	Rp 405,00	300 Orang / Koperasi	Rp 405,00	500 Orang / Koperasi	Rp 545,00	500 Orang / Koperasi	Rp 599,00	500 Orang / Koperasi	Rp 599,00	Dinas Koperasi dan UMKM		
4	Program Peningkatan Kualitas Kolaborasi Koperasi	Terwujudnya kolaborasi Koperasi dan UMKM yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing	335	200 Orang / 100 Koperasi	Rp 325,00	250 Orang / 100 Koperasi	Rp 365,00	200 Orang / 100 Koperasi	Rp 365,00	2750 Orang / 100 Koperasi	Rp 445,00	2750 Orang / 100 Koperasi	Rp 540,00	300 Orang / 100 Koperasi	Rp 540,00	Dinas Koperasi dan UMKM		
5	Program Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Terwujudnya UMKM yang menghasilkan Produk sesuai dengan standar nasional serta memiliki pasar modern	0	100 Orang UMKM	0	100 Orang UMKM	Rp 175,00	2 Pasar Tradisional	Rp 212,00	2 Pasar Semi Modern	Rp 233,00	2 Pasar Semi Modern	Rp 256,00	2 Pasar Modern	Rp 256,00	Dinas Koperasi dan UMKM		
<b>SUB JUMLAH URaian WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>																		
<b>KEPERDUKUKAN DAN CATATAN SEPIK</b>																		
1	Program Penataan Administrasi Keperdujukan	Meningkatnya pelayanan administrasi keperdujukan	53,51%	65,73%	Rp 1.300,14	71,11%	Rp 1.659,02	76,49%	Rp 2.011,93	81,87%	Rp 2.434,43	87%	Rp 2.671,22	87%	Rp 2.671,22	Dinas Keperdujukan dan Pencatatan Sipil, Bag. Administrasi		
2	Program Penyalaman dan Pelaksanaan Dokumen/Asip Keperdujukan	Terseainya sistem pengumpulan dokumen/ asip keperdujukan	100%	100%	Rp 12,90	100%	Rp 17,00	100%	Rp 18,70	100%	Rp 20,57	100%	Rp 22,63	100%	Rp 24,89	Dinas Keperdujukan dan Pencatatan Sipil, Bag. Administrasi		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) PROGRAM	KEMUNDURAN TAHUN 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		REKAPITULASI PERANGKOTAN JAWAB
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	
1	Tingkat cakupan program kesehatan bagi keluarga/rumah tangga di Kecamatan Kecamatan daerah yang terdampak bencana (RBD dan JED)	4	100%	160,00	100%	175,00	100%	180,00	100%	190,00	100%	190,00	200,00	200,00	Badan
<b>REKAPITULASI PERANGKOTAN DAN CATATAN SIPIL</b>															
12	Program Pemukiman dan Rehabilitasi Permukiman Desa	25%	10%	100,00	10%	150,00	10%	200,00	10%	250,00	10%	250,00	300,00	300,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program Pemukiman dan Rehabilitasi Permukiman Desa	25%	10%	100,00	10%	150,00	10%	200,00	10%	250,00	10%	250,00	300,00	300,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Program Pemukiman dan Rehabilitasi Permukiman Desa	25%	10%	100,00	10%	150,00	10%	200,00	10%	250,00	10%	250,00	300,00	300,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>REKAPITULASI PERANGKOTAN DAN CATATAN SIPIL</b>															
13	Program Pemukiman dan Rehabilitasi Permukiman Desa	25%	10%	100,00	10%	150,00	10%	200,00	10%	250,00	10%	250,00	300,00	300,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14	Program Pemukiman dan Rehabilitasi Permukiman Desa	25%	10%	100,00	10%	150,00	10%	200,00	10%	250,00	10%	250,00	300,00	300,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>REKAPITULASI PERANGKOTAN DAN CATATAN SIPIL</b>															
1	Program Pemukiman dan Rehabilitasi Permukiman Desa	25%	10%	100,00	10%	150,00	10%	200,00	10%	250,00	10%	250,00	300,00	300,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR KELOMPOK PROGRAM	INDIKATOR KEBERHA SIAN (OUTPUTS)	KEMUNDURAN TAMBAH DESA	2014		2015		2016		2017		2018		2019		KEMUNDURAN TAMBAH DESA	REVISI JABAT
				TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	Menyediakan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Gender/FGC (Gender Development) Anak Anak	20%	Rp 147,00	50%	Rp 441,79	65%	Rp 472,90	65%	Rp 506,90	85%	Rp 541,31	85%	Rp 573,00	Beban Pembudayaan Perencanaan dan Kelangkaan Berencana	17	
2	3	Menyediakan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Gender/FGC (Gender Development) Anak Anak	40%	Rp 117,32	50%	Rp 125,53	50%	Rp 134,32	50%	Rp 134,32	60%	Rp 143,72	70%	Rp 152,00	Beban Pembudayaan Perencanaan dan Kelangkaan Berencana	18	
3	4	Menyediakan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Gender/FGC (Gender Development) Anak Anak	10%	Rp 163,00	10%	Rp 75,00	10%	Rp 85,00	10%	Rp 85,00	10%	Rp 100,00	10%	Rp 125,00	Beban Pembudayaan Perencanaan dan Kelangkaan Berencana	19	
4	5	Menyediakan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Gender/FGC (Gender Development) Anak Anak	40%	Rp 484,35	50%	Rp 464,75	50%	Rp 497,59	50%	Rp 497,59	60%	Rp 532,10	70%	Rp 580,00	Beban Pembudayaan Perencanaan dan Kelangkaan Berencana, Dampak Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	
5	6	Menyediakan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Gender/FGC (Gender Development) Anak Anak	9 Kali	Rp 191,00	9 Kali	Rp 284,46	9 Kali	Rp 302,78	9 Kali	Rp 302,78	9 Kali	Rp 322,98	9 Kali	Rp 360,00	Beban Pembudayaan Perencanaan dan Kelangkaan Berencana	21	
6	7	Menyediakan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Gender/FGC (Gender Development) Anak Anak	65%	Rp 221,35	65%	Rp 246,80	65%	Rp 315,00	65%	Rp 330,75	65%	Rp 330,75	65%	Rp 350,00	Beban Pembudayaan Perencanaan dan Kelangkaan Berencana	22	
7	8	Menyediakan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Gender/FGC (Gender Development) Anak Anak	1 Kegiatan	Rp 15,00	1 Kegiatan	Rp 55,00	1 Kegiatan	Rp 60,00	1 Kegiatan	Rp 65,00	1 Kegiatan	Rp 70,00	1 Kegiatan	Rp 75,00	Beban Pembudayaan Perencanaan dan Kelangkaan Berencana	23	
8	9	Menyediakan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Gender/FGC (Gender Development) Anak Anak	20%	Rp 250,00	20%	Rp 121,50	30%	Rp 121,50	30%	Rp 121,50	40%	Rp 125,00	45%	Rp 125,00	Beban Pembudayaan Perencanaan dan Kelangkaan Berencana	24	
9	10	Menyediakan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Gender/FGC (Gender Development) Anak Anak	1 Tahap	Rp 857,00	1 Tahap	Rp 1.476,79	2 Tahap	Rp 1.476,79	2 Tahap	Rp 1.476,79	2 Tahap	Rp 1.550,70	2 Tahap	Rp 1.550,70	Beban Pembudayaan Perencanaan dan Kelangkaan Berencana	25	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR URUTAN PROGRAM	DESKRIPSI KEGIATAN PROGRAM (OUTPUT)	KEMASUKAN TAHUN 2013	2014			2015			2016			2017			2018			2019			SMPN PERALIHAN JABAR
				TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	Tercapainya Kegiatan Pelatihan KHEDA di Masyarakat	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	50,00	1 Kegiatan	50,00	1 Kegiatan	50,00	1 Kegiatan	50,00	1 Kegiatan	50,00	1 Kegiatan	50,00	1 Kegiatan	50,00	1 Kegiatan	50,00	Buku	
5	3	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	Buku	
6	4	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Konektivitas KB dan Konektivitas Kesehatan dan Keluarga Berencana Reproduksi Remaja (KPR)	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	Buku	
7	5	Program Peningkatan Penanggulangan Narkotika, PMS Terpapar HIV/AIDS	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	1 Kegiatan	200,00	Buku	
8	6	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	15 Lembar	15,00	30 Buku	50,00	35 Buku	55,00	40 Buku	55,00	45 Buku	55,00	50 Buku	60,00	55 Buku	60,00	60 Buku	65,00	70 Buku	70,00	Buku	
9	7	Program Penyediaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	20%	75,00	40%	65,00	50%	65,00	50%	65,00	50%	65,00	50%	65,00	50%	65,00	50%	65,00	50%	65,00	Buku	
10	8	Program Pengembangan Model Operasional BKE-Program PAUD	1 Kelompok	35,00	1 Kelompok	35,00	1 Kelompok	35,00	1 Kelompok	35,00	1 Kelompok	35,00	1 Kelompok	35,00	1 Kelompok	35,00	1 Kelompok	35,00	1 Kelompok	35,00	Buku	
11	9	Program Penguatan Sireta dan Prasertua Pelayanan KB	30	1.335,00	50	30,00	61	30,00	70	30,00	80	30,00	90	30,00	90	30,00	90	30,00	90	30,00	Buku	
12	10	Program Pemberdayaan Kemandirian Kesejahteraan Sosial	100%	175,93	100%	30,00	100%	30,00	100%	30,00	100%	30,00	100%	30,00	100%	30,00	100%	30,00	100%	30,00	Buku	
13	11	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konektivitas KB	9 Kec.	145,00	9 Kec.	145,00	9 Kec.	145,00	9 Kec.	145,00	9 Kec.	145,00	9 Kec.	145,00	9 Kec.	145,00	9 Kec.	145,00	9 Kec.	145,00	Buku	
			0%	40,00	0%	35,00	1 Tempat	40,00	1 Tempat	35,00	1 Tempat	40,00	1 Tempat	35,00	1 Tempat	40,00	1 Tempat	35,00	1 Tempat	40,00	Buku	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR URUTAN PRESENTASIAN DARI PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	KONDISI TAHUN 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		SEKTO PEMANGKUNGO JAWAB
				TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14	Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Masyarakat Pedesaan	Terbinarnya Kelompok UPPKS	4		53 Kelompok	60,00	60,00	60,00	60,00	65,00	65,00	70 Kelompok	75 Kelompok	70,00	Rp	Pembudayaan Persepsi dan Kebiasaan Berencana, Berusaha, Berprestasi dan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
<b>SUB JURNAL UTMAN WALAH KELANGA BERKAWA DAN KELANGA BERKAWA</b>				Rp	3.294,18	Rp	3.297,00	Rp	3.299,04	Rp	3.008,48	Rp	3.008,70	Rp	3.008,70	Dinas Perhubungan
<b>PERHUBUNGAN</b>																
1	Program Peningkatan Presensi dan Fasilitas Perhubungan (LLAJ)	Terdapatnya dokumen teknis mengenai peninjauan pembangunan presensi dan fasilitas perhubungan di darat	%		% / Bidang	4.715,00										Dinas Perhubungan
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Presensi dan Fasilitas (LLAJ)	Terdapatnya presensi dan fasilitas perhubungan yang memadai	Unit		Unit	633,00						Unit	Unit	318,00	Rp	Dinas Perhubungan
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (LLAJ)	Terdapatnya Dokumen Teknis peningkatan Angkutan Transpor Darat Darat terintegrasi antar moda	Unit		Unit	1.145,00						Unit	Unit	495,00	Rp	Dinas Perhubungan
4	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas (LLAJ)	Terdapatnya Angkutan Transpor Darat Berintegrasi antar moda	%	Rp	22,45	1.130,00						%	%	715,00	Rp	Dinas Perhubungan
5	Program Peningkatan Kualitas Pengoperasian Kendaraan Bermotor (LLAJ)	Terdapatnya fasilitas Kendaraan LLAJ	Unit	Rp	450,00	3.225,00						Unit	Unit	825,00	Rp	Dinas Perhubungan
6	Program Peningkatan Keselamatan Pengoperasian Kendaraan Bermotor (LLAJ)	Kepemilikan / Jumlah KIR angkutan darat	Buah	Rp	40,00	2.350,00						Buah	Buah	120,00	Rp	Dinas Perhubungan
6	Program Peningkatan Keselamatan Pengoperasian Kendaraan Bermotor (LLAJ)	Terdapatnya sarana dan prasarana perhubungan	Unit	Rp	700,00	2.200,00						Unit	Unit		Rp	Dinas Perhubungan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	URAIAN BESARAN FISIKA DAN PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM (KOTOMBE)	BORDIR TARIK 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		SEKTOR PEMANGKUNG JAWAB
				TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	
1	Program Pembangunan Sistem dan Fasilitas Komunikasi (LJASOP)	Terwujudnya dokumen studi kelayakan penyempurnaan dan fasilitas komunikasi perhubungan SDP	3 Dokumen	1 Dokumen	90,71	5 Dokumen	2.050,00	3 Dokumen	600,00	2 Dokumen	400,00	1 Dokumen	200,00	1 Dokumen	200,00	Dinas Perhubungan
2	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dan Fasilitas Komunikasi (LJASOP)	Terwujudnya Sistem dan Fasilitas Komunikasi yang terintegrasi antar instansi	1 Paket	1 Paket	1,40	2 Paket	23,11	2 Paket	23,11	2 Paket	23,11	2 Paket	23,11	2 Paket	23,11	Dinas Perhubungan
3	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dan Fasilitas Komunikasi (LJASOP)	Terwujudnya Sistem dan Fasilitas Komunikasi yang terintegrasi antar instansi	66 Buah	11 Buah	40,76	45 Buah	279,00	39 Buah	304,00	34 Buah	275,00	29 Buah	254,00	29 Buah	254,00	Dinas Perhubungan
4	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dan Fasilitas Komunikasi (LJASOP)	Terwujudnya Sistem dan Fasilitas Komunikasi yang terintegrasi antar instansi	3 Dokumen	1 Dokumen	19,84	1 Dokumen	60,00	1 Dokumen	60,00	1 Dokumen	60,00	1 Dokumen	60,00	1 Dokumen	60,00	Dinas Perhubungan
5	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dan Fasilitas Komunikasi (LJASOP)	Terwujudnya Sistem dan Fasilitas Komunikasi yang terintegrasi antar instansi	159 Buah	38 Buah	4.167,82	11 Buah	13.950,00	50 Buah	8.000,00	50 Buah	8.000,00	50 Buah	8.000,00	50 Buah	8.000,00	Dinas Perhubungan
6	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dan Fasilitas Komunikasi (LJASOP)	Terwujudnya Sistem dan Fasilitas Komunikasi yang terintegrasi antar instansi	3 Dokumen	1 Dokumen	32.470,11	1 Dokumen	32.470,11	1 Dokumen	32.470,11	1 Dokumen	32.470,11	1 Dokumen	32.470,11	1 Dokumen	32.470,11	Dinas Perhubungan
7	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dan Fasilitas Komunikasi (LJASOP)	Terwujudnya Sistem dan Fasilitas Komunikasi yang terintegrasi antar instansi	10 Media Informasi	10 Media Informasi	1.100,00	25 Media Informasi	1.210,00	32 Media Informasi	1.331,00	42 Media Informasi	1.464,10	42 Media Informasi	1.610,51	42 Media Informasi	1.771,56	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dan Fasilitas Komunikasi (LJASOP)	Terwujudnya Sistem dan Fasilitas Komunikasi yang terintegrasi antar instansi	19 SIPD	19 SIPD	926,51	29 SIPD	926,51	38 SIPD	926,51	38 SIPD	926,51	38 SIPD	926,51	38 SIPD	926,51	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Program Implementasi LPSE	Terwujudnya LPSE	100%	100%	460,00	100%	460,00	100%	500,00	100%	500,00	100%	500,00	100%	500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Program Implementasi LPSE	Terwujudnya LPSE	100%	100%	2.486,91	100%	2.486,91	100%	2.797,93	100%	2.916,61	100%	3.077,02	100%	3.254,07	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Program Pembangunan Sistem Pendanaan Tanah	Terwujudnya suatu sistem pertanahan aset Pemerintah Daerah	1 Sistem	1 Sistem												Sekda Bng. Pertanahan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR KEMERIAAN DAN PROGRAM	NOMOR KEMERIAAN PROGRAM (SK/PERDA)	2014		2015		2016		2017		2018		2019		KETERANGAN
			TARGET	RP (LJUTA)	TARGET	RP (LJUTA)	TARGET	RP (LJUTA)	TARGET	RP (LJUTA)	TARGET	RP (LJUTA)	TARGET	RP (LJUTA)	
2	Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat	3	30%	Rp 21.000,00	50%	Rp 24.000,00	60%	Rp 24.000,00	70%	Rp 24.000,00	80%	Rp 24.000,00	80%	Rp 24.000,00	Salah satu Program
2	Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat	4	Minimal 5 Kemitif yang terfalsifikasi	Rp 200,00	Minimal 5 Kemitif yang terfalsifikasi	Rp 200,00	Minimal 5 Kemitif yang terfalsifikasi	Rp 200,00	Minimal 5 Kemitif yang terfalsifikasi	Rp 200,00	Minimal 5 Kemitif yang terfalsifikasi	Rp 200,00	Minimal 5 Kemitif yang terfalsifikasi	Rp 200,00	Salah satu Program
4	Program Pengabdian Masyarakat	5	50%	Rp 180,00	60%	Rp 180,00	60%	Rp 180,00	70%	Rp 180,00	80%	Rp 180,00	80%	Rp 180,00	Salah satu Program
<b>GRAND TOTAL</b>				Rp 24.380,00		Rp 24.380,00		Rp 24.380,00		Rp 24.380,00		Rp 24.380,00		Rp 24.380,00	
1	Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat	1	8 tahun PKL	Rp 1.900,00	14 tahun PKL	Rp 2.000,00	16 tahun PKL	Rp 2.172,10	18 tahun PKL	Rp 2.394,30	20 tahun PKL	Rp 2.688,70	22 tahun PKL	Rp 2.983,10	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
2	Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat	2	1x	-	1x	-	1x	-	1x	-	1x	-	1x	-	Kantor Kecamatan Bangun, Politik dan Perhubungan Masyarakat
3	Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat	3	1 PFNS	Rp 21,40	1 PFNS	Rp 24,00	1 PFNS	Rp 25,60	1 PFNS	Rp 27,00	1 PFNS	Rp 28,80	1 PFNS	Rp 30,60	Kantor Kecamatan Bangun, Politik dan Perhubungan Masyarakat
3	Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat	4	1x	Rp 49,77	1x	Rp 70,00	1x	Rp 92,60	1x	Rp 120,51	1x	Rp 155,15	1x	Rp 197,60	Kantor Kecamatan Bangun, Politik dan Perhubungan Masyarakat
4	Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat	5	1x	Rp 96,94	1x	Rp 145,00	1x	Rp 185,15	1x	Rp 232,60	1x	Rp 288,60	1x	Rp 354,94	Kantor Kecamatan Bangun, Politik dan Perhubungan Masyarakat
5	Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat	6	1x	Rp 16,86	1x	-	1x	-	1x	-	1x	-	1x	-	Kantor Kecamatan Bangun, Politik dan Perhubungan Masyarakat
6	Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat	7	4 kali Razia	Rp 55,00	4 kali Razia	Rp 42,80	4 kali Razia	Rp 46,00	4 kali Razia	Rp 49,00	4 kali Razia	Rp 52,00	4 kali Razia	Rp 55,00	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR UTMAS PERKANTORAN DAFTAR PROGRAM	INDIKATOR KEMERIA PROGRAM (K/P/K/MS)	SALINAN	2014				2015				2016				2017				2018				2019			
				TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)		
1	2	Program Pendidikan Politik Masyarakat	4	1.002,70	2x	Rp 180,50	2x	Rp 240,00	2x	Rp 342,40	2x	Rp 366,37	2x	Rp 392,01	2x	Rp 413,45											
7	3	Usahab Kegiatan Sosialisasi Budaya dan Partisipasi Politik			2x		2x																				
8	3	Usahab Kegiatan Pendidikan Politik			2x		2x																				
9	3	Program Pengabdian Diri dan Penanggulangan Kerusakan Bencana Alam	10%		20%	Rp 52,53	40%	Rp 5.550,00	40%	Rp 3.464,00	60%	Rp 8.532,00	60%	Rp 10.878,00	100%	Rp 14.205,00											
9	3	Program Kewaspadaan Dini/Deceh			2x		2x	Rp 390,00	2x	Rp 417,30	2x	Rp 446,51	2x	Rp 477,77	2x	Rp 511,21											
10	3	Program Pemasaran dan Peningkatan Produk Hiliris Daerah			2 kali sosialisasi		2 kali sosialisasi	Rp 21,40	2 kali sosialisasi	Rp 22,89	2 kali sosialisasi	Rp 24,50	2 kali sosialisasi	Rp 26,20	2 kali sosialisasi	Rp 28,00											
11	3	Program Penanggulangan Bioterrorisme Bencana			100%		100%	Rp 550,00	100%	Rp 1.235,00	100%	Rp 1.605,00	100%	Rp 2.087,15	100%	Rp 2.713,30											
12	3	Program Rehabilitasi Pascat Bencana			100%		100%	Rp 3.528,89	100%	Rp 4.125,34	100%	Rp 4.331,61	100%	Rp 4.548,18	100%	Rp 4.775,62											
13	3	Program Kelembagaan Sesi, Budaya dan Masyarakat			100%		100%	Rp 69,00	100%	Rp 75,90	100%	Rp 83,49	100%	Rp 91,86	100%	Rp 101,00											
<b>SUB JUMLAH URUSAN WAJIB KEMERIA BARASA DAN POLITIK DALAM NEGARA</b>																											
20						Rp 2.281,89		Rp 13.788,49		Rp 13.190,68		Rp 17.806,37		Rp 21.302,89		Rp 26.790,17											
<b>OTONOMI DAERAH, PERSERIKATAN UTUK, ADMINISTRASI KEANGKAR DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPOLAWAN DAN PERMEDIAN</b>																											
1	1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwalian Rakyat Daerah	10,072,32	100%	Rp 10.525,74	100%	Rp 15.169,00	100%	Rp 15.751,00	100%	Rp 15.751,00	100%	Rp 15.751,00	100%	Rp 15.751,00												
2	1	Program Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				Rp 823,17		Rp 823,17		Rp 823,17		Rp 823,17		Rp 823,17		Rp 823,17											



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR URUTAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KEBERJAYAAN PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI TAHUN 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		SIFAT PELAKSANAAN JAWAB
				TARGET	RP (MTR)	TARGET	RP (MTR)	TARGET	RP (MTR)	TARGET	RP (MTR)	TARGET	RP (MTR)	TARGET	RP (MTR)	
1		Rapat Koordinasi Unsur MUSPMD	4	100%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Bng. Pemerintahan Sada
		Rapat Kerja Unsur Pimpinan Kecamatan	33,02	100%	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48	80,48	Bng. Pemerintahan Sada
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertibnya Pemda dan Pergub APBD Tertibnya Pemda dan Pergub APBD	82,50% (1 BIMTES)	1	28,04	28,04	28,04	28,04	28,04	28,04	28,04	28,04	28,04	28,04	28,04	Budaya Masyarakat dan Peningkatan Desa
			28,00	1 x	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Kantor Kecamatan Bng. Publik dan Peningkatan Masyarakat
4	Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa	Tersebutnya ADD tepat waktu dan akurat	95% (102 DESA)	1 x	270,54	270,54	270,54	270,54	270,54	270,54	270,54	270,54	270,54	270,54	270,54	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penyelenggaraan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
5	Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Tersebutnya Realisasi Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah														Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penyelenggaraan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan EDH	Dihasilkan RPT Program Kegiatan Pengawasan Tahunan	46 Desa, 12 SKPD, 71 Thp dan 800 LP2P	20 Desa, 25 SKPD, 25 Thp dan 927 LP2P	2.890,00	2.890,00	3.055,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	Dinas Inspektorat Daerah
7	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Perencanaan dan Aparatur Pengawasan	Adanya Peningkatan Profesionalisme Aparatur	7 Orang	1 Paket (3 Orang)	189,00	189,00	198,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	Inspektorat Daerah
8	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersebutnya Dokumen SOP		1	30,00	30,00	32,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	Inspektorat Daerah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR URUTAN PERENCANAAN DAS PROGRAM	INDIKATOR KEBERJAYAAN PROGRAM (OUTCOMES)	KORDISI TAHUN 2015	2014			2015			2016			2017			2018			2019			REKAP PERANGKUNG JAWAB
				TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)	TARGET	RP (JUATA)	
				3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	9	Program Operasional Pemantauan Teknologi Informasi	140,36	Rp 196,00	100%	Rp 300,00	100%	Rp 300,00	100%	Rp 300,00	100%	Rp 300,00	100%	Rp 330,00	100%	Rp 330,00	100%	Rp 330,00	100%	Rp 330,00	Subsektor DPRD	
		Tercapainya Informasi Tentang Kegiatan DPRD																				
		Meningkatnya kecapaian, tercapainya dan Aksebilitas Informasi bagi masyarakat melalui aplikasi media informasi	Tingkat Pencapaian dan Aksebilitas Informasi bagi masyarakat melalui aplikasi media informasi 86,74																			
2	10	Program Mengembangkan Kemampuan Pengabdian Masyarakat		Rp 564,48	1	Rp 150,00	1	Rp 150,00	1	Rp 150,00	1	Rp 150,00	1	Rp 150,00	1	Rp 150,00	1	Rp 150,00	1	Rp 150,00	Inspektori Daerah	
		Berfungsinya unit pengabdian masyarakat																				
		Terdibentuknya Pengabdian Riset di Kabupaten Kubu Raya	1 Kes		6 Desa	Rp 263,00	6 Desa															
		Terdibentuknya Riset di Kabupaten Kubu Raya	1 Paket		1 Paket	Rp 96,85	1 Paket															
		Pelaksanaan kegiatan penelitian pada dan TUN	3 Perkiraan		3 Perkiraan	Rp 300,00	4 Perkiraan															
		Pengabdian perkarja dengan cara LKlgan dan Non LKlgan																				
11	11	Program Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah	135,13	Rp 505,31	100%	Rp 581,10		Rp 175,00		Rp 192,50		Rp 203,00		Rp 213,00		Rp 213,00		Rp 213,00		Rp 213,00	Bag. Pemerintahan Setda	
		Realisasi / Pembentukan Eksekutif Daerah Pada Aparat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (APKAS)																				
		Rapat Kerja APKAS	40,00		100%	Rp 50,00		Rp 50,00		Rp 50,00		Rp 50,00		Rp 50,00		Rp 50,00		Rp 50,00		Rp 50,00	Bag. Pemerintahan Setda	
		Forum Sekretaria Daerah Sebaruk Indonesia			100%	Rp 145,50		Rp 132,78		Rp 160,41		Rp 168,43		Rp 168,43		Rp 168,43		Rp 168,43		Rp 168,43	Bag. Pemerintahan Setda	
12	12	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Rp 3.415,50		Rp 3.645,95		Rp 2.349,00		Rp 2.349,00		Rp 2.349,00		Rp 2.349,00		Rp 2.349,00		Rp 2.349,00		Rp 2.349,00	Sekretariat DPRD, Bag. Hukum dan HAM Setda	
		Tertelaksananya Penataan Peraturan Perundang-undangan																				
13	13	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	295,94	Rp 1.120,65		Rp 1.109,83		Rp 1.191,80		Rp 1.312,84		Rp 1.409,70		Rp 1.409,70		Rp 1.409,70		Rp 1.409,70		Rp 1.409,70	Bag. Pemerintahan Setda	
		Tertelaksananya informasi kegiatan penataan yang dituntut masyarakat melalui media cetak dan elektronik																				
14	14	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik		Rp 1.035,06		Rp 2.035,70		Rp 1.776,79		Rp 1.624,30		Rp 1.624,30		Rp 1.624,30		Rp 1.624,30		Rp 1.624,30		Rp 1.624,30	Sekretariat DPRD, Bag. Humas Setda	
		Tertelaksananya Proses Pengkajian Keanggotaan DPRD	15,83	Rp 794,06	5 kali	Rp 59,00	4 kali	Rp 59,00	4 kali	Rp 59,00	4 kali	Rp 59,00	4 kali	Rp 59,00	4 kali	Rp 59,00	4 kali	Rp 59,00	4 kali	Rp 59,00	Sekretariat Daerah	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NAMA BERKAS PENGANTARAN TMS PROGRAM	KEMERIAHAN TAMBAH TAMBAH	2014		2015		2016		2017		2018		2019		REVISI JANUARI 17
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	
1	Program Pembangunan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	4	2 Hibah/Bantuan	Rp 58,00	2 Hibah/Bantuan	Rp 65,00	2 Hibah/Bantuan	Rp 70,00	2 Hibah/Bantuan	Rp 75,00	2 Hibah/Bantuan	Rp 80,00	2 Hibah/Bantuan	Rp 85,00	Bantuan Pembangunan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
17	Program Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik	82,40	100%	Rp 116,10	100%	Rp 115,00	100%	Rp 127,70	100%	Rp 140,00	100%	Rp 145,00	100%	Rp 145,00	Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik
18	Program Peningkatan dan Pengembangan Administrasi Daerah	280%	100%	Rp 2.454,00	100%	Rp 2.699,40	100%	Rp 2.969,24	100%	Rp 3.266,27	100%	Rp 3.582,58	100%	Rp 3.922,58	Program Peningkatan dan Pengembangan Administrasi Daerah
19	Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Masyarakat			Rp 3.184,50		Rp 6.972,00		Rp 3.165,00		Rp 2.447,00		Rp 3.628,08		Rp 3.628,08	Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Masyarakat
20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat			Rp 132,99											Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat
21	Program Peningkatan dan Pengembangan Administrasi Daerah			Rp 5.912,90		Rp 3.346,11		Rp 3.602,25		Rp 3.694,52		Rp 3.787,85		Rp 3.787,85	Program Peningkatan dan Pengembangan Administrasi Daerah
22	Program Peningkatan dan Pengembangan Administrasi Daerah		100%	Rp 578,88		Rp 865,00		Rp 880,00		Rp 880,00		Rp 880,00		Rp 880,00	Program Peningkatan dan Pengembangan Administrasi Daerah
23	Program Peningkatan dan Pengembangan Administrasi Daerah		1 Hibah	Rp 471,41		Rp 655,00		Rp 496,00		Rp 525,00		Rp 555,00		Rp 555,00	Program Peningkatan dan Pengembangan Administrasi Daerah
24	Program Peningkatan dan Pengembangan Administrasi Daerah	5.235,63		Rp 5.235,63											Program Peningkatan dan Pengembangan Administrasi Daerah
25	Program Peningkatan dan Pengembangan Administrasi Daerah		80%	Rp 100,00		Rp 100,00	85%	Rp 100,00	90%	Rp 100,00	90%	Rp 100,00	95%	Rp 100,00	Program Peningkatan dan Pengembangan Administrasi Daerah
26	Program Peningkatan dan Pengembangan Administrasi Daerah			Rp 210,00		Rp 215,00		Rp 415,00		Rp 215,00		Rp 215,00		Rp 215,00	Program Peningkatan dan Pengembangan Administrasi Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NAMA PROGRAM DAN SUBPROGRAM	KEMUKAKUAN TARGET 2014	2014		2015		2016		2017		2018		2019		REKAPITULASI PERANGKASAN DAERAH
			TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Program Pendidikan Masyarakat	93,30%	Rp 825,81	Rp 432,30	98%	Rp 475,53	98%	Rp 523,08	98%	Rp 575,39	98%	Rp 632,58			Bidang Pengembangan Masyarakat
27		93,30%		Rp 303,04	98%	Rp 334,22	98%	Rp 367,65	98%	Rp 404,41	98%	Rp 444,85			Bidang Pengembangan Masyarakat
28	Program Peningkatan Kapasitas Sumbardaya Aparatur			Rp 2.097,03		Rp 2.306,73		Rp 2.537,41		Rp 2.791,15		Rp 3.070,26			Bidang Pengembangan Masyarakat
29	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			Rp 3.411,39		Rp 3.595,55		Rp 3.797,91		Rp 4.020,50		Rp 4.422,35			Bidang Pengembangan Masyarakat dan Subarah SEKPD
30	Program Pendidikan dan Pelatihan Televisi			Rp 800,00		Rp 880,00		Rp 968,00		Rp 1.064,80		Rp 1.171,28			Bidang Pengembangan Masyarakat dan Subarah SEKPD
31	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur			Rp 225,00		Rp 247,50		Rp 272,25		Rp 299,48		Rp 328,42			Bidang Pengembangan Masyarakat dan Subarah SEKPD
<b>SUB JUDUL URURAN WAKIL OTONOMI DAERAH, PEMBERDAYAAN URUM, ADMINISTRASI</b>															
31	<b>PERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR</b>			Rp 38.462,77		Rp 44.528,03		Rp 47.148,60		Rp 47.148,60		Rp 47.148,60			Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan
1	Program Peningkatan Keterbacaan Masyarakat Pedesaan			Rp 163,43		Rp 332,00		Rp 375,00		Rp 410,00		Rp 450,00			Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			Rp 204,71	9 Programatik	Rp 271,00	9 Programatik	Rp 307,00	9 Programatik	Rp 333,00	9 Programatik	Rp 354,00			Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			Rp 478,00		Rp 527,03		Rp 578,00		Rp 627,00		Rp 673,00			Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			Rp 324,41		Rp 2.700,00		Rp 3.000,00		Rp 3.000,00		Rp 3.000,00			Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	MIDANG URUSAN PENGERTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONSESI TARIK 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		REKAPITULASI RP (JUMLAH)	REKAPITULASI RP (JUMLAH)
				TARGET	RP (JUMLAH)	TARGET	RP (JUMLAH)	TARGET	RP (JUMLAH)	TARGET	RP (JUMLAH)	TARGET	RP (JUMLAH)	TARGET	RP (JUMLAH)		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan		75,50	75,00	2 hibah/bantuan	35,00	2 hibah/bantuan	156,00	173,00	190,00	2 hibah/bantuan	42,00	210,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	210,00	
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya dana Hibah dan Bantuan yang tepat waktu dan akurat		2 hibah/bantuan	33,00	2 hibah/bantuan	35,00	2 hibah/bantuan	35,00	36,00	40,00	2 hibah/bantuan	42,00	42,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	42,00	
7	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan ADD	Terwujudnya ADD tepat waktu dan akurat	60%	117 desa	270,54		228,00		240,00	240,00	260,00		260,00	260,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	260,00	
8	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan PPKM	Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan PPKM		9 Kecamatan	940,00	9 Kecamatan	1.388,00	9 Kecamatan	1.255,00	1.330,00	1.400,00	9 Kecamatan	1.400,00	1.400,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1.400,00	
9	Program Peningkatan Wilayah Administrasi Desa	Terwujudnya Peningkatan Wilayah Administrasi Desa		10 desa	600,98	10 desa	610,00	10 desa	850,00	890,00	920,00	10 desa	920,00	920,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	920,00	
10	Program Pengalangan, Pengabdian dan Pengawasan Asat Desa	Data Asat Desa		10 desa	232,00	12 desa	238,00	12 DESA	240,00	240,00	260,00	12 DESA	260,00	260,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	260,00	
11	Program Pengembangan dan Penguasaan Administrasi desa	Sistem Penguasaan Administrasi desa		27 DESA	405,00	27 DESA	405,00	27 DESA	405,00	405,00	405,00	27 DESA	405,00	405,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	405,00	
<b>SUB-JUDUL URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>																8.286,00	8.286,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR URUTAN PEMERINTAHAN DAIRY PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS)	KORDISI TAHUN 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		KELOMPOK SASARAN
				TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	Program Pemberdayaan Masyarakat (KAT) dan Penyelenggaraan Monev KAT dan PAKS Lainnya	25%	10%	Rp 0,35	10%	Rp 100,00	10%	Rp 150,00	10%	Rp 200,00	10%	Rp 250,00	10%	Rp 30,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	2	Terwujudnya kebaktian dasar, akseptabilitas dan pelayanan sosial dasar masyarakat Miskin, KAT, PAKS dan lembaga Orasi	25%	10%		10%	Rp 75,00	10%	Rp 100,00	10%	Rp 150,00	10%	Rp 200,00	10%	Rp 175,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	3	Terlaksananya integrasi Program Daerah dan Pusat terhadap Penyelenggaraan Perundang-undangan di Kabupaten Kubu Raya	25%	10%		10%	Rp 50,00	10%	Rp 100,00	10%	Rp 150,00	10%	Rp 200,00	10%	Rp 250,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	4	Terwujudnya PAKS Kabupaten Kubu Raya melalui Penyelenggaraan Perencanaan provinsi dan Pusat (APBR dan TP)	25%	10%		10%	Rp 750,00	10%	Rp 1.000,00	10%	Rp 1.500,00	10%	Rp 2.000,00	10%	Rp 2.500,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	5	Terwujudnya PAKS yang akseptabilitas dan diwujudkan	25%	10%		10%	Rp 750,00	10%	Rp 1.000,00	10%	Rp 1.200,00	10%	Rp 1.500,00	10%	Rp 1.750,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	6	Terlaksananya pelayanan, dan rehabilitasi sosial bagi anak terdampak, anak jompo anak cacat dan anak yang berhadapan dengan bencana	25%	0%		10%	Rp 50,00	10%	Rp 75,00	10%	Rp 100,00	10%	Rp 125,00	25%	Rp 150,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penyelidikan dan Pengembangan Keluarga Berencana
7	7	Terlaksananya Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	25%	25%		25%	Rp 75,00	25%	Rp 100,00	25%	Rp 125,00	25%	Rp 150,00	25%	Rp 175,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	8	Terlaksananya Pembinaan Anak-anak dan Panti Jompo	25%	25%	Rp 730,64	25%	Rp 200,00	25%	Rp 225,00	25%	Rp 250,00	25%	Rp 275,00	25%	Rp 300,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR KEMERIA PERATURAN DAER PENGABDIAN	NOMOR KEMERIA TAMBAH 2013	2014				2015				2016				2017				2018				2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%			
2	Program Pembangunan Desa Peningkatan Perikanan, Sosial dan Kesehatan, PDR, dan Membina dan Peningkat Sosial Kemasyarakatan	4	25%	Rp 31,19	25%	Rp 60,00	25%	Rp 75,00	25%	Rp 100,00	25%	Rp 125,00	25%	Rp 150,00	25%	Rp 175,00	25%	Rp 200,00	25%	Rp 225,00	25%	Rp 250,00	25%	Rp 275,00		
6	Program Pembangunan Desa dan Peningkatan Perikanan, Sosial dan Kesehatan, PDR, Membina dan Peningkat Sosial Kemasyarakatan																									
7	Program Pembangunan Kebudayaan, Kemasyarakatan Sosial	25%	25%	Rp 88,32	25%	Rp 80,00	25%	Rp 100,00	25%	Rp 120,00	25%	Rp 150,00	25%	Rp 180,00	25%	Rp 200,00	25%	Rp 220,00	25%	Rp 240,00	25%	Rp 260,00	25%	Rp 280,00		
8	Program Kebudayaan Kebudayaan, Kemasyarakatan Sosial	12,30%	12,30%	Rp 154,79	12,30%	Rp 250,00	12,30%	Rp 350,00	12,30%	Rp 450,00	12,30%	Rp 550,00	12,30%	Rp 650,00	12,30%	Rp 750,00	12,30%	Rp 850,00	12,30%	Rp 950,00	12,30%	Rp 1.050,00	12,30%	Rp 1.150,00		
9	Program Budaya Sosial/Religi Kemasyarakatan			Rp 243,10																						
10	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Sosial	25%	25%	Rp 39,57	25%	Rp 50,00	25%	Rp 75,00	25%	Rp 100,00	25%	Rp 150,00	25%	Rp 200,00	25%	Rp 250,00	25%	Rp 300,00	25%	Rp 350,00	25%	Rp 400,00	25%	Rp 450,00		
<b>SUB TOTAL URUSAN WAJIB SOSIAL</b>				Rp 1.287,96		Rp 2.640,00		Rp 3.590,00		Rp 4.580,00		Rp 5.570,00		Rp 6.560,00		Rp 7.550,00		Rp 8.540,00		Rp 9.530,00		Rp 10.520,00		Rp 11.510,00		
23	<b>KEBUDAYAAN</b>																									
1	Program Pengembangan Mata Budaya	6 Orang	0	Rp	30 orang	Rp 140,00	30 orang	Rp 150,00	42 orang	Rp 155,00	48 orang	Rp 160,00	54 orang	Rp 165,00	60 orang	Rp 170,00	66 orang	Rp 175,00	72 orang	Rp 180,00	78 orang	Rp 185,00	84 orang	Rp 190,00		
2	Program Pengelolaan Kebudayaan Budaya	42 Sesi	0	Rp	10 Orang	Rp 100,00	10 Orang	Rp 100,00	10 Orang	Rp 100,00	10 Orang	Rp 100,00	10 Orang	Rp 100,00	10 Orang	Rp 100,00	10 Orang	Rp 100,00	10 Orang	Rp 100,00	10 Orang	Rp 100,00	10 Orang	Rp 100,00		
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	200 orang	0	Rp	210 orang	Rp 180,00	225 orang	Rp 185,00	250 orang	Rp 190,00	300 orang	Rp 205,00	350 orang	Rp 210,00	400 orang	Rp 215,00	450 orang	Rp 220,00	500 orang	Rp 225,00	550 orang	Rp 230,00	600 orang	Rp 235,00		





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR BUKU PROGRAM	REVISI BUKU PROGRAM (REVISI)	TARUHAN	2015			2016			2017			2018			2019			REVISI BUKU PROGRAM
				TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Program Pengembangan Jejaring Pengabdian Masyarakat Budaya	5	7 Bekerja	0	Rp	70,00	3 Kegiatan	8 Bekerja	80,00	3 Kegiatan	140,00	9 Bekerja	140,00	3 Kegiatan	Rp	140,00	9 Bekerja	140,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
1	Program Pengembangan Jejaring Pengabdian Masyarakat Budaya	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0	Rp	150,00	6 Kegiatan	6 Kegiatan	155,00	7 Kegiatan	190,00	7 Kegiatan	190,00	7 Kegiatan	Rp	200,00	7 Kegiatan	200,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
1	Program Pengembangan Jejaring Pengabdian Masyarakat Budaya	12 Kegiatan	12 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp	65,50	4 Kegiatan	6 Kegiatan	135,00	6 Kegiatan	180,00	7 Kegiatan	190,00	7 Kegiatan	Rp	200,00	7 Kegiatan	200,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
1	Program Pengembangan Jejaring Pengabdian Masyarakat Budaya	100%	100%	44	Rp	305,00	2 Kegiatan	44	760,00	128	600,00	177	675,00	204	Rp	885,00	204	885,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
<b>SUB-JUMLAH KEBERHASILAN</b>																			
24	STATISTIK				Rp	590,00			1.480,00		1.480,00		1.480,00		Rp	1.480,00		1.480,00	
1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				Rp	495,00			435,00		471,00		527,00		Rp	603,00		603,00	Sekolah SKPD
<b>SUB-JUMLAH KEBERHASILAN WADIB STATISTIK</b>																			
26	KEARIFAN				Rp	495,00			435,00		471,00		527,00		Rp	603,00		603,00	
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kecamatan				Rp	75,00	2 SKPD	4 SKPD	78,75	6 SKPD	86,62	8 SKPD	91,16	10 SKPD	Rp	91,16	10 SKPD	91,16	Kantor Kecamatan dan Perencanaan Daerah
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arif Daerah			500 Arsip	Rp	165,00	1500 Arsip	2000 Arsip	173,25	2000 Arsip	191,01	2500 Arsip	200,39	3000 Arsip	Rp	200,39	3000 Arsip	200,39	Kantor Kecamatan dan Perencanaan Daerah
3	Program Pemeliharaan Rumi/Bachula Sarana dan Prasarana Kecamatan				Rp	155,73	3 rool opak penyempunan arsip	4 lembar penyempunan arsip peta	210,00	4 lembar penyempunan arsip peta	220,50	13 rak arsip	243,10	18 rak arsip	Rp	243,10	18 rak arsip	243,10	Kantor Kecamatan dan Perencanaan Daerah
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			SKPD KKR	Rp	1.086,08	SKPD KKR	SKPD KKR	131,25	SKPD KKR	137,81	SKPD KKR	151,94	SKPD KKR	Rp	151,94	SKPD KKR	151,94	Kantor Kecamatan dan Perencanaan Daerah
<b>SUB-JUMLAH TERDAFTAR WADIB KEARIFAN</b>																			
26	PERKOTAAN				Rp	1.241,80			595,25		652,91		652,91		Rp	652,91		652,91	
1	Program Pengembangan Budaya Basa dan Pembinaan Perpustakaan Masyarakat				Rp	1.792,40	6 Kecamatan Gemar Membaca	6 Kecamatan Gemar Membaca	1.862,02	7 Kecamatan Gemar Membaca	1.976,12	8 Kecamatan Gemar Membaca	2.074,93	9 Kecamatan Gemar Membaca	Rp	2.176,68	9 Kecamatan Gemar Membaca	2.176,68	Kantor Kecamatan dan Perencanaan Daerah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR URUTAN PEMERINTAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	KEMASUKAN TAHUN 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		SUDUT PERALOKAN JAWAB
				TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	Tersedianya perpuskahan elektronik yang handal dan representatif	4		3000 e-book	Rp 138,25	Rp 145,48	3000 e-book	Rp 152,73	4000 e-book	Rp 160,39	5000 e-book	Rp 168,41	Kantor Layanan dan Perpustakaan Daerah		
<b>SUB JONKOR URUTAN WAJIB PERFOKUSAN</b>																
1	URUTAN PELAKSANA PEKERJAAN															
1	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Sumbudaya Kelautan	Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dibina dan berdayakan (kelompok)	3.300,87	63	2.908,65	Rp 3.660,00	Rp 3.720,00	77	Rp 3.920,00	95	Rp 4.050,00	120	Rp 4.180,00	Dinas Perikanan dan Kelautan		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Sumbudaya Kelautan	Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat perikanan dan kelautan yang dibina (kelompok)	14 kelompok	14 kelompok	30,00	Rp 75,00	Rp 205,00	16 kelompok	Rp 705,00	17 kelompok	Rp 165,55	19 kelompok	Rp 100,00	Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Pelaksana Penyuluhan, Perikanan, Perikanan dan Kelautan		
3	Program Peningkatan Kemandirian dan Penguatan Ketahanan dalam Penguasaan Sumbudaya Laut	Meningkatnya jumlah kawasan pengembangan usaha perikanan yang terdistribusikan dan per UU (kecamatan)	4 Kecamatan	4 Kecamatan	108,37	Rp 250,00	Rp 300,00	4 Kecamatan	Rp 320,00	4 Kecamatan	Rp 375,00	4 Kecamatan	Rp 400,00	Dinas Perikanan dan Kelautan		
4	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wisatawan Mancanegara Masyarakat	Realisasi kegiatan budaya kelautan (kali)	56,38	1	51,96	Rp 75,00	Rp 75,00	1	Rp 80,00	1	Rp 80,00	1	Rp 85,00	Dinas Perikanan dan Kelautan		
5	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi ikan budidaya (ton)	499,056	2.372	134,40	Rp 540,00	Rp 100,00	2.869	Rp 125,00	3.472	Rp 150,00	3819	Rp 150,00	Dinas Perikanan dan Kelautan		
		Meningkatnya kelompok budidaya ikan (kelompok)	20kp	20 kp	134,40	Rp 50,00	Rp 50,00	20 kp	Rp 50,00	20 kp	Rp 50,00	20 kp	Rp 50,00	Badan Pelaksana Penyuluhan, Perikanan, Perikanan dan Kelautan		
6	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)	3.657,79	21.996	4.500,69	Rp 4.900,00	Rp 5.325,00	24.020	Rp 4.845,00	25.855	Rp 4.520,00	26.760	Rp 4.775,00	Dinas Perikanan dan Kelautan		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR PROGRAM DAN SUB-PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM (OUTPUT)	KONDISI TAHUN 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		KELOMPOK SASARAN	
				TARGET	RP (MUTU)	TARGET	RP (MUTU)	TARGET	RP (MUTU)	TARGET	RP (MUTU)	TARGET	RP (MUTU)	TARGET	RP (MUTU)		
				6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11		12
1	2	Meningkatnya pengembangan sistem penyuluhan pertanian	4	3	200,73	350,00	5	350,00	5	350,00	5	350,00	7	350,00	7	350,00	Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6	5	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	-	3	369,12	700,00	3	700,00	3	700,00	3	700,00	3	700,00	3	700,00	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
9	8	Program Optimalisasi Pengalihan dan Pemertan Produk Hasil Perikanan	-	3	30,00	100,00	3	100,00	3	100,00	3	100,00	3	100,00	3	100,00	Dinas Perikanan dan Kelautan
10	9	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Tawar dan Air Tanah	499,056	2	2,756,60	4,970,00	2	4,970,00	2	4,970,00	2	4,970,00	2	4,970,00	2	4,970,00	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
11	10	Program Pengembangan Sarana Prasarana Pemertan Pengalihan Hasil Perikanan	1.187,60	1	2,533,36	2,600,00	1	2,600,00	1	2,600,00	1	2,600,00	1	2,600,00	1	2,600,00	Dinas Perikanan dan Kelautan
12	11	Program Pemertan dan Rehabilitasi Rantai Pasok Perairan Laut	9,76	1	55,22	450,00	3	450,00	3	450,00	3	450,00	3	450,00	3	450,00	Dinas Perikanan dan Kelautan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	KEMAS, KEMAS PENGALIHAN DAN PENGALIHAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS)	KEMAS TAMBAH 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		REVISI PERALIHAN JAWAS 17
				TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	4													
13	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan	Proses Peningkatan dan Kualitas Masyarakat (Rak)		2	Rp 66,04	3	Rp 125,00	3	Rp 125,00	4	Rp 125,00	4	Rp 125,00	5	Rp 150,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan proses Kualitas Pendidikan yang Kualitas Pendidikan			Rp 42,24		Rp 55,00		Rp 60,00		Rp 65,00		Rp 65,00		Rp 90,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Kualitas Pendidikan	43,44	300	Rp 45,31	300	Rp 160,00	400	Rp 300,00	500	Rp 400,00	600	Rp 400,00	700	Rp 500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>REVISI PERALIHAN DAN PENCANAAN</b>																
					Rp 13.979,09		Rp 15.495,00		Rp 20.166,00		Rp 20.000,00		Rp 20.000,00		Rp 21.000,00	
3	1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	20%	3%	Rp 1.129,38	4%	Rp 287,23	5%	Rp 401,62	5%	Rp 481,94	5%	Rp 481,94	7%	Rp 578,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR KELEMBARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN	NOMOR TAHUN 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			2014		2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Pengembangan Kesehatan, Pangan, Perikanan/Peternakan	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Program Pengembangan Kesehatan, Pangan, Perikanan/Peternakan	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Program Pengembangan Kesehatan, Pangan, Perikanan/Peternakan	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NAMA URUSAN PERSYARIFAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KEBERLA PROGRAM (KOTICOMES)	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		KEF JABANG 17	
			TARGET	RP (MILYAR)	TARGET	RP (MILYAR)	TARGET	RP (MILYAR)	TARGET	RP (MILYAR)	TARGET	RP (MILYAR)	TARGET	RP (MILYAR)	TARGET	RP (MILYAR)		
			4	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	3	Rp 6.140,53	3%	Rp 50,00	3%	Rp 60,00	3%	Rp 71,00	5%	Rp 86,40	5%	Rp 100,60	Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, Kebudayaan dan Perdagangan, Badan Nakhil Perikanan, Perikanan dan Kebudayaan	437,24	Rp	6 Petani	Dinas Perikanan dan Perkebunan, Dinas Perkebunan, Kebudayaan dan Perdagangan, Badan Nakhil Perikanan, Perikanan dan Kebudayaan
4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	2 Petani	Rp 2.167,87	1 Petani	Rp 42,38	3 Petani	Rp 151,86	4 Petani	Rp 202,47	5 Petani	Rp 303,71	6 Petani	Rp 437,24	Dinas Perikanan dan Perkebunan, Dinas Perkebunan, Kebudayaan dan Perdagangan, Badan Nakhil Perikanan, Perikanan dan Kebudayaan	50,00	Rp	30 orang	Dinas Perikanan dan Perkebunan, Dinas Perkebunan, Kebudayaan dan Perdagangan, Badan Nakhil Perikanan, Perikanan dan Kebudayaan
5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	80 orang 9 kec	Rp 615,57	80 orang 9 kec	Rp 785,00	80 orang 9 kec	Rp 800,00	80 orang 9 kec	Rp 800,00	80 orang 9 kec	Rp 800,00	80 orang 9 kec	Rp 800,00	80 orang 9 kec	80 orang 9 kec	Rp 800,00	80 orang 9 kec	Badan Nakhil Perikanan, Perikanan dan Kebudayaan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR URUTAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	KORDISI TARUN 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN					2019		REVISI JAWAB 17		
				2014		2015		2016		2017			
				TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET		RP (MUTA)	
7	Program Pencegahan dan Peningkatan Penyakit Ternak	Menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular	4	5	7	8	9	11	12	14	15	16	Dinas Pertanian dan Peternakan
8	Program Pencegahan dan Peningkatan Penyakit Ternak	Menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular	4	5	7	8	9	11	12	14	15	16	Dinas Pertanian dan Peternakan
9	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya populasi ternak, produksi ternak, sertifikasinya konsumsi protein per gram/hari											Badan Nalaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kebudayaan
10	Program Sistem Informasi/Database Pertanian	Tersedianya Sistem Informasi/Database Pertanian											Dinas Pertanian dan Peternakan, Badan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kebudayaan
11	Program Pengembangan Agribisnis	Meningkatnya mutu dan akses pasar produk perkebunan	25%	3%	5%	2.287,05	5%	7%	3.478,33	4.000,08			Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Kebudayaan dan Pembangunan, Badan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kebudayaan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	URAIAN KEGIATAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KEBERLA PROGRAM (OUTPUTS)	KONDISI TAHUN 2013	2014			2015			2016			2017			2018			2019			KEPD PENGANGGUNG JAWAB	
				TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)		
1	Program Pengawasan dan Pengendalian Perikanan dan Budidaya Perikanan	Pertumbuhan Stok Perikanan dan Budidaya Perikanan dan peningkatan Perikanan dan Transmigrasi Perikanan (%)	4		6	5.108,25	7		9	100,00	11	4%		100,00	13	4%	34	382,39	4%	100,00	17	Dinas Perikanan dan Perairan, Dinas Perikanan, Peternakan, Kelautan dan Perairan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kelautan, Perikanan, Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Perikanan, Satuan Bagian Kerjasama Perikanan	
2			4		6			9			11	4%		100,00	13	4%	34	382,39	4%	100,00	17	Dinas Perikanan dan Perairan, Dinas Perikanan, Peternakan, Kelautan dan Perairan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kelautan, Perikanan, Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Perikanan, Satuan Bagian Kerjasama Perikanan	
21	Program Peningkatan Sumbudhita Dengan Berkelanjutan	Lama Transmigrasi Paksi (Ha)	67.170	68.513		10.851,18	11.931,30	71.281	11.931,30	12.967	72.967		13.179,43	14.428,37	75.644		15.864,01				15.864,01	Dinas Perikanan dan Perairan	
22	Program Peningkatan Sumbudhita Dengan Berkelanjutan	Meningkatkan produksi ikan, produksi ternak, budidaya ikan di tambak per gram/ha/ha/tan																					Dinas Perikanan dan Perairan
23	Program Peningkatan Sumbudhita Dengan Berkelanjutan	Produksi Paksi (Tonn)	217.912	217.912		5.307,11	6.045,83	226.944	6.045,83	229.687	229.687		6.638,41	7.290,25	246.547		8.097,27				8.097,27	Dinas Perikanan dan Perairan	
		Produksi Jangkang (ton)	11.927	30.783		11.927	22.712	22.712	22.712	22.712	22.712		22.712	22.712	24.086		24.086				24.086	Dinas Perikanan dan Perairan	
		Produksi Udi Kayu (ton)	4.926	8.388		8.717	8.948	8.948	8.948	8.948	8.948		8.948	8.948	9.325		9.325				9.325	Dinas Perikanan dan Perairan	
		Produksi Udi, Jalur (ton)	1.193	1.316		1.320	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342		1.342	1.342	1.383		1.383				1.383	Dinas Perikanan dan Perairan	
		Produksi Kerabat (ton)	63	35		36	36	36	36	36	36		36	36	39		39				39	Dinas Perikanan dan Perairan	
		Produksi Kerang Perah (ton)	67	72		73	74	74	74	74	74		74	74	76		76				76	Dinas Perikanan dan Perairan	
		Produksi Kerang Hijau (ton)	5	6		6	6	6	6	6	6		6	6	8		8				8	Dinas Perikanan dan Perairan	
		Pertumbuhan jumlah produksi tanaman pangan (%)										4%				6%				9%	200,00		Dinas Perikanan dan Perairan, Satuan Bagian Kerjasama Perikanan, Budidaya Perikanan, Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Perikanan





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR URUTAN PERSYARIFAN DAS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (PERFORMANCE)	SARAN TAMBAH	2014		2015		2016		2017		2018		2019		DASAR PERENCANAAN DAS
				TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	
1	3	Produksi Bermanfaat (ton)	52.782	6	91.533	93.636	5.314,10	5.940,51	95.231	99.078	6.433,36	7.056,51	99.078	103.925	7.056,51	Dinas Perikanan dan Perikanan
15	3	Produksi Ikan (ton)	306	5	919	937	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	Dinas Perikanan dan Perikanan
		Produksi Ikan (ton)	5.423	6	5.882	5.894	212	212	212	212	212	212	212	212	212	Dinas Perikanan dan Perikanan
		Produksi Ikan (ton)	208	6	212	212	540	560	560	560	560	560	560	560	560	Dinas Perikanan dan Perikanan
		Produksi Ikan (ton)	228	6	530	540	736	750	750	750	750	750	750	750	750	Dinas Perikanan dan Perikanan
		Produksi Ikan (ton)	707	6	721	736	490	500	500	500	500	500	500	500	500	Dinas Perikanan dan Perikanan
		Produksi Ikan (ton)	471	6	480	490	91	92	92	92	92	92	92	92	92	Dinas Perikanan dan Perikanan
		Produksi Ikan (ton)	87	6	89	91	586	597	597	597	597	597	597	597	597	Dinas Perikanan dan Perikanan
		Produksi Ikan (ton)	563	6	574	586										Dinas Perikanan dan Perikanan
		Produksi Ikan (ton)		6												Dinas Perikanan dan Perikanan
		Produksi Ikan (ton)		6												Dinas Perikanan dan Perikanan
16		Program Peningkatan Hasil Tambak, Daging Sapi, Budidaya Ikan, Perikanan dan Bepor Hasil Perikanan		7												Dinas Perikanan dan Perikanan
		Jumlah Madu Daging Beras (ton)		7												Dinas Perikanan dan Perikanan
		Jumlah produksi usaha yang produktif (ton)		7												Dinas Perikanan dan Perikanan
17		Program Peningkatan Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Beras yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal														Dinas Perikanan dan Perikanan
		Populasi Sapi (ekor)	18.233		15.180	15.636	4.744,07	4.744,07	16.105	17.085	5.740,33	6.314,36	17.085	17.085	6.314,36	Dinas Perikanan dan Perikanan
		Populasi Kambing (ekor)	42.360		49.097	51.550			54.120	56.836			56.836	59.678		Dinas Perikanan dan Perikanan
		Populasi Babi (ekor)	34.812		37.895	39.033			40.204	42.652			42.652	42.652		Dinas Perikanan dan Perikanan
		Populasi Ayam Buras (ekor)	2.009.714		2.519.349	2.582.332			2.646.891	2.733.083			2.733.083	2.760.889		Dinas Perikanan dan Perikanan
		Populasi Ayam Pedaging (ekor)	6.405.011		5.314.795	5.447.665			5.583.857	5.723.433			5.723.433	5.866.539		Dinas Perikanan dan Perikanan
		Populasi Ayam Petelur (ekor)	184.118		187.800	191.556			195.387	199.295			199.295	203.281		Dinas Perikanan dan Perikanan
		Populasi Ibib (ekor)	116.423		68.960	73.160			75.354	77.615			77.615	79.944		Dinas Perikanan dan Perikanan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH	INDIKATOR KEMERIAH PROGRAM (PERFORMANCE)	KEMERIAH TAHUN 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		KEMERIAH TAHUN 2019
				TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	
1	2	Meningkatnya proporsi ternak, produksi ternak, tercapainya konsumsi protein per gram/ha/ha	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Program Pencapaian Teknologi Tepat Guna dan Varietas Unggul Spesifik Lokal	Produksi Paksi (Ton)	217.912	217.912	228.344	2574,92	2.834,61	234.667	2.574,92	234.667	2.834,61	240.534	3.118,07	246.547	3.499,87	Dinas Pertanian dan Perikanan, Bidang Perikanan
<b>SUB-REKORDA KEMERIAH SELAMA PERAKARAS</b>																
3	KEKUTAKAL															
1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Tercapainya Pemanfaatan Pengabdian SDG	40%	10%	500,44	30%	1.000,00	10%	1.500,00	10%	1.322,30	10%	1.520,88	10%	1.749,01	Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan
		Meningkatnya Pengabdian, peran dalam pelaksanaan kegiatan teknis / rangkai		30 org	68,37	30 org	90,00	30 org	100,00	30 org	100,00	30 org	100,00	30 org	100,00	Bidang Perikanan
2	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Berkurangnya luas hutan dan lahan kritis	30.130 Ha	900 Ha	5.729,66	1.100 Ha	5.927,90	1.300 Ha	6.520,60	1.580 Ha	7.172,75	1.900 Ha	7.890,03	2.300 Ha	8.679,03	Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan
3	Program Perencanaan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Tercapainya pengabdian kerangka hutan	25%	5%	65,33	5%	270,00	5%	304,00	5%	368,80	10%	466,56	15%	599,87	Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan
4	Program Pembinaan dan Peningkatan Industri Hasil Hutan	Tercapainya Pembinaan dan Peningkatan Industri Hasil Hutan														Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan
5	Program Pembinaan dan Peningkatan Bidang Kehutanan	Tercapainya terbit Pengawasan kerangka hutan	40%	5%	53,59	5%	742,74	5%	854,15	10%	982,27	10%	1.129,61	10%	1.329,05	Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	BIDANG URUSAN PEMENDAYAKAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM (OUTPUTS)	KEMUNDURAN TARUHI 2013	2014				2015				2016				2017				2018				2019				KEMUNDURAN TARUHI 2013	DINAS PERKAWASAN JABAR
				TARGET	RP (MILYAR)	TARGET	RP (MILYAR)	TARGET	RP (MILYAR)	TARGET	RP (MILYAR)	TARGET	RP (MILYAR)	TARGET	RP (MILYAR)	TARGET	RP (MILYAR)	TARGET	RP (MILYAR)	TARGET	RP (MILYAR)	TARGET	RP (MILYAR)	TARGET	RP (MILYAR)	TARGET	RP (MILYAR)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	Program Peningkatan Usaha Kesehatan	Meningkatnya industri usaha kesehatan	40%			5%	Rp 100,00	5%	Rp 144,00	5%	Rp 172,80	5%	Rp 207,36	5%	Rp 246,72	5%	Rp 296,06	5%	Rp 355,27	5%	Rp 426,33	5%	Rp 509,60	5%	Rp 605,52	Dinas Perikanan, Kehutanan dan Pertambangan			
2	Program Optimalisasi Produk Hasil Hutan	Meningkatnya terbit penataan produksi hasil hutan	45%			5%	Rp 100,00	5%	Rp 144,00	5%	Rp 172,80	5%	Rp 207,36	5%	Rp 246,72	5%	Rp 296,06	5%	Rp 355,27	5%	Rp 426,33	5%	Rp 509,60	5%	Rp 605,52	Dinas Perikanan, Kehutanan dan Pertambangan			
3	Program Pembangunan Hutan Kota	Terwujudnya Pembangunan Hutan Kota	1 Paket (25 Ha)			2 Paket	Rp 150,00	2 Paket	Rp 270,00	2 Paket	Rp 300,00	2 Paket	Rp 330,00	2 Paket	Rp 360,00	2 Paket	Rp 390,00	2 Paket	Rp 420,00	2 Paket	Rp 450,00	2 Paket	Rp 480,00	2 Paket	Rp 510,00	Dinas Perikanan, Kehutanan dan Pertambangan			
4	Program Pembangunan Kecamatan Perikanan Hutan (KPH)	Terwujudnya Pembangunan KPH	1 Unit			0 Unit		1 Unit	Rp 250,00	1 Unit	Rp 250,00	1 Unit	Rp 250,00	1 Unit	Rp 250,00	1 Unit	Rp 250,00	1 Unit	Rp 250,00	1 Unit	Rp 250,00	1 Unit	Rp 250,00	1 Unit	Rp 250,00	Dinas Perikanan, Kehutanan dan Pertambangan			
5	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Kehutanan	Meningkatnya Penerapan Teknologi Pembangunan dan Kehutanan				9 Inc	Rp 475,00	9 Inc	Rp 475,00	9 Inc	Rp 475,00	9 Inc	Rp 475,00	9 Inc	Rp 475,00	9 Inc	Rp 475,00	9 Inc	Rp 475,00	9 Inc	Rp 475,00	9 Inc	Rp 475,00	9 Inc	Rp 475,00	Dinas Perikanan dan Perikanan, Dinas Perikanan, Kehutanan dan Pertambangan, Badan Pelaksana Penyuluhan Perikanan, dan Kehutanan			
				Rp 6.287,39				Rp 8.818,68				Rp 10.448,82				Rp 12.078,96				Rp 13.709,10				Rp 15.339,24					
6	KESEHATAN DAN DAYA BUMIH																												
1	Program Pembinaan dan Penguatan Bidang Pertambangan	Jumlah Penerapan Iuran sektor Pertambangan Wilayah Kab. Kubu Raya (milyar)	0,10			10%	Rp 27,13	10%	Rp 348,00	10%	Rp 417,60	10%	Rp 501,12	10%	Rp 584,64	10%	Rp 668,16	10%	Rp 751,68	10%	Rp 835,20	10%	Rp 918,72	10%	Rp 1.002,24	Dinas Bumihutani			
2	Program Penguatan dan Penerbitan Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Mervak Lingkungan	Terwujudnya kerucutan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan rakyat	60%			5%	Rp 60,00	5%	Rp 75,00	5%	Rp 90,00	5%	Rp 105,00	5%	Rp 120,00	5%	Rp 135,00	5%	Rp 150,00	5%	Rp 165,00	5%	Rp 180,00	5%	Rp 195,00	Dinas Bumihutani			
3	Program Pembinaan dan Penguatan Bidang Kecerdasan	Terwujudnya kemampuan listrik bagi masyarakat	1.455,00			36 Unit	Rp 170,38	36 Unit	Rp 606,00	36 Unit	Rp 727,20	36 Unit	Rp 848,40	36 Unit	Rp 969,60	36 Unit	Rp 1.090,80	36 Unit	Rp 1.212,00	36 Unit	Rp 1.333,20	36 Unit	Rp 1.454,40	36 Unit	Rp 1.575,60	Dinas Bumihutani			
				Rp 6.287,39				Rp 8.818,68				Rp 10.448,82				Rp 12.078,96				Rp 13.709,10				Rp 15.339,24					



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NAMA DEPARTEMEN / KEMENTERIAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI TAHUN 2013	2014				2015				2016				2017				2018				2019			
				TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)	TARGET	RP (JUUTA)		
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Bidang Geologi	Terwujudnya alat serta informasi geologi Sumber Daya Mineral	0 Pokokan	4 Pokokan	3 Pokokan	3 Pokokan	420,00	200,00	1.000,00	49 Brevet	30 Brevet	3 Pokokan	504,00	604,00	2 Pokokan	2 Pokokan	2 Pokokan	504,00	604,00	2 Pokokan	2 Pokokan	2 Pokokan	2 Pokokan	725,76	725,76		
SOB JUMLAH URUSAN PELIBAT DAIR SUMBER DAYA MINERAL				Rp	397,71	Rp	1.865,00	Rp	1.447,00	Rp	542,00	Rp	1.724,00	Rp	288.858,86	Rp	126.790,27	Rp	288.858,86	Rp	126.790,27	Rp	126.790,27	Rp	126.790,27		
5	FAKTERATA	Teknologinya Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	22 Brevet	25 Brevet	30 Brevet	30 Brevet	465,00	175,46	515,00	49 Brevet	51 Brevet	51 Brevet	542,00	550,00	65 Brevet	65 Brevet	745,00	745,00	65 Brevet	65 Brevet	65 Brevet	65 Brevet	745,00	745,00			
6	Program Pengembangan Potensial Pariwisata	Terwujudnya Pengembangan Destinasi Pariwisata	5 Kegiatan	8 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	790,00	724,96	1.180,00	14 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	1.175,00	1.170,00	23 Kegiatan	23 Kegiatan	1.060,00	1.060,00	23 Kegiatan	23 Kegiatan	23 Kegiatan	23 Kegiatan	1.060,00	1.060,00			
7	Program Pengembangan Kecamatan	Terwujudnya Pengembangan Kecamatan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	7 Kegiatan	10 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	760,00	314,42	305,00	18 Kegiatan	22 Kegiatan	22 Kegiatan	620,00	675,00	32 Kegiatan	32 Kegiatan	685,00	685,00	32 Kegiatan	32 Kegiatan	32 Kegiatan	32 Kegiatan	685,00	685,00			
8	Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	145,00	115,00	145,00	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	145,00	145,00	3 Kegiatan	3 Kegiatan	175,00	175,00	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	175,00	175,00			
SOB JUMLAH URUSAN PELIBAT PARTISIPATA				Rp	1.214,84	Rp	2.486,00	Rp	2.486,00	Rp	2.486,00	Rp	2.486,00	Rp	2.486,00	Rp	2.486,00	Rp	2.486,00	Rp	2.486,00	Rp	2.486,00	Rp	2.486,00		
9	KELOMPOK	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah																									
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terwujudnya Industri Kecil dan Menengah																									
2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Umbah Industri Kecil dan Menengah yang dibina/ dikembangkan umhanya (unit usaha)	30 Unit usaha	30 Unit usaha	45 Unit usaha	45 Unit usaha	275,00	106,80	250,00	45 Unit usaha	45 Unit usaha	45 Unit usaha	300,00	330,00	45 Unit usaha	45 Unit usaha	330,00	330,00	45 Unit usaha	45 Unit usaha	45 Unit usaha	45 Unit usaha	330,00	330,00			
3	Program Penataan Struktur Industri	Memangkas Kemampuan Teknologi Industri																									
4	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Terwujudnya Struktur Industri																									
SOB JUMLAH URUSAN PELIBAT INDUSTRI				Rp	1.770,19	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39		
TOTAL				Rp	1.770,19	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39	Rp	1.913,39		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	NOMOR KEURAT PEMERINTAH DAERAH	NOMOR TANDA PERSEKIP	2014				2015				2016				2017				2018				2019			
			TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)		
1	1	1	1	Rp 242,51	1	Rp 60,00	1	Rp 65,00	1	Rp 70,00	1	Rp 75,00	1	Rp 80,00	1	Rp 85,00	1	Rp 90,00	1	Rp 95,00	1	Rp 100,00	1	Rp 105,00		
2	2	2	25		30	Rp 170,00	35	Rp 175,00	40	Rp 180,00	45	Rp 185,00	50	Rp 190,00	55	Rp 195,00	60	Rp 200,00	65	Rp 205,00	70	Rp 210,00	75	Rp 215,00		
3	3	3	1		2	Rp 20,00	2	Rp 20,00	3	Rp 30,00	3	Rp 30,00	4	Rp 40,00	4	Rp 40,00	5	Rp 50,00	5	Rp 50,00	6	Rp 60,00	6	Rp 60,00		
4	4	4	0%		10%	Rp 40,00	20%	Rp 50,00	30%	Rp 60,00	40%	Rp 70,00	50%	Rp 80,00	60%	Rp 90,00	70%	Rp 100,00	80%	Rp 110,00	90%	Rp 120,00	100%	Rp 130,00		
5	5	5	1 Kelompok	Rp 249,80	2 Kelompok	Rp 30,00	3 Kelompok	Rp 30,00	3 Kelompok	Rp 30,00	3 Kelompok	Rp 30,00	3 Kelompok	Rp 30,00	3 Kelompok	Rp 30,00	3 Kelompok	Rp 30,00	3 Kelompok	Rp 30,00	3 Kelompok	Rp 30,00	3 Kelompok	Rp 30,00		
6	6	6	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp 65,00	1 Dokumen	Rp 65,00	1 Dokumen	Rp 65,00	1 Dokumen	Rp 65,00	1 Dokumen	Rp 65,00	1 Dokumen	Rp 65,00	1 Dokumen	Rp 65,00	1 Dokumen	Rp 65,00	1 Dokumen	Rp 65,00	1 Dokumen	Rp 65,00		
7	7	7	605 UTTP	1.440,00	650 UTTP	1.540,00	1100 UTTP	1.630,00	1200 UTTP	1.730,00	1300 UTTP	1.830,00	1400 UTTP	1.930,00	1500 UTTP	2.030,00	1600 UTTP	2.130,00	1700 UTTP	2.230,00	1800 UTTP	2.330,00	1900 UTTP	2.430,00		
8	8	8	9 Kompetensi	105,00	13 Kompetensi	100,00	17 Kompetensi	100,00	21 Kompetensi	100,00	25 Kompetensi	100,00	29 Kompetensi	100,00	33 Kompetensi	100,00	37 Kompetensi	100,00	41 Kompetensi	100,00	45 Kompetensi	100,00	49 Kompetensi	100,00		
9	9	9	7 Kec	45,00	9 Kec	55,00	9 Kec	55,00	9 Kec	55,00	9 Kec	55,00	9 Kec	55,00	9 Kec	55,00	9 Kec	55,00	9 Kec	55,00	9 Kec	55,00	9 Kec	55,00		
10	10	10	2748,25	Rp 2.748,25		Rp 2.985,00		Rp 3.085,00		Rp 4.022,00		Rp 4.022,00		Rp 4.022,00		Rp 4.022,00		Rp 4.022,00		Rp 4.022,00		Rp 4.022,00		Rp 4.022,00		
11	11	11	25%	Rp 279,11	10%	Rp 75,00	10%	Rp 150,00	10%	Rp 200,00	10%	Rp 250,00	10%	Rp 300,00	10%	Rp 350,00	10%	Rp 400,00	10%	Rp 450,00	10%	Rp 500,00	10%	Rp 550,00		
12	12	12	25%	Rp 38,09	10%	Rp 50,00	10%	Rp 75,00	10%	Rp 100,00	10%	Rp 150,00	10%	Rp 200,00	10%	Rp 250,00	10%	Rp 300,00	10%	Rp 350,00	10%	Rp 400,00	10%	Rp 450,00		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO	KIDANG BERSAMA PEMERINTAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM (SUCCESS)	BUNYI TAMBAH 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019		MUTU PELAKSANAAN JABAR 17														
				TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)	TARGET	RP (MUTA)		TARGET	RP (MUTA)												
1	Program Transmigrasi Regional	Jumlah transmigrasi regional yang dilakukan	25%	5	10%	6	20%	7	10%	8	100,00	9	10%	10	150,00	11	10%	12	200,00	13	10%	14	250,00	15	10%	16	300,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
<b>BUS JUMELAH BERSAMA PELAKSANA KERTANINGRAN</b>																														
<b>TOTAL BERSAMA VALID DAN BERSAMA PELAKSANA</b>																														



#### **D. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Oleh karena itu, Kabupaten Kubu Raya pada saat menyusun dokumen RPJMD Tahun 2014-2019, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah dilakukan sekaligus melakukan upaya mitigasi terhadap kebijakan, rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup.

Proses penyusunan KLHS dilakukan melalui beberapa fase yang terdiri dari serangkaian diskusi dengan pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsure legislative, eksekutif, tokoh masyarakat, LSM, dan pihak swasta.

Setelah melalui pelingkupan terhadap indikasi rencana program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, telah diidentifikasi beberapa program yang diperkirakan mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan yang selanjutnya dirumuskan pula upaya mitigasi yang perlu dipersiapkan dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Rumusan hasil upaya mitigasi terhadap program pembangunan jangka menengah Kabupaten Kubu Raya yang diperkirakan mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dapat dilihat pada tabel 8.2. Selain itu, hasil lengkap KLHS terhadap RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 tertuang dalam dokumen laporan tersendiri.



Tabel 8.2  
KAJIAN PENGARUH PROGRAM RPJMD

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	LOKASI PROGRAM	VOLUME	KONDISI AWAL	MANFAAT PROGRAM	DAMPAK NEGATIF	UPAYA MITIGASI	SKPD
<b>KESEHATAN</b>								
1.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Tersebar di 9 Kecamatan Kabupaten Kubu Raya		9 Puskesmas Perawatan, 11 Puskesmas non perawatan, 28 Pustling, 67 Pustu	- Peningkatan pelayanan kesehatan	- Limbah sampah yang bersifat patologis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun sarana prasarana pengelolaan limbah dan sampah yang sesuai standar;</li> <li>Menyusun standar penanganan (SOP) limbah / sampah medis ke lokasi pembuangan akhir.</li> </ul>	Dinas Kesehatan
2.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Kec. Rasau Jaya	1 RSUD	2 RSU TNI/Polri	- Peningkatan pelayanan kesehatan	- Limbah sampah yang bersifat patologis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun sarana prasarana pengelolaan limbah dan sampah yang sesuai standar</li> <li>Menyusun standar penanganan (SOP) limbah / sampah medis ke lokasi pembuangan akhir</li> <li>Menyusun dokumen lingkungan</li> </ul>	Dinas Kesehatan



PEKERJAAN UMUM								
3.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	12 koridor sesuai yg tercantum dalam RTRW KKR	278 km	258 km	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan aksesibilitas</li> <li>- meningkatkan perekonomian daerah</li> <li>- meningkatkan kesejahteraan masyarakat</li> <li>- mengatasi kondisi darurat jalan dan jembatan</li> <li>- kelancaran aksesibilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alih fungsi lahan</li> <li>- bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial.</li> <li>- pembangunan jalan antar kota tidak berkeseuaian dengan arah alur sungai sehingga akan menimbulkan dampak keberlanjutan sistem sungai di sisi jalan baru potensial berkembang daerah terbangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan inventarisasi P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) masing-masing trase rencana jalan. Oleh Kantor Pertanahan.</li> <li>- Menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>- Perlu dilakukan penataan dan pemetaan garis sempadan sungai (GSS)</li> <li>- Perlu dilakukan penataan dan penetapan DAS</li> <li>- Perlu menetapkan dan mengawasi pemanfaatan ruang milik jalan</li> <li>- Membangun jalan paralel/lingkungan untuk mengakomodir tumbuhnya kawasan pemukiman</li> </ul>	Dinas Bina Marga dan Pengairan
4.	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Pada jalan dan jembatan yg rusak karena keadaan darurat				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan inventarisasi P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) masing-masing trase rencana jalan. Oleh Kantor Pertanahan.</li> <li>- Menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>- Perlu dilakukan penataan dan pemetaan garis sempadan sungai (GSS)</li> <li>- Perlu dilakukan penataan dan penetapan DAS</li> <li>- Perlu menetapkan dan mengawasi pemanfaatan ruang milik jalan</li> <li>- Membangun jalan paralel/lingkungan untuk mengakomodir tumbuhnya kawasan pemukiman</li> </ul>	Dinas Bina Marga dan Pengairan	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

5.	Program Pembangunan Sahuran Drainase/Gorong-gorong	Sejalan dengan pembangunan jalan	50 %	30 %	- pengendalian banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan tata air di sekitar jaringan, bertambahnya aliran puncak dan perubahan perilaku masyarakat di sekitar jaringan.</li> <li>- Pembangunan drainase sekunder di kota sedang yang melewati permukiman padat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul>	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
6.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Tersebar di 9 Kecamatan	45 %	30 %	- menunjang ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- berpotensi mengubah ekosistem dan iklim mikro pada kawasan tersebut dan berpengaruh pada kawasan di sekitarnya.</li> <li>- Berpotensi mengubah sistem tata air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul>	Dinas Bina Marga dan Pengairan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

7.	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Kec. Sungai Kakap, Kec. Sungai Raya, Kec. Kuala Mandor B	50 %	30 %	- Peningkatan kualitas air dan air baku - Pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat	yang ada pada kawasan yang luas secara drastis	- Potensi konflik penggunaan air dengan pengguna air lainnya - Gangguan neraca air	- Melakukan kajian Awal Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai Peraturan Menteri PU. - Menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	
8.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	- Sungai Kakap (10 1/d) - Kuala Dua (10 1/d) - Desa Kapur (10 1/d) - Kuala Mandor B (10 1/d)	50 %	30 %	- Pemenuhan air bersih bagi masyarakat	Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air pemakaian air di sepanjang jaringan pipa	- Dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual.	- Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air pemakaian air di sepanjang jaringan pipa	- Menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

9.	Program Pengendalian Banjir	Tersebar di 9 Kecamatan	40 %	25 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengendalian banjir pada kawasan pertanian dan permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan.</li> <li>- Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak</li> <li>- Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (run off)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sosialisasi proyek kepada masyarakat;</li> <li>- Menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>- Menjamin kesempatan kerja dan peluang berubahan bagi penduduk setempat.</li> </ul>	Dinas Bina Marga dan Pengairan
10.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersebar di Kabupaten Kubu Raya			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan tata guna lahan</li> <li>- Bangkitan lalu lintas</li> <li>- Urban sprawl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul>	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
11.	Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan	9 Kecamatan	55 %	30 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pembangunan perdesaaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alih fungsi lahan</li> <li>- bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kajian P4T oleh Kantor Pertanahan Kabupaten.</li> <li>- Menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul>	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan



PERUMAHAN								
12.	Program Pengembangan Perumahan	Kec. Sungai Kakap, Kec. Sungai Raya, Kec. Sungai Ambawang	45 %	40 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan perekonomian daerah</li> <li>- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangkitan lahu lintas</li> <li>- Alih fungsi lahan</li> <li>- Daya dukung lahan, seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar</li> <li>- Tingkat kebutuhan air bersih</li> <li>- Limbah yang dihasilkan dari kegiatan perumahan dan permukiman</li> <li>- Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material, manusia, dan lalu lintas)</li> <li>- Peningkatan runoff yang mengakibatkan banjir di hilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun kebijakan pengaturan perumahan</li> <li>- Melaksanakan Penyusunan RP4D Kabupaten</li> <li>- Menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul>	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan



13.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Lingkungan kumuh di semua Kecamatan, terutama Kec. Sungai Kakap, Kec. Sungai Raya	50 %	30 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan PSU Perumahan</li> <li>Peningkatan kesehatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan RTH</li> <li>Limbah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pembangunan prasarana dan sarana umum yang sesuai standar</li> <li>pembangunan drainase sesuai standar</li> </ul>	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
<b>PENATAAN RUANG</b>								
14.	Program Perencanaan Tata Ruang	Prioritas RDTR dan PZ untuk kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, Sungai Kakap, Rasau Jaya, kawasan strategis	15 Perda	0 Perda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian tata ruang</li> <li>Terwujudnya penataan ruang yang sesuai peruntukannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan sistem perkotaan akan mendorong percepatan perubahan penggunaan tanah di sekitar lokasi pusat kawasan prioritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan peruntukan kawasan sesuai dengan karakteristik lokasi dan zoning regulation</li> <li>Menetapkan peraturan perijinan pemanfaatan ruang</li> <li>Menyusun dan mengaplikasikan jaringan data spasial Kabupaten Kubu Raya</li> <li>Memperiapkan Peraturan Bupati Kab Kubu Raya ttg Sistem Perizinan Terpadu.</li> <li>Membakukan konsep insentif dan disinsentif</li> </ul>	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan  Bappeda  BPMPPT



<b>KEHUTANAN</b>						
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Tersebar di Kabupaten Kubu Raya	60 %	40 %	Terwujudnya pemantapan pengelolaan SDH - Peningkatan kesejahteraan masyarakat	- Erosi Lahan - Gangguan terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama penyakit, bentang alam dan potensi konflik sosial.
15.						- Menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan
16.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Tersebar di Kabupaten Kubu Raya	9.100 Ha	30.150 Ha	- Berkurangnya luas hutan dan lahan kritis	- Erosi Lahan dan Abrasi  Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan
17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Tersebar di Kabupaten Kubu Raya	45 %	25 %	- Terwujudnya pengendalian kerusakan hutan	- Melaksanakan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan - Melakukan Telaah NKT (Nilai Konservasi Tinggi)  Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan



**B A B IX**

**P E N E T A P A N I N D I K A T O R D A N**  
**K I N E R J A D A E R A H**

---

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**  
**Kabupaten Kubu Raya 2014-2019**





## BAB IX

### PENETAPAN INDIKATOR DAN KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2014-2019 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 9.1**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**  
**TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD II 2019	SEKPD YANG MELAKSANAKAN
				2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ASPEK MAJU (Misi 2, 3 dan 4)</b>									
1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat (Misi 2)	• Rata-rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)	7,11***	7,40	7,60	7,90	8,20	8,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pendidikan</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> <li>• Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> <li>• Dinas Bina Marga dan Pengairan</li> <li>• Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</li> <li>• Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>• Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi dan Pembangunan</li> <li>• Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah</li> <li>• Dinas Perhubungan</li> </ul>

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD II 2019	SKPD YANG MELAKSANAKAN
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3 • Angka Melek Huruf (%)	4 89,07***	5 92,00	6 93,00	7 94,00	8 95,00	9 96,00	10 • Dinas Pendidikan • Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana • Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa • Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan • Dinas Bina Marga dan Pengairan • Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Perhubungan	
2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat (Misi 2)	• Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,37***	66,50	66,75	67,00	67,30	67,60	• Dinas Kesehatan • Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan • Dinas Bina Marga dan Pengairan	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD II 2019	SKPD YANG MELAKSANAKAN
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>▪ Dinas Perhubungan</li> <li>▪ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>▪ Dinas Kesehatan</li> <li>▪ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jaminan perlindungan sosial</li> <li>- Penderita Cacat (Orang)</li> <li>- Lansia (Orang)</li> <li>- Anak Terlantar (Orang)</li> </ul>	782***	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)</li> </ul>	2,043***	2.100	2.150	2.200	2.300	2.400		
			248***	350	450	600	650	700		
			2,53*	2,30	2,20	2,10	2,05	2,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Kesehatan</li> <li>▪ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</li> <li>▪ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>▪ Dinas Kesehatan</li> <li>▪ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</li> <li>▪ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>▪ Dinas Kesehatan</li> <li>▪ Dinas Kesehatan dan Catatan Sipil</li> </ul>	
3	Terwujudnya perekonomian daerah yang mempunyai daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Misi 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengeluaran perkapita (Rp)</li> </ul>	629.720***	648.801	661.842	668.460	675.145	685.145	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>▪ Dinas Pertanian dan Peternakan</li> <li>▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>▪ Dinas Koperasi dan UMKM</li> </ul>	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD II 2019	SKPD YANG MELAKSAMAKAN
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perikanan dan Kelautan</li> <li>• Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan</li> <li>• Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</li> <li>• Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</li> <li>• Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> <li>• Dinas Bina Marga dan Pengairan</li> <li>• Dinas Perhubungan</li> <li>• Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• Dinas Pertanian dan Peternakan</li> <li>• Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>• Dinas Koperasi dan UMKM</li> <li>• Dinas Perikanan dan Kelautan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi (%)</li> </ul>	6,77****	7,10	7,20	7,30	7,40	7,50		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD II 2019	SEKPD YANG MELAKSAKAKAN
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan</li> <li>▪ Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</li> <li>▪ Badan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</li> <li>▪ Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> <li>▪ Dinas Bina Marga dan Pengairan,</li> <li>▪ Dinas Perhubungan</li> <li>▪ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>▪ Dinas Pertanian dan Peternakan</li> <li>▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>▪ Dinas Koperasi dan UMKM</li> <li>▪ Dinas Perikanan dan Kelautan</li> <li>▪ Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks gmi</li> </ul>	0,37***	0,36	0,35	0,34	0,32	0,30		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD II 2019	SKPD YANG MELAKSANAKAN
				2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</li> <li>▪ Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</li> <li>▪ Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> <li>▪ Dinas Bina Marga dan Pengsiran</li> <li>▪ Dinas Perhubungan</li> <li>▪ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat kemiskinan (%)</li> </ul>	6.27***	6.00	5.70	5.40	5.10	4.80	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>▪ Dinas Pertanian dan Peternakan</li> <li>▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>▪ Dinas Koperasi dan UMKM</li> <li>▪ Dinas Perikanan dan Kelautan</li> <li>▪ Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan</li> <li>▪ Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</li> </ul>

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD II 2019	SKPD YANG MELAKSANAKAN
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</li> <li>▪ Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> <li>▪ Dinas Bina Marga dan Pengairan</li> <li>▪ Dinas Perhubungan</li> <li>▪ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>▪ Dinas Kesehatan</li> <li>▪ Dinas Pendidikan</li> <li>▪ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</li> </ul>
4	Meningkatnya pendapatan masyarakat (Misi 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat pengangguran terbuka (%)</li> </ul>	6,06***	5,90	5,70	5,40	5,20	5,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>▪ Dinas Pertanian dan Peternakan</li> <li>▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>▪ Dinas Koperasi dan UMKM</li> <li>▪ Dinas Perikanan dan Kelautan,</li> <li>▪ Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan,</li> </ul>	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD II 2019	SKPD YANG MELAKSANAKAN
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</li> <li>▪ Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, dan Perikanan, dan Kehutanan</li> <li>▪ Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> <li>▪ Dinas Bina Marga dan Pengairan</li> <li>▪ Dinas Perhubungan</li> <li>▪ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> </ul>
5	Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan budaya (Misi 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase kondisi jalan dalam keadaan baik/mantap</li> <li>a. Jalan Kabupaten (%)</li> <li>b. Jalan Lingkungan (%)</li> <li>▪ Panjang jalan terbangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase kondisi jalan dalam keadaan baik/mantap</li> </ul>	44	52	59	67	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> <li>▪ Dinas Bina Marga dan Pengairan</li> <li>▪ Dinas Bina Marga dan Pengairan</li> <li>▪ Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> <li>▪ Dinas Bina Marga dan Pengairan</li> <li>▪ Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> </ul>	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD II 2019	SKPD YANG MELAKSANAKAN
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		a. Jalan Kabupaten 12 Koridor dalam RTRW Kabupaten Kubu Raya (Km)	258,30	47,81	45,66	42,47	35,85	454,89 24,80	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Bina Marga dan Pengairan</li> </ul>	
		b. Jalan Lingkungan (Km)	320	70	75	75	75	690 75	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Panjang jembatan terbangun/Meter (pada jalan kabupaten)</li> </ul>	522	90	90	72	53	880 M 53	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Bina Marga dan Pengairan</li> <li>Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dermaga/steiger yang terbangun (Buah)</li> </ul>	159	40	40	40	40	359 40	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perhubungan dan Dinas Perikanan dan Kelautan</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio Pengairan/Sumber Daya Air</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Bina Marga dan Pengairan,</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan pelayanan air bersih</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, PDAM Kubu Raya</li> </ul>	
6	Tersedianya layanan air bersih yang memadai dan pengelolaan air limbah yang baik (Misi 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perkotaan (%)</li> <li>b. Perdesaan (%)</li> </ul>	34,89	1	1	1	1	39,89 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> <li>PDAM</li> </ul>	
			5,45	0,25	0,27	0,03	0,15	6,30 0,15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> <li>PDAM</li> </ul>	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD II 2019	SKPD YANG MELAKSANAKAN
				2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan (Misi 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan pelayanan persampahan (%)</li> </ul>	14	8	7	7	7	50 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> <li>Badan Lingkungan Hidup</li> </ul>
8	Terbangunnya kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni (Misi 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan rumah layak huni (Unit)</li> </ul>	11.019	3.981	4.000	4.000	4.000	31.000 4.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> </ul>
9	Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya (Misi 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya RTRW Kabupaten yang ditetapkan dengan Perda</li> <li>Rencana rinci yang ditetapkan dengan Perda</li> <li>Rasio RTH (%)</li> </ul>	Pembahasan	Ada	ada	ada	ada	ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Sekretariat Daerah</li> <li>Sekretariat DPRD</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> <li>Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> <li>Badan Lingkungan Hidup</li> <li>Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan</li> </ul>

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD II 2019	SKPD YANG MELAKSANAKAN
				2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Tersedianya infrastruktur energi yang layak dan merata (Misi 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan pelayanan Listrik (%)</li> </ul>	92.34	93.88	95.39	96.87	98.32	99.73	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> <li>Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan</li> <li>PLN</li> </ul>
<b>2. ASPEK HARMONIS DAN BERBUDAYA (Misi 1 dan 2)</b>									
1	Terwujudnya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik (Misi 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah</li> <li>Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal yang sudah 100%</li> <li>Proporsi Belanja Modal terhadap APBD (%)</li> </ul>	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh SKPD</li> <li>SKPD yang wajib melaksanakan SPM</li> <li>Seluruh SKPD</li> <li>Seluruh SKPD</li> </ul>
2	Terwujudnya perencanaan yang efektif dan efisien (Misi 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)</li> </ul>	50	5	5	10	10	90	10
3	Meningkatnya kapasitas SKPD penyelenggara pelayanan publik (Misi 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (SKPD)</li> <li>Rasio aparatur yang memenuhi standart kompetensi jabatan (%)</li> </ul>	3	5	10	9	5	38	9
			60	5	5	5	5	90	10

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD II 2019	SKPD YANG MELAKSANAKAN
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kelembagaan unit pelayanan kepada masyarakat (UPT)</li> <li>Peningkatan Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi (SKPD)</li> <li>Perda inisiatif (DPRD) (Perda)</li> </ul>	51	2	3	3	3	63	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Daerah</li> <li>Badan Kepegawaian Daerah</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pelestarian cagar budaya (Unit)</li> <li>Jumlah sarana dan industri kreatif</li> <li>- Sarana Kreatif (Unit)</li> <li>- Industri Kreatif (Kegiatan)</li> </ul>	19	4	4	4	4	38	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Daerah</li> <li>Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelestarian budaya tradisional dan kearifan lokal (Event)</li> </ul>	4	1	1	1	1	2	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD</li> </ul>
4	Meningkatkan kepedulian stakeholder terhadap pelestarian budaya dan peningkatan kreativitas (Misi 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pelestarian cagar budaya (Unit)</li> <li>Jumlah sarana dan industri kreatif</li> <li>- Sarana Kreatif (Unit)</li> <li>- Industri Kreatif (Kegiatan)</li> </ul>	0	2	2	2	2	10	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</li> <li>Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</li> <li>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>Dinas Koperasi dan UMKM</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan/ Rehab fasilitas keagamaan (Unit)</li> <li>Persentase fasilitas kegiatan keagamaan/ sosial masyarakat (%)</li> </ul>	1.244	50	50	50	50	1.494	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Daerah</li> <li>Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> </ul>
5	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama (misi 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase fasilitas kegiatan keagamaan/ sosial masyarakat (%)</li> </ul>	100	100	100	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Daerah</li> <li>Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perindugan Masyarakat</li> </ul>

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD II 2019	SEKPD YANG MELAKSANAKAN
				2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>• Kantor Setpod PP</p>									
<p><b>3. ASPEK DAYA SAING (Misi 3 dan 4)</b></p>									
1	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (misi 3)	• Tingkat pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (Berdasarkan Pemanfaatan Ruang) (%)	50	5	10	10	10	95	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• Dinas Pondsapstan, Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>• Badan Lingkungan Hidup</li> <li>• Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>• Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>• Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>• Dinas Pertanian dan Peternakan</li> <li>• Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</li> <li>• Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>• Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> </ul>



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD II 2019	SEKPD YANG MELAKSAMAKAN
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan</li> </ul>
2	Terkendalinya pemanfaatan ruang (misi 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya (Secara Makro dan Detail Tata Ruang) (%)</li> </ul>	67	5	5	5	5	$\frac{92}{5}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> <li>Badan Lingkungan Hidup</li> <li>Dinas Bina Marga dan Pengairan</li> <li>Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan</li> </ul>	
3	Tersedianya ketahanan pangan yang berkelanjutan (misi 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks ketahanan pangan</li> </ul>	51,41	61,29	71,16	81,46	91,32	91,32	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Daerah</li> <li>Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</li> <li>Dinas Pertanian dan Peternakan</li> <li>Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan</li> <li>Dinas Perikanan dan Kelautan</li> </ul>	
4	Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan (misi 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian Adipura (%)</li> </ul>	30	35	40	50	60	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Lingkungan Hidup</li> <li>Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> </ul>	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD II 2019	SKPD YANG MELAKSANAKAN
				2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Terjaganya kualitas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup (misi 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kualitas lingkungan hidup</li> </ul>	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pendidikan</li> <li>Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan</li> <li>Dinas Perhubungan</li> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>Badan Lingkungan Hidup</li> <li>Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan</li> <li>Dinas Pendidikan</li> <li>Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan</li> <li>Dinas Perhubungan</li> <li>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> </ul>





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD II 2019			SKPD YANG MELAKSAWAKAN	
				2015	2016	2017	2018	2019	FMDN	PMA	FMDN		PMA
1		3	4	5	6	7	8	9	10				
6	Meningkatnya investasi penanaman modal daerah (misi 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat pertumbuhan PDRB (%)</li> <li>Tingkat Pendapatan daerah (Rp.000.000)</li> <li>Nilai investasi berskala nasional (FMDN/PMA) (Rp.000.000)</li> <li>Jumlah investor berskala nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 6.405.253 (6,90%)</li> <li>88.139.000</li> <li>3.484.556.090</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 6.851.059 (6,96%)</li> <li>94.309.000</li> <li>3.486.851.231</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 7.330.633 (7,00%)</li> <li>100.911.000</li> <li>4.016.235.877</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 7.845.976 (7,03%)</li> <li>107.074.000</li> <li>4.625.993.353</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 8.398.333 (7,04%)</li> <li>114.569.000</li> <li>5.328.326.114</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 8.991.255 (7,06%)</li> <li>122.589.000</li> <li>6.137.289.228</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</li> <li>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</li> </ul>				

Ket : \* data BPS tahun 2010

\*\* data BPS tahun 2011

\*\*\* data BPS tahun 2012

\*\*\*\* data BPS tahun 2013



**B A B X**

**P E D O M A N T R A N S I S I D A N  
K A I D A H P E L A K S A N A A N**

---

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kubu Raya 2014-2019**



## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 - 2019 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Tahap Kedua dari 4 (empat) pentahapan pencapaian pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kubu Raya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029.

#### **10.1. Pedoman Transisi**

Masa pelaksanaan RPJMD II Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 akan berakhir pada bulan Februari 2019, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan penyusunan RKPD tahun 2020 agar berpedoman pada sasaran dan arah kebijakan serta mengacu kepada tahapan ketiga dan skala prioritas RPJPD Kabupaten Kubu Raya 2009-2029 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, dan RPJMD kedua Kabupaten Kubu Raya tetap dapat dijadikan rujukan/pedoman sepanjang belum ditetapkannya RPJMD ketiga 2019-2024.

#### **10.2. Kaidah Pelaksanaan**

RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2013, yang menjadi pedoman bagi setiap kepala SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan sebagai pedoman untuk menyusun RKPD serta perencanaan penganggaran APBD setiap tahunnya.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

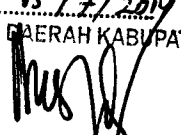
1. Lembaga Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Kubu Raya, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan sebaik-baiknya;



1992



2. Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 - 2019 dengan menggerakkan semua potensi daerah secara optimal;
3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya wajib mengoordinasikan pelaksanaan program-program di dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 - 2019;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2014-2019 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Kubu Raya.
6. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan RPJMD ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kubu Raya wajib melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam proses penjabaran RPJMD ini ke dalam RENSTRA SKPD Kabupaten;
7. Bappeda Kabupaten Kubu Raya wajib melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja dalam RPJMD ini setiap tahun berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau penelitian yang dilakukan oleh Bappeda sendiri.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal... 15 / 7 / 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
  
HUSEIN SYAUWIK  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN... 2014 ... NOMOR... 1 .....

BUPATI KUBU RAYA, 

  
RUSMAN ALI